



ECONUSA
NATURE • CULTURE • CONSERVATION



EKUATORIAL

HUTAN PAPUA KUNCI MITIGASI KRISIS IKLIM

Kompilasi Karya Jurnalistik



HUTAN PAPUA KUNCI MITIGASI KRISIS IKLIM

KUMPULAN HASIL KARYA JURNALISTIK
PESERTA JOURNALIST FELLOWSHIP 2021

HUTAN PAPUA KUNCI MITIGASI KRISIS IKLIM
KUMPULAN HASIL KARYA JURNALISTIK
PESERTA JOURNALIST FELLOWSHIP 2021

PENULIS :

Ernes Broning Kakisina
Willem Oscar Makatita
Sayied Syech Boften
Yosep Erwin Nothan
Olha Irianti Mulalinda
John Victor
Nees Nikolas Makuba
Musa Abubar
Putri Nurjannah
Tantowii Djauhari

EDITOR BUKU :

Noni Arnee

MENTOR :

Abdul Manan
Budi Nurgianto

PENANGGUNGJAWAB :

Rochimawati

CETAKAN PERTAMA :

Desember 2021

DITERBITKAN OLEH :



The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)

Jalan Kalibata Timur IVG No.10, Kalibata, Jakarta, Indonesia.

Tel. +62 81215611947

E-mail: sekretariat@siej.or.id

DIDUKUNG OLEH :



ECONUSA
NATURE • CULTURE • CONSERVATION



EKUATORIAL

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar Yayasan EcoNusa | 6 |
| Kata Pengantar SIEJ | 8 |
| Kata Pengantar Mentor | 11 |
| Ernes Broning Kakisina - Antaranews Papua Barat | 15 |
| Konservasi Burung Surga Melalui Atraksi Wisata di Hutan Warkesi Raja Ampat | 16 |
| Willem Oscar Makatita - Teropongnews.com | 22 |
| Cenderawasih Merah Masa Depan Hutan Waigeo di Raja Ampat | 23 |
| Sayied Syech Bofthen - Papua Barat Pos | 37 |
| Hilangnya Pesona Tanjung Kasuari | 38 |
| Yoseph Erwin Nothan - Papua Channel TV | 53 |
| Dampak Kerugian Jika Pulau Um Habis Terkikis Abrasi | 54 |
| Olha Irianti Mulalinda - Sorongnews.com | 65 |
| Mama Papua Penjaga Mangrove Kampung Maibo | 66 |
| John Victor - Tabloid Papua Baru | 74 |
| Nasib Mangrove Kampung Enggros | 75 |
| Nees Nikolas Makuba - ParaparaTV.id | 84 |
| Raibnya Khayouw dan Kahebey dari Danau Sentani Akibat Rusaknya Habitat Asli | 85 |
| Musa Abubar - Tribunnews Papua | 91 |
| Menjaga Gerabah Kampung Abar | 92 |

| | |
|--|-----|
| Putri Nurjannah - Papuaunik.com | 102 |
| Gerakan Menjaga Ibu dari Kampung Yoka | 103 |
| Tantowi Djauhari - Jurnalpapua.id | 116 |
| Menepis Bujuk Rayu Cukong Kayu | 117 |
| Mentor dan Pembicara Tamu | 136 |

Kata Pengantar Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa)

Yayasan EcoNusa didirikan untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah Indonesia Timur khususnya Tanah Papua dan Kepulauan Maluku.

Hutan Papua menjadi benteng terakhir Indonesia dalam upaya menghadapi krisis iklim yang sedang terjadi. Berbagai inisiatif baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah banyak dilakukan di Tanah Papua dalam menjaga kelestarian hutannya. Cerita-cerita baik ini kerap tak terdengar oleh publik dari luar Indonesia Timur.

Oleh karena itu, Yayasan EcoNusa bersama *The Society of Indonesian Environmental Journalists* (SIEJ) mengajak jurnalis lokal untuk lebih banyak menuliskan cerita-cerita baik di Tanah Papua. Melalui program Journalist Fellowship “Hutan Papua Kunci Mitigasi Perubahan Iklim” diharapkan dapat membuat jurnalis lokal khususnya di Jayapura dan Sorong lebih peduli akan isu lingkungan di Tanah Papua.

Rangkaian Journalist Fellowship dibuka dengan pembekalan kepada jurnalis lokal untuk memperdalam isu lingkungan dan peningkatan kapasitas jurnalis dalam mengangkat isu lingkungan dalam sebuah artikel. Setelah pembekalan para jurnalis membuat proposal liputan. Dari proposal liputan tersebut, EcoNusa mendukung 10 proposal terbaik dari para peserta dengan topik yang beragam.

Melalui karya jurnalistik yang dihasilkan, kami berharap tidak hanya memperluas cerita-cerita lingkungan dari Tanah Papua, tetapi juga memacu semangat jurnalis lokal untuk terus menggali cerita-cerita lainnya terkait isu lingkungan yang ada di Tanah

Papua. Sehingga dapat menyadarkan publik secara luas mengenai pentingnya menjaga sumber daya alam di Tanah Papua sebagai bagian dari upaya memperlambat laju perubahan iklim.

Menutup tahun 2021, Yayasan EcoNusa dan SIEJ mempersembahkan buku rangkuman karya-karya peserta Journalist Fellowship 2021 “Hutan Papua Kunci Mitigasi Perubahan Iklim” sebagai dokumentasi cerita-cerita lingkungan dari Tanah Papua. Dengan hadirnya buku ini semoga makin banyak cerita-cerita baik lainnya yang dapat didokumentasikan dan disebarluaskan kepada publik di Indonesia.

Salam,

Bustar Maitar
CEO Yayasan EcoNusa

Kata Pengantar

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)

Tema “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim”, menjadi topik menarik, karena ditengah maraknya pemberitaan negatif di Tanah Papua terdapat upaya-upaya melindungi hutan tropis di Tanah Papua yang menjadi benteng terakhir hutan tropis di Indonesia.

Ada begitu banyak cerita menarik dan inspiratif terkait inisiatif dan komitmen dari pemerintah dan masyarakat adat dalam melindungi hutan.

Namun sayangnya, cerita baik tersebut tidak banyak diangkat oleh media dibandingkan dengan berita yang mengangkat isu negatif. Padahal, hutan Papua merupakan benteng terakhir Indonesia dalam menghadapi krisis iklim yang sedang terjadi, sehingga cerita masyarakat Papua dalam menjaga hutan Papua penting untuk disebarluaskan melalui media.

Di situlah peran jurnalis dan media massa dalam menyebarkan informasi mengenai pengelolaan sumber daya alam khususnya di Tanah Papua. Informasi sumber daya alam di Tanah Papua belum banyak terekspos di media massa karena jurnalis kerap terkendala pada logistik dan akses untuk meliput.

Saat ini di pemerintah lokal di Tanah Papua memiliki komitmen untuk melindungi hutan Papua sehingga kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan stakeholders yang terlibat sangat penting dalam menjaga hutan Papua untuk menghadapi krisis iklim dan keberlangsungan kehidupan masyarakat Papua.

Media massa tidak hanya menjadi salah satu alat untuk menyebarkan informasi secara obyektif dan edukatif, tapi juga kontrol sosial yang konstruktif. Walaupun masih ada kekurangan dalam pengelolaan media massa, namun media massa memiliki kedudukan strategis untuk menyebarluaskan informasi dan memengaruhi pandangan masyarakat.

Bagi *The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)*/ Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia, ini merupakan kesempatan berharga dapat bekerja sama dengan Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa) dalam program Journalist Workshop dan Fellowship “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” yang dilaksanakan di Sorong dan Jayapura, Papua.

Sesuai dengan temannya, program ini fokus pada bagaimana kondisi hutan di Papua yang menjadi kunci mitigasi krisis iklim. Program ini ditujukan bagi jurnalis di wilayah Sorong dan Jayapura dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dalam menulis dan melaporkan tentang kondisi hutan dan mendorong jurnalis lokal di wilayah Sorong dan Jayapura dalam mengangkat informasi pengelolaan sumber daya alam Tanah Papua tanpa intervensi atau agenda setting dari pihak manapun.

Usai pelatihan, 10 jurnalis terpilih mendapatkan beasiswa peliputan, yakni Ernes Broning Kakisina (Antaraneews Papua Barat), Willem Oscar Makatita (Teropongnews.com), Sayied Syech Boften (Papua Barat Pos), Yoseph Erwin Nothan (Papua Channel TV), Olha Irianti Mulalinda (Sorongnews.com), John Victor (Tabloid Papua Baru), Nees Nikolas Makuba (ParaparaTV.id, Musa Abubar (Tribunnews Papua), Putri Nurjannah (Papuaunik.com), dan Tantowi Djauhari (Jurnalpapua.id).

Selama proses pelaksanaan fellowship ini, para jurnalis mendapat pendampingan dari jurnalis senior sebagai mentor yang membantu proses perencanaan, peliputan, dan penulisannya.

Hasil karya jurnalistik para jurnalis yang mendapatkan beasiswa itu kemudian dituangkan menjadi buku kompilasi yang kini berada di tangan Anda.

Buku kompilasi ini diharapkan dapat memicu liputan serupa di masa mendatang untuk lebih meningkatkan kepedulian publik dan pemerintah terhadap Hutan Papua dan habitat di dalamnya.

Saya mengucapkan terima-kasih kepada Yayasan EcoNusa yang memberi dukungan pada kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada mentor, yaitu Abdul Manan dan Budhi Nurgianto.

Selamat membaca.

Jakarta, 16 Desember 2021

Rochimawati

Ketua Umum SIEJ

Kata Pengantar Mentor

Mentoring adalah salah satu bagian penting dari pemberian fellowship kepada jurnalis. Dalam proses ini, mereka yang diberi kepercayaan menjadi mentor, diharapkan bisa berbagi pengalaman kepada orang yang mendapatkan mentoring (mentee) tentang bagaimana melakukan kerja jurnalistik indepth reporting tentang topik tertentu.

Tanggungjawab itulah yang diberikan kepada kami berdua, Abdul Manan dan Budi Nurgiyanto, dalam fellowship yang diselenggarakan oleh Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) ini. Pengalaman kami dalam membuat liputan mendalam, diharapkan bisa dibagikan kepada jurnalis yang mengikuti felowship untuk jurnalis di Papua ini.

Sesuai ekspektasi dari panitia, peserta fellowship ini diharapkan bisa menghasilkan liputan mendalam tentang isu perubahan iklim, perlindungan hutan di Papua, yang ditulis dengan metode indepth reporting. Dengan kebutuhan itu, maka mentoring yang diberikan meliputi pembuatan outline untuk kebutuhan reportase dan (tentu saja) memberikan guidance soal penulisan.

Outline dalam karya jurnalistik indepth reporting punya peran penting. Hampir bisa dipastikan bahwa liputan yang non-straight news memerlukan outline. Materi utama yang terdapat dalam outline itu meliputi “angle”, “bahan awal”, “nara sumber” dan “daftar pertanyaan”. Ada juga yang menambahkan rencana pembabakan penulisan di dalam outline.

Secara garis besar, outline dimaksudkan sebagai petunjuk bagi jurnalis dalam proses news gathering. Dengan angle yang tajam,

diharapkan bisa memandu pemilihan nara sumber yang tepat dan membuat daftar pertanyaan yang paling relevan. Secara teoritis, outline yang baik akan memberi peluang jurnalis untuk mendapatkan bahan membuat karya jurnalistik yang sesuai perencanaan.

News gathering adalah satu hal, news production adalah hal lain. Bahan yang bagus memang tak secara otomatis akan menghasilkan karya yang baik. Mentoring dalam tahapan penyusunan informasi menjadi berita ini meliputi penentuan informasi yang layak untuk menjadi lead atau pembuka dari sebuah karya jurnalistik. Setelah itu adalah bagaimana menyusun alur dari karya tersebut agar runut dan logis.

Idealnya, tahapan ini memerlukan waktu yang panjang. Ketika draft awal dari karya dikirimkan dari peserta kepada mentor, itu akan direview lebih dulu dan kemudian dikembalikan untuk diperbaiki. Proses ini idealnya tak hanya terjadi sekali, tapi bisa dua sampai tiga kali. Dengan cara itu, maka peserta bisa lebih banyak waktu belajar dari proses review dan revisi itu. Hanya saja, tak semua kita memiliki kemewahan soal waktu.

Itulah tahapan secara garis besar dalam proses mentoring dalam program SIEJ ini. Kami tahu bahwa ini mungkin bukan proses yang sempurna. Tapi itulah yang kami yakini bisa membantu peserta mendapatkan hasil terbaik untuk bisa membuat karya jurnalistik dengan metode indepth reporting. Sebagai mentor, kami senang dengan semangat para peserta untuk belajar. Dan kami juga gembira melihat berita yang dihasilkan dari proses belajar ini.

Mewakili mentor, kami minta maaf jika dalam proses belajar ini ada yang tak berkenan di hati, atau ada yang tak sesuai ekspektasi. Seperti halnya panitia penyelenggara, kami juga ingin agar sedikit pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dalam pelatihan dan mentoring itu akan memberi nilai tambah.

Menghasilkan karya jurnalistik yang baik itu tidak mudah. Kita semua menyadari itu. Penulis dan jurnalis legendaris Amerika Serikat Ernest pernah mengatakan, "Easy reading is hard

writing."Sebuah karya jurnalistik yang baik pasti dihasilkan dengan cara yang tidak mudah. Mungkin itulah alasan mengapa menjadi jurnalis itu seperti proses belajar yang tak pernah selesai.

Abdul Manan
Koordinator Mentor

HUTAN PAPUA KUNCI MITIGASI KRISIS IKLIM

KUMPULAN HASIL KARYA JURNALISTIK
PESERTA JOURNALIST FELLOWSHIP 2021



Ernes Broning Kakisina

Kantor Berita Antara Biro Papua Barat

Lahir di Papua, 11 November 1983. Jurnalis Kantor Berita Antara Biro Papua Barat yang akrab disapa Ernes dan Eb Penjelajah ini memulai karir sebagai jurnalis di Koran Harian Pagi Papua Pos Jayapura (2009- 2011). Pernah bekerja di beberapa media seperti Koran Harian Pagi Papua Selatan Pos Merauke (2002) dan Koran Suluh Papua Jayapura (2013).

Ernes mengaku mempunyai ketertarikan pada isu hutan, masyarakat adat dan kearifan lokal.

“Ini pertama kalinya mendapat kesempatan untuk melakukan peliputan tentang isu hutan dan dibiayai. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari workshop dan fellowship ini. Terima kasih SIEJ dan EcoNusa.”

Konservasi 'Burung Surga' melalui Atraksi Wisata di Hutan Warkesi Raja Ampat

Rabu, 17 November 2021



Atraksi burung cenderawasih merah menari di dahan pohon di kawasan hutan Warkesi, kabupaten Raja Ampat , Provinsi Papua Barat (Antara/ Ernes Broning Kakisina)

SORONG- Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, tidak hanya terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Ia juga punya hutan yang menyimpan berbagai keanekaragaman hayati. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, terdapat 258 spesies jenis burung. Ada 10 jenis burung endemik Papua dan 6 spesies diantaranya berada di Kabupaten Raja Ampat.

Enam spesies endemik di Raja Ampat masing-masing: *Wilson bop* (Cendrawasih botak), *Red bop* (Cendrawasih merah), *Waigeo brush turkey* (Maleo Waigeo), *Raja Ampat pitohui*, *Kofiau Paradise kingfisher* (Cekakak Pita Kofiau), dan *Kofiau monarch* (Kehicap Kofiau). Keenam inilah yang menjadi daya tarik wisata alam di kawasan hutan bagi para pencinta burung, fotografer, dan pencinta alam dari berbagai negara di belahan dunia.

Untuk menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati hutan Warkesi, Raja Ampat, pemerintah bersama masyarakat menghadirkan atraksi menonton burung Cenderawasih merah endemik Raja Ampat menari di alam liar. Salah satu Destinasi wisata menonton burung Cendrawasih merah endemik Raja Ampat adalah kawasan hutan Warkesi.

Destinasi wisata hutan dengan luas 300 hektar di kawasan penyangga cagar alam Waigeo Barat tersebut dikelola Kelompok Tani Hutan (KTH) Warkesi, yang dibentuk oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat.

Ketua KTH Warkesi Alvian Sopuiyo mengatakan, destinasi wisata menonton burung cenderawasih merah menari tersebut mulai buka awal tahun 2018. Ia mengaku termotivasi untuk melindungi burung Cenderawasih endemik ini karena kerap diajak dalam kegiatan sosialisasi soal konservasi oleh Edwin Dawa, seorang pemandu wisata pengamatan burung.

Alvian memiliki masa lalu sebagai pemburu burung Cenderawasih. "Dulu saya sering memburu burung cenderawasih merah untuk dijual mati menggunakan bahan pengawet formalin. Saya sudah tidak ingat dan hitung berapa banyak burung cenderawasih saya tembak mati dengan senapan angin untuk dijual. Namun yang saya ingat terakhir saya beli formalin 20 liter habis terpakai untuk mengawetkan burung cenderawasih agar bisa dijual," ujarnya, 23 Oktober 2021.

Burung Cenderawasih tangkapannya lantas diawetkan dan ia mendapatkan uang cukup besar. Satu ekor bisa dijual bisa lebih dari Rp 500 ribu. Hanya saja Alvian merasa seperti dikejar-kejar dan

kerap harus sembunyi-sembunyi dan menghindari polisi maupun petugas Balai Konservasi. Sebab, Cenderawasih tak boleh diburu karena dilindungi. “Selain itu saya merasa berdosa karena banyak orang berupaya kampanye melindungi cenderawasih untuk anak cucu di masa-masa mendatang sedangkan saya berburu untuk mendapatkan uang sesaat,” ujarnya.

Penghasilan dari membuka destinasi wisata menonton burung Cenderawasih merah di hutan Warkesi sebenarnya tidak besar. Satu orang tamu yang masuk kawasan hutan untuk menonton burung Cenderawasih merah menari perlu membayar Rp 250 ribu. Uangnyapun dibagi dengan anggota KTH Warkesi lainnya.

Namun, Alvian mengaku senang karena tak terbebani dan tidak perlu sembunyi-sembunyi dari polisi maupun balai konservasi seperti profesi dia sebelumnya. “Sekarang ini satu ekor cenderawasih menari di kawasan hutan Warkesi dinikmati sedunia sebab wisatawan yang sebagian besar adalah mancanegara hanya datang untuk menonton dan foto,” ujarnya.



Atraksi burung cenderawasih merah menari di dahan pohon di kawasan hutan Warkesi, kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat (Antara/ Ernes Broning Kakisina)

Alvian mengungkapkan, sejak destinasi ini dibuka pada tahun 2018 hingga tahun 2021, setidaknya ada 1.000 wisatawan dalam dan luar negeri yang berkunjung. Sebagian besar adalah fotografer asal Asia.

Selama pandemi, tidak ada kunjungan wisatawan. Destinasi wisata itu pun memilih tutup. "Masyarakat kelompok KTH Warkesi sebanyak 30 kepala keluarga memilih merawat kawasan dengan melakukan patroli secara rutin. Serta bertani untuk bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19," tambahnya.

Edwin Dawa, pemandu wisata yang juga anggota KTH Warkesi mengatakan, destinasi wisata pengamatan burung cendrawasih tersebut sejak dibuka pada tahun 2018 terus berkembang dan ramai kunjungan wisatawan minat khusus pencinta alam. KTH Warkesi bekerjasama dengan pemilik penginapan dan resort di Raja Ampat untuk mempromosikan destinasi ini dan menarik wisatawan untuk datang.

Wisatawan yang datang ke kawasan hutan Warkesi tidak hanya dapat menonton Cendrawasih merah, tetapi juga ada Cendrawasih botak. Hanya saja, kata Edwin Dawa, Cenderawasih botak ini masih liar dan jarang ditemukan. Ini berbeda dengan Cendrawasih merah yang setiap pagi maupun sore hari bisa terlihat menari di kawasan hutan tersebut. Di kawasan hutan Warkesi wisatawan juga dapat melihat jenis burung lainnya seperti Kakatua Jambul Kuning, Julang Papua, Kakatua Raja, Nuri, Raja Udang, Maleo Waigeo, dan berbagai jenis ular piton.

Pemandu wisata adalah pekerjaan yang sudah ditekuni Edwin Dawa cukup lama. Sebelumnya ia juga pernah bekerja di homestay dan resort untuk melayani wisatawan, selain aktif di berbagai kegiatan konservasi. Sampai akhirnya pada 2018 lalu ia bersama Alvian membuka destinasi wisata menonton burung Cenderawasih merah ini. "Kami konsisten menjaga kawasan hutan Warkesi karena kawasan itu ibarat piring makan. Artinya, ketika ada kunjungan wisatawan ada uang untuk makan," ujarnya, 23 Oktober 2021.



Atraksi burung cenderawasih merah menari di dahan pohon di kawasan hutan Warkesi, kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat (Antara/Ernes Broning Kakisina)

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, Budi Mulyanto mengatakan, setelah KTH Warkesi terbentuk, tetap ada pendampingan yang dilakukan. Juga ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan terhadap pengelola KTH dalam mengelola destinasi wisata menonton burung Cenderawasih merah tersebut.

hutan Waigeo, tetapi menggunakan metode sampel pada satu titik pengamatan. Pengamatan dilakukan pada satu titik tempat bermain burung cendrawasih merah seluas satu hektare sebagai sampel untuk mengetahui peningkatan populasi.

Berdasarkan pengamatan di Cagar Alam Waigeo Barat, kata Tasliman, dalam lima tahun terakhir ini terlihat ada peningkatan keberadaan Cenderawasih merah. Pada 2015 di satu hektar kawasan pengamatan ditemukan sebanyak 10 ekor, 2016 (10), 2017 (11), 2018 (15), 2019 (15). Ia mengajak masyarakat agar ikut menjaga burung endemik tersebut. "Biarkan burung itu hidup bebas di alam pulau Waigeo sehingga jika orang ingin melihatnya harus datang ke Raja Ampat," tambahnya.

Kelompok Tani Hutan Warkesi tidak hanya didampingi oleh BBKSDA Papua Barat, tetapi juga oleh lembaga konservasi Flora Fauna Internasional Program Raja Ampat. "Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan pemandu wisata pengamatan burung bagi KTH Warkesi, patroli, monitoring populasi Cenderawasih merah endemik Raja Ampat, semuanya dilakukan Flora Fauna Internasional Program Raja Ampat bersama BBKSDA Papua Barat," kata Program manager FFI Raja Ampat, Andhy Priyo Sayogo, 6 November 2021.

Andhy Priyo Sayogo berharap masyarakat Raja Ampat menjaga kelestarian hutan Warkesi dan Cenderawasih merah endemik Raja Ampat, burung yang juga kerap dijuluki sebagai "Burung Surga" karena keindahannya itu. Sebab, lembaga internasional yang mengamati konservasi, The International Union for Conservation of Nature (IUCN), menetapkan status spesies ini hampir terancam.

*Karya telah dipublikasikan di papuabaratar.antaranews.com,
17 November 2021*



Willem Oscar Makatita

Teropongnews.com

Malang melintang di dunia jurnalistik dan bekerja sebagai jurnalis sejak tahun 2008. Ketertarikan menulis isu lingkungan membuatnya memberanikan diri untuk mengikuti fellowship “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” yang diselenggarakan SIEJ dan EcoNusa. Dan ini menjadi pengalaman pertamanya melakukan peliputan mendalam.

“Fellowship ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas jurnalis di Papua terutama dalam menulis tentang isu hutan dan perubahan iklim agar lebih mudah dipahami publik. Ini tantangan baru saat harus mengumpulkan data akurat, mengejar narasumber, observasi ke lokasi peliputan di hutan dan mencari Cendrawasih untuk mendapatkan foto yang bagus. Benar-benar memacu adrenalin dan butuh perjuangan. Juga pengalaman berharga mendapat mentor berpengalaman yang mengajarkan sistematika penulisan. Tentu saja ini memotivasi Saya untuk terus menulis tentang hutan dan perubahan iklim. Terima kasih Mas Manan, SIEJ dan EcoNusa. Harapannya, ke depan makin banyak kegiatan serupa diselenggarakan di Papua.”

Cendrawasih Merah Masa Depan Hutan Waigeo Raja Ampat

Selasa, 16 November 2021



Burung Cenderawasih Merah (Paradisaea rubra) di hutan Warkesi salah satu satwa endemik pulau Waigeo Raja Ampat. Foto Willem Makatita/TN.

RAJA AMPAT - Alvian Sopuyo, 45 tahun, dulunya adalah pemburu Cenderawasih, burung yang menjadi ikon Papua. Pria kelahiran Palu, Sulawesi Tengah ini merantau ke Waisasi, Raja Ampat, saat daerah ini baru dimekarkan. Itu bermula dari adanya tawaran menggiurkan pada 2004 silam.

“Saat saya tidak ada pekerjaan tetap, tiba-tiba ada yang menawarkan mau membeli burung Cenderawasih dalam keadaan mati dengan harga Rp 700 ribu. Karena belum ada pekerjaan tetap, akhirnya saya pun mengiyakan untuk masuk hutan mencari Cenderawasih,” kata Alvian, Rabu, 20 Oktober 2021 lalu.

Lokasi tempatnya berburu adalah di kawasan Teluk Mayalibit, kampung Warsambin, sampai kawasan hutan Wawuyai. Alvian melakukannya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Cenderawasih tangkapannya dijual kepada penadah atau orang yang memesan untuk dijadikan souvenir dan mahkota burung Cenderawasih. Saat berburu, biasanya Alvian berada di hutan sampai seminggu. Hasilnya, dalam satu minggu itu ia bisa mendapatkan 10 burung. “Dalam satu tahun saya bisa mendapatkan 70 sampai 80 burung Cenderawasih untuk dijual,” terang Alvian.

Burung Cenderawasih hasil buruannya, kata Alvian, kebanyakan diselundupkan ke luar Papua. Paling banyak ke pulau Jawa untuk dijadikan hiasan, souvenir, atau aksesoris busana. Pengirimannya dilakukansetelahburungdiawetkan. Titikbalikdalamkehidupannya terjadi tahun 2017. Usai mendapatkan pelatihan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat bersama Flora dan Fauna Internasional (FFI), ia meninggalkan pekerjaannya itu dan beralih menjadi penjaga burung Cenderawasih.

Cenderawasih, yang kerap dijuluki sebagai “Burung Surga” karena keindahannya, secara hukum dilindungi oleh Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pelestarian Burung Cendrawasih. Namun, perburuan banyak terjadi untuk menjadikannya sebagai suvenir atau hiasan dan itu bisa membuatnya punah. Selain untuk souvenir, Cenderawasih juga sering dipakai untuk kebutuhan prosesi adat.

Burung Cenderawasih di dunia terdiri dari 14 genus dan 43 spesies. Sebagian besar spesiesnya berada di wilayah Indonesia, yaitu 30 spesies. Sebanyak 28 diantaranya berada di Papua dan Papua Barat. Khusus untuk wilayah kepulauan Raja Ampat ada 8 spesies burung

Cenderawasih, 3 spesies diantaranya adalah endemik di pulau Waigeo Raja Ampat.

Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk melindungi Cenderawasih. Antara lain dengan melarang penggunaannya untuk menjadi souvenir. Soal ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 660.1/6501/SET tanggal 5 Juni 2017 tentang Larangan Penggunaan Burung Cendrawasih Sebagai Aksesories dan Cinderamata. Surat edaran itu masih memperbolehkan penggunaannya dalam setiap proses adat yang bersifat sakral.

“Semua jenis burung Cenderawasih yang ada di Papua dan Papua Barat, termasuk tiga spesies endemik yang ada di pulau Waigeo Raja Ampat, dilindungi oleh undang-undang. Jadi itu yang membatasi peredarannya. Kalau burung Cenderawasih itu statusnya dilindungi, berarti tidak boleh diperjualbelikan atau tidak boleh diperdagangkan,” kata Tasliman, Kepala Bidang Teknis BBKSDA Papua Barat, Kamis, 28 Oktober 2021.

Balai Besar KSDA Papua Barat pada akhir Oktober 2020 juga melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi Populasi Cenderawasih di Kawasan Konservasi CA Waigeo Barat untuk mengetahui jenis, lokasi persebaran serta populasinya di alam liar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cakupan area survei seluas 425 Hektar. Metode yang digunakan adalah Variable Circular Plot (VCP), yaitu metode pengamatan yang dilakukan dengan membuat plot lingkaran dengan radius 50 meter dengan jarak antar plot 300 meter pada jalur pengamatan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, teridentifikasi beberapa jenis Cenderawasih yang ditemukan di lokasi plot pengamatan, diantaranya Cenderawasih Merah (*Paradisae rubra*), Cenderawasih Botak (*Cicinnurus respublica*) dan Manukodia Kilap (*Manucodia ater*). Hasil perhitungan juga didapatkan jumlah populasi rata-rata tiga jenis burung Cenderawasih yang teridentifikasi pada total luasan plot sampling 50,24 hektare sebanyak 57,3 individu. Estimasi kepadatan populasinya 0.9 individu per hektare.



Para penjaga hutan Warkesi Raja Ampat sekaligus penjaga burung Cenderawasih. Dari kiri ke kanan, Paskal, Alovia Sopuyo dan Morens Dawa. Mereka bertiga dulunya adalah pemburu Cenderawasih dan pembalak hutan secara liar yang kini berbalik arah menjaga hutan dan burung Cenderawasih. Foto Willem Makatita/TN.

Menurut Talisman, Cenderawasih sampai saat ini masih menjadi target perburuan dan perdagangan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin spesies endemik ini, khususnya di kawasan Cagar Alam Waigeo Barat, akan punah jika rantai perburuan dan perdagangannya tidak dihentikan. “Jumlah populasi ‘Burung Surga’ itu sangat sedikit di alam liar. Perburuan terus-menerus serta lunturnya sakralitas Cenderawasih di kalangan masyarakat adat Papua menjadi bagian dari faktor utama keprihatinan banyak pihak terhadap burung Cenderawasih,” ujarnya.

Ancaman terhadap populasi Cendrawasih sebagian besar datang dari kegiatan perburuan liar untuk diperdagangkan. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah peralihan lahan fungsi lahan hutan untuk pertambangan, perkebunan, pemukiman dan pembangunan infrastruktur. Status Cenderawasih di IUCN (International Union For The Conservation of Nature) adalah LC atau Least Concern dan NT atau Near Threatened. LC adalah status untuk spesies dengan risiko rendah menghadapi kepunahan, sedangkan NT adalah status untuk spesies yang hampir terancam punah.

Estimasi Kepadatan Individudan Populasi Cenderawasih

| No. | Nama Spesies | Kepadatan Populasi Total Plot Pengamatan | Estimasi Kepadatan ind/Ha | Estimasi Populasi | Persentas Populasi |
|-----|---|--|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Cenderawasih Merah (<i>Paradisaea rubra</i>) | 42 | 0,66 | 279 | 73.23 % |
| 2 | Cenderawasih Botak (<i>Cicinnurus republica</i>) | 10 | 0,16 | 68 | 17.85 % |
| 3 | Manukodia Kilap (<i>Manucodia ater</i>) | 5 | 0,08 | 34 | 8.92 % |
| | Jumlah | 57 | 0,9 | 381 | 100% |

Talisman menjelaskan, Cenderawasih merupakan jenis burung yang proses perkembangbiakannya terbilang cukup lambat. Betinanya hanya bertelur dua atau tiga butir dalam satu masa kawin, dan kemungkinan hanya terjadi sekali dalam satu tahun. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah bayi burung Cenderawasih yang ditetaskan dan pengambilan secara liar di alam. “Bila perburuan terus dilakukan, maka dapat dipastikan burung ini akan benar-benar punah suatu hari nanti,” kata dia.

Aturan pemanfaatan burung Cenderawasih juga masih berlaku, yaitu hanya terbatas bagi masyarakat lokal untuk hiasan pakaian

adat. Ia menambahkan, kini sudah ada kesadaran masyarakat untuk mengganti hiasan bulu Cenderawasih dengan bulu-bulu imitasi untuk menjaga kelestariannya.

BKSDA Papua Barat menetapkan *site monitoring*, selain melakukan sosialisasi pelestarian hutan dan habitat Cenderawasih, *smart patrol* dan membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai bagian dari cara menjaga populasi burung endemik ini. Ada empat kawasan suaka di kabupaten Raja Ampat yang menjadi fokus perhatian BKSDA Papua Barat, yaitu di kampung Sapokren, Warkesi, Waifofo dan Warimak.

Pengawasan dan pemantauan terhadap peredaran satwa liar juga dilakukan. “Misalkan ada informasi kalau peredaran satwa liar yang lolos lewat pelabuhan laut atau pun lewat bandara, maka kami langsung berkordinasi dengan pelaksana unit kerja yang ada di luar Papua atau daerah tujuan untuk melakukan penangkapan dan dikirim kembali ke Papua,” kata Talisman.

Untuk menjaga hutan dan satwa endemic di wilayah hutan Papua Barat, BKSDA menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM) Flofa dan Fauna Internasional (FFI) dan Conservation International (CI) Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan dan hutan yang berkelanjutan.

Koordinator program FFI, Maurits Kafiari, adalah putra asli Papua. “Jika saya ditanya, apakah setuju dengan penggunaan dan pemanfaatan burung Cenderawasih asli yang diawetkan untuk dijadikan sebagai souvenir, cinderamata, apalagi dijadikan hiasan kepala atau mahkota? Dengan tegas saya katakan “Tidak!. Saya sangat tidak setuju. Kecuali dipergunakan untuk acara adat, itu pun dengan penuh kesadaran akan kelestariannya,” kata Maurits, Jumat, 29 Oktober 2021.

FFI, kata Maurits, juga membuat program untuk menghitung jumlah populasi burung Cenderawasih di habitatnya dengan menggunakan sistem per plot (satu pohon bermain) 500 meter persegi dari satu kelompok atau satu komunal. Berdasarkan hasil identifikasi dan monitoring FFI di dalam kawasan hutan Warkesi

yang seluas 1.200 hektare itu, ditemukan sebanyak delapan plot burung Cenderawasih Merah. Di masing-masing plot terdapat lima ekor pejantan yang mendominasi satu tempat.



Lepas liarkan satwa burung endemik Papua di habitatnya oleh BBKSDA Papua Barat bersama mitra kerjanya di Taman Wisata Alam (TWA) Sorong.

“Setelah kami melakukan identifikasi terhadap delapan plot dari hutan seluas 1.200 hektar di kawasan Warkesi itu, kami hitung-hitung ada sekitar tiga ratusan ekor burung Cenderawasih Merah. Namun secara pasti kami belum bisa membulatkan apakah benar-benar mencapai tiga ratus ekor atau lebih dari tiga ratus ekor,” kata Maurits.

FFI juga melihat ada sejumlah kekhasan dari Cenderawasih Merah. Jenis ini cenderung memanfaatkan punggung atau atas bukit sebagai tempat untuk bermain. “Kecenderungan burung Cenderawasih merah juga tidak bermain di semua jenis pohon. Ada beberapa jenis pohon tertentu yang dijadikannya sebagai tempat untuk pentas,” kata Maurits.

Maurits menyatakan, pembukaan lahan, penebangan pohon secara liar, baik penebangan pohon untuk pekerjaan pembangunan di

sekitar kawasan hutan kota Waisai, menyebabkan degradasi hutan. Praktik itu yang menyebabkan Cenderawasih bergeser jauh dari hutan kawasan kota Waisai.

Salah satu masalah umum lainnya, kata Maurits, adalah jika pohon-pohon tertentu yang dipakai untuk pentas burung Cenderawasih dipotong dan diambil oleh masyarakat. Aktivitas seperti itu menyebabkannya melakukan migrasi mencari tempat bermain yang lebih jauh. Dengan kata lain, pembalakan liar dan penebangan pohon itu secara tidak langsung mengganggu habitatnya.

Salah satu ciri Cenderawasih, kata Maurits, adalah cenderung mendiami satu lokasi. Inilah yang membuatnya rentan. “Burung lain, kalau ada ancaman, bisa terbang ke tempat lain. Kalau burung Cenderawasih tidak bisa. Karena itu paling mudah ditangkap dibanding dengan burung Kakatua atau burung lainnya. Kalau ada orang yang berburu Cenderawasih dan tahu tempat bermainnya, kalau di sana ada 30 ekor, bisa ditangkap semua itu,” ujarnya.

Perburuan Cenderawasih paling banyak terjadi pada 2003 sampai 2017. Harga jual per ekor saat itu berkisar Rp 500 ribu sampai Rp 700 ribu per ekor. Oleh karena itu, perburuan itu harus dihentikan agar burung yang dikenal dengan keindahan bulunya ini tidak punah. “Karena burung yang paling gampang ditangkap adalah burung Cenderawasih bila dibandingkan dengan burung lain,” kata Maurits. Dia menambahkan, masyarakat adat Raja Ampat kini tidak lagi menggunakan burung Cenderawasih sebagai mahkota kepala untuk acara-acara adat atau acara poenyambutan pejabat negara.

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, minta penggunaan Cenderawasih, khususnya Cenderawasih Merah dan Cenderawasih Botak sebagai hiasan mahkota, harus dihentikan. Sebab, itu akan membuka ruang bagi masyarakat atau pihak-pihak lain untuk terus melakukan perburuan terhadap burung yang saat ini dalam status terancam punah tersebut.

Menurut Abdul Faris Umlati, pemerintah masih tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi. Regulasi itu sudah jelas mengatur tentang perlindungan satwa, salah satunya adalah burung Cenderawasih.

“Tentunya kami juga tidak mau esok lusa, anak cucu kita hanya dengar cerita saja tentang burung Cenderawasih. Artinya sudah saatnya kita bersama jaga Cenderawasih. Bukan saja di Raja Ampat, tapi di seluruh tanah Papua dan Papua Barat, Cenderawasih atau burung surga ini harus dijaga dan dilindungi demi anak cucu kita ke depan,” kata Abdul Faris Umlati, Senin, 25 Oktober 2021.



Morens Dawa (depan) mantan pembalak liar di hutan Waigeo. Bersama di menara pemantauan cenderawasih di hutan Warkesi Raja Ampat. Foto Willem Makatita/TN.

Abdul Faris Umlati menyerukan kepada masyarakat turut serta menjaga dan melindungi Cenderawasih. Pemerintah Raja Ampat juga akan mengusulkan soal perlindungan terhadap Cenderawasih ini dituangkan dalam peraturan daerah. Harapannya, aturan itu akan menjadi landasan hukum untuk mengatasi perburuan, perdagangan, dan penggunaannya dalam berbagai kegiatan.

Selain ada regulasi, edukasi terhadap masyarakat juga tetap perlu dilakukan. Alvian Sopuyo adalah salah satu contoh keberhasilannya. Ia yang semula pemburu Cenderawasih, kini sudah beralih menjadi pelindungnya. Alvian bersama teman-temannya di Kelompok Tani Hutan (KTH) Warkesi kini mengelola ekowisata jelajah hutan dan pengamatan burung dan mendapatkan penghasilan dari aktivitasnya ini.

Selain Alvian, yang juga akhirnya berganti profesi 360 derajat adalah Morens Dawa. Pria 34 tahun kelahiran Kampung Waifoi, Distrik Tiplol Mayalabit ini dulunya bekerja sebagai pembalak liar di hutan Waigeo. Ia tidak pernah tahu yang namanya Konservasi. Yang ia tahu hanyalah menebang pohon-pohon besar untuk dijadikan papan dan kemudian kayunya dijual ke penadah atau cukong.

Menurut Morens, ia mulai meninggalkan pekerjaan itu sejak tahun 2017. Dan di awal tahun 2019 kebetulan BKSDA mulai membentuk tim *Smart Patrol*. Ia pun tergerak untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan lamanya, yaitu menebang pohon. Ia juga bergabung dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Warkesi sebagai penjaga hutan sekaligus pemandu aktivitas pengamatan burung Cenderawasih di hutan Warkesi yang dibentuk BKSDA. "Sampai sekarang saya termasuk yang aktif untuk menjaga hutan dari orang-orang yang sebetulnya belum mengerti tentang pentingnya hutan," ujar Maurens, Rabu, 20 Oktober 2021.

Dulunya, kata Morens, dalam sebulan ia bisa menebang 7 sampai 8 pohon untuk dijual. "Bapak kali sendiri sudah. Kalau dalam satu bulan saja saya dan teman-teman saya tebang 8 pohon, dalam setahun ada 12 bulan, artinya 8 pohon dikali 12 bulan. Maka dalam satu tahun kami bisa menebang 96 pohon. Kalau terus menerus, sudah pasti hutan ini akan gundul," kata dia.

Sejak bergabung dengan tim *Smart Patrol*, Morens berkali-kali menangkap pembalok liar di hutan Waigeo. Ia bersama timnya juga pernah menangkap masyarakat yang berburu Cenderawasih secara diam-diam. “Kalau pelaku pembalakan, setelah kita tangkap, mesin pemotong kayu miliknya kita tahan. Sedangkan untuk pemburu liar, kita juga bisa senapan angin miliknya,” ujarnya.

Morens merasakan banyak hal berbeda dari pekerjaan barunya ini, dibandingkan saat menjadi pembalok liar. “Banyak hal positif. Saya bisa kenal dengan orang-orang hebat seperti para pejabat serta wisatawan asing. Kalau dulu masih suka tebang-tebang pohon untuk dijual kayunya, saya merasa tidak nyaman, karena sering dikejar-kejar orang Kehutanan,” kata dia.

Kelompok Tani Hutan Warkesi, kata Morens, saat ini berhasil menemukan 8 titik bermain burung Cenderawasih di hutan Warkesi. “Kalau dulu kita susah sekali lihat Cenderawasih karena dulu orang masih sering berburu Cenderawasih. Tapi kalau sekarang, karena kita sudah jaga habitatnya, justru sekarang kalau mau lihat Cenderawasih, sudah tidak jauh masuk hutan lagi,” ujarnya.

Berdasarkan data FFI, pada Juni 2018 hingga Maret 2019, Warkesi telah menerima kunjungan sebanyak 121 turis. Turis terbanyak dari Eropa, yaitu 38,34 persen. Di urutan selanjutnya adalah turis dari Asia (36,32 persen). Sebanyak 26,23 persen dari dalam negeri. Selebihnya adalah turis dari Australia, Afrika, Amerika, dan Inggris.

Alvian dan kawan-kawannya juga kerap menerima laporan masyarakat soal perburuan liar di sekitar hutan Warkesi. Untuk mempermudah pemantauan, mereka kini membangun menara pemantauan dan beberapa kali melakukan penangkapan orang yang beralasan sedang berburu babi itu. “Sebetulnya mereka yang kami tangkap itu secara diam-diam berburu Cenderawasih,” kata Alvian, yang menjadi ketua Kelompok Tani Hutan Warkesi ini.

Setelah mulai mengenal hutan dan Cenderawasih, Morens mengaku baru mengerti kenapa burung Cenderawasih itu dilindungi oleh undang-undang. Kini ia berharap pemerintah

daerah menjaga kelestarian burung yang dijuluki sebagai “Burung Surga” karena keindahannya itu melalui peraturan daerah.

INFOGRAFIS

Tiga spesies burung Cenderawasih di Cagar Alam Waigeo Barat, Raja Ampat

1. Cenderawasih Merah (*Paradisaea rubra*)

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Aves

Ordo : Passeriformes

Famili : Paradisaeidae

Genus : Paradisaea

Spesies : *Paradisaea rubra*

2. Cenderawasih Botak (*Cicinnurus respublica*)

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Aves

Ordo : Passeriformes

Famili : Paradisaeidae

Genus : *Cicinnurus*

Spesies : *Cicinnurus respublica*

3. Manukodia Kilap (*Manucodia ater*)

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Aves

Ordo : Passeriformes

Famili : Paradisaeidae

Genus : *Manucodia*

Spesies : *Manucodia ater*

Jenis burung Cendrawasih di Pulau Misool-Raja Ampat :

| No. | Famili | Nama Indonesia | Nama Ilmiah |
|-----|---------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Paradisaeidae | Manukodia Lerher-Keriting | Manucodia Chalybatus |
| | | Cendertawasih Mati-Kawat | Seleucidis Melanoleucus |
| | | Cendrawasih Raja | Cicinnurus Rejius |
| | | Cendrawasih Kecil | Paradisaeidae Minor |

Jenis Cendrawasih di Pulau Waigeo-Raja Ampat :

| No. | Famili | Nama Indonesia | Nama Ilmiah |
|-----|---------------|-------------------|----------------------|
| | Paradisaeidae | Cendrawasih Botak | Cicinnurus Republica |
| | | Cendrawasih Merah | Cicinnurus Rubra |
| | | Manukodia Kilap | Manucodia Ater |

Status Burung Cenderwasih di IUCN*
(International Union For The Conservation of Nature)

- *Paradisaea apoda* (Cendrawasih Kuning Besar)-Least Concern
- *Paradisaea minor* (Cendrawasih Kuning Kecil)-Least Concern
- *Lycocorax pyrrhopterus* (Cendrawasih Gagak)-Least Concern
- *Semioptera wallacii* (Bidadari Halmahera)-Least Concern
- *Cicinnurus magnificus* (Cendrawasih Belah Rotan)-Least Concern
- *Pteridophora alberti* (Cendrawasih Panji)-Least Concern
- *Astrapia nigra* (Cendrawasih Astrapia Arfak)-Least Concern
- *Lophorina superba* (Cendrawasih Kerah)-Least Concern
- *Epimachus albertisi* (Cendrawasih Paruh Sabit Hitam)-Least Concern
- *Parotia sefilata* (Cendrawasih Parotia Arfak)-Least Concern
- *Manucodia comrii* (Cendrawasih Manukod Jambul Bergulung)-Least Concern
- *Paradisaea rubra* (Cendrawasih Merah)-Near Threatened
- *Paradigalla carunculata* (Cendrawasih Paradigala Ekor Panjang)-Near Threatened
- *Cicinnurus republica* (Cendrawasih Botak)-Near Threatened

*Karya telah dipublikasikan di teropongnews.com ,
16 November 2021*



Sayied Syeh Boften

Papua Barat Pos

Lahir di Sorong, 02 Mei 1998 dan menyandang predikat sarjana Ilmu Pemerintahan ini bekerja sebagai jurnalis sejak Januari 2009 di Papua Barat Pos. Karirnya berlanjut dengan menduduki posisi asisten redaktur (2010 – 2010), Kepala perwakilan Raja Ampat (2011-2015). Sempat berpindah sebagai redaktur dan pimpinan redaksi di Harian Pagi Papua Selatan Pos di Merauke (2017-2019), kemudian dikembali lagi untuk menjabat sebagai redaktur di Harian Pagi Papua Barat Pos (2019-2020), dan kini menjabat sebagai Pjs. Pimpinan Redaksi Papua Barat Pos.

“Tanah Papua masih memiliki hutan dan laut dengan keanekaragaman satwa dan fauna endemik yang bernilai. Namun, geliat pembangunan dan ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi membuat hutan dan laut dengan satwa dan fauna didalamnya menjadi terancam. Fellowship “Hutan Papua Kunci Mitigasi Perubahan Iklim” menyadarkan Saya sebagai jurnalis betapa pentingnya menjaga hutan dan laut kita untuk menekan ancaman kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan.”

Hilangnya Pesona Tanjung Kasuari

Senin, 15 November 2021



Seorang ayah sedang mendekati kedua anaknya yang berdiri melihat lidah air laut melewati endapan lumpur membentuk burung raksasa sedang mengepakkan kedua sayap di bibir Pantai Tanjung Kasuari. Foto: SAYIED

Sudah hancur kita punya piring makan. Ucapan itu keluar begitu saja dari mulut , Hanafi Warfandu. Apalagi, bila melihat, pengunjung datang, kemudian begitu lihat air laut, pantai, terus balik pulang. Itu makin membuat hati terasa sangat sakit.

Setelah menempuh jalan berombak akibat banyaknya lubang pada cor beton dan aspal sepanjang dua kilometer dengan sepeda motor

matik, akhirnya sampai juga di Lokasi Taman Cinta Alam Lesson 2 Pantai Tanjung Kasuari, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Suasana sejuk dengan pemandangan bui ombak kecil bergulung-gulung di kejauhan memberi suasana nyaman. Taman Cinta Alam Lesson 2 merupakan salah satu dari tujuh lokasi taman wisata yang ada di sepanjang Teluk Yensarwai. Teluk Yensarwai berada di sepanjang kawasan objek wisata Tanjung Kasuari sampai Tanjung Batu Saoka.

Di hari Minggu biasanya lokasi taman wisata ramai dikunjungi warga Kota Sorong.

Tapi, pengunjung yang terlihat tidak seramai hari Minggu setahun atau dua tahun lalu. Di Taman Cinta Alam Lesson 2, waktu saat itu menunjukkan pukul 11.00 WIT. Pengunjung tidaklah begitu ramai. Hanya ada dua kendaraan roda empat dan sekitar 5-6 kendaraan roda dua yang terparkir.

Setelah melaporkan ingin bertemu dengan pengelola Taman Cinta Alam Lesson 2 kepada salah seorang wanita yang hendak menarik biaya masuk, sosok pria yang ingin ditemui pun dipanggil.

Dari kejauhan pria dengan menggunakan sarung dan kaos oblong yang dipanggil berlari-lari kecil menuju rumah berdinding papan warna merah muda tidak jauh dari wanita yang berdiri menagih tiket masuk kawasan wisata tersebut.

Lokasi Taman Cinta Alam Lesson 2, sesuai laporan yang diterima, paling terkena dampak krisis lingkungan bersama dengan 6 Taman rekreasi yakni Pantai Galilea, Nazaret, Alinda Tiberias, Manusela dan Lesson 1. Krisis lingkungan yang dialami oleh ketujuh taman rekreasi tidak diakibatkan pemanasan global, tetapi limbah industri pertambangan batu atau galian C dan rencana reklamasi pantai.

Pengelola Taman Cinta Alam Lesson 2, Hanafi Warfandu pada Februrai 2021 ketika Pandemi Covid-19 sedang memuncak telah membuat pengaduan dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah tambang Galian C.



Hanafi Warfandu, pengelola objek wisata Tanjung Kasuari di Taman Cinta Alam Lesson 2 bercerita pantai yang dikelolanya tak lagi ramai dikunjungi wisatawan karena pencemaran lingkungan. Foto : Sayied/Papubaratpos

Ayah dari delapan orang anak ini, mengelola objek wisata Tanjung Kasuari meneruskan usaha yang dilakukan orangtuanya. Lokasi yang dikelola oleh Hanafi sendiri masih sangat alami, belum ada sentuhan orang profesional. Berbeda dengan beberapa objek wisata lain yang sudah mulai dikelola oleh orang profesional.

Di Lokasi objek wisata milik Hanafi Warfandu ini, mencari pasir putih walau cuma sejengkal saja sudah sulit dicari. Justru timbunan batu krikil lah yang paling banyak menghiasi pesisir pantai. “Kalau hujan lebat dua sampai tiga jam, tidak ada satu pengunjung pun yang mau masuk. Datang, terus mereka lihat, tidak tunggu lama, mereka langsung balik pulang,” tutur Hanafi Warfandu.

Bayangkan saja, bila orang berwisata di pantai bisa sampai terpeleset. Hal itu terjadi karena seluruh lokasi taman yang dikelolanya sudah dipenuhi lumpur. Pernah ada pengunjung sampai harus terpeleset, karena sangat licin. Situasi tersebut diakibatkan, lumpur ” kata Hanafi mengingat kejadian tersebut sambil menyuguhkan kelapa muda.

Dari bibir pantai ke arah laut, kira-kira sekitar 30 meter airnya sudah berwarna coklat. Pesisir sempadan pantai yang dulu terhampar pasir putih hingga ke daratan sudah berubah warna menjadi hitam. Endapan batu kerikil kecil dan besar dilapisi tanah berkumpul membentuk kelompok-kelompok besar dan kecil yang mengering, karena terik mentari disepanjang sepadan pantai. Kemungkinan kelompok tersebut berubah jadi lumpur ketika musim hujan tiba.

Tidak ingin kejadian pengunjung terpeleset, Hanafi bersama dengan istri dan anak-anaknya selalu membersihkan lumpur tersebut menggunakan sekop tangan. "Itu kita lakukan, karena ini kita punya piring makan, kalau bukan kita sendiri yang bersihkan lumpur tersebut, lalu siapa lagi," ujar Hanafi.

Tiga minggu lalu, ketika hujan lebat, Hanafi pernah mengadu, tapi pihak perusahaan hanya datang dan lihat saja. "Dalam hati saya bilang, tidak apa-apa. Yang diatas (Tuhan) tidak buta kok," tutur Hanafi sembari menekankan lambat atau cepat tetap kita akan terus bergerak buat menyelematkan Pantai Taman Wisata ini. "Bukan untuk kita saja, tapi untuk anak dan cucu kita nanti," kata Hanafi dengan mata sedikit berkaca-kaca.

Bila angin utara, keluarganya tidak berani duduk di sempadan pantai atau depan rumah, sebab air laut seperti memuntahkan batu kerikil. Kemudian pohon bakau (Mangrove) tinggal 3-4 pohon saja. Padahal dulunya disitu ada sekitar 30 pohon bakau tempat warga setempat mencari Landak laut (Warga setempat menyebutnya Bia Sarwaki, red) untuk dikonsumsi sebagai pengganti ikan, bila warga tidak melaut. "Kini sudah tidak ada lagi Bia Sarwaki di situ," kata Hanafi sambil menunjukkan telunjuk ke arah pohon bakau.

Pemerintah juga tidak ambil pusing, mungkin saja, karena pihaknya tidak mengikuti anjuran pemerintah. Dimana Pemerintah kota Sorong ingin pihaknya mengenakan tiket masuk sesuai Peraturan Daerah yang menghitung per orang.

"Yang kita lakukan disini, kita tidak hitung per orang, tetapi kendaraan. Satu motor entah dua orang kita kenakan tarif Rp20.000.

Kalau mobil, mau didalam mobil ada delapan orang kita kenakan tarif, Rp 50.000,” tutur Hanafi.

Pertimbangan hingga pihaknya tidak memungut tarif perorang sesuai Perda karena mengikuti keinginan pengunjung. “Kita pernah terapkan itu, tetapi pengunjung menurun. Akhirnya kita terapkan saja, hitungan per kendaraan bukan lagi perorang,” kata Hanafi.

Bicara pendapatan yang bisa diraup, Hanafi menyampaikan turun hampir 80 persen. Setiap akhir pekan dirinya bisa mendapatkan Rp1.000.000 diluar Hari Raya Idul Fitri , Natal dan Tahun Baru. Namun selama tujuh tahun terakhir, sudah sangat minim. “Paling tinggi cuma bisa dapat 400 ribu. Kadang per hari, dapat 100 ribu saja sudah sangat bersyukur,” ungkap bapak yang memiliki delapan orang anak itu.

Hanafi menekankan dirinya bersama istri dan anak selama ini, bergantung hidup dari tiket masuk pengunjung ke objek wisatanya. Kalau ada pengunjung baru kita punya dapur berasap. “Taman wisata ini merupakan sumber pendapatan satu-satunya. Kalau cuaca bagus, kita melaut,” Hanafi menyampaikan.

Ketika pengunjung wisata kurang, warga pergi melaut. Tidak berselang lama sudah balik kembali membawa hasil tangkapan. “Namun sekarang susah buat cari ikan dekat pesisir. Warga harus melaut agak jauh, baru bisa dapat ikan,” tutur Permenas Fakdawer, mantan kepala desa Tanjung Kasuari periode 1975-1995 di kediamannya yang tidak begitu jauh dari lokasi wisata milik Hanafi Warfandu.

Usaha Pariwisata yang dikelola oleh orang asli Papua di Taman Tanjung Kasuari sudah punya nama di Provinsi Papua dan Papua Barat jauh sebelum Raja Ampat maupun Tambrauw terkenal dan mendunia. Sebelum lahir Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua tahun 2001, wilayah Kabupaten Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, dan Kota Sorong masih merupakan kecamatan dari Pemerintahan Kabupaten Sorong.

Waktu itu, Provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi satu

provinsi yakni Provinsi Irian Jaya yang kemudian diubah nama oleh Presiden RI ke tiga, KH Abdurahman Wahid menjadi Provinsi Papua. Ketika itu, Provinsi Irian Jaya hanya memiliki sembilan kabupaten.

Nah, pada masa Gubernur Irian Jaya, Barnabas Suebu periode tahun 1988 sampai 1993, sang gubernur mengizinkan orang Asli Papua untuk menjadi pengusaha. Saat itu, Permenas Fakdawer ikut ambil bagian dengan jenis usaha pengelolaan Taman Wisata Tanjung Kasuari mewakili Kabupaten Sorong.

Hasilnya, cukup mengejutkan. Usaha pengelolaan pariwisata yang dibawa oleh Permenas Fakdawer meraih juara pertama. “Mungkin karena usaha pariwisata yang dikelola orang asli Papua baru saya yang memperkenalkan, sehingga langsung menyabet juara pertama,” kata Permenas Fakdawer.

Sejak itu, Permenas Fakdawer selaku Kepala Desa Tanjung Kasuari dari tahun 1973 sampai 1995 bersama warga setempat mengizinkan Desa Sadar Wisata di Pantai Tanjung Kasuari hingga menjadi primadona bagi warga Sorong Raya.



Permenas Fakdawer, Mantan Kepala Desa Tanjung Kasuari periode 1973-1995. Foto : Sayied/Papuabaratpos

Alamnya yang masih asri dan alami dengan bentangan pasir putih yang begitu panjang selalu mampu mengoda buat anak-anak kecil berlari-lari, membuat istana, dan selimut pasir sambil menunggu ombak laut yang bergulung tidak terlalu besar sangat mendukung buat Tanjung Kasuari menjadi kawasan wisata.

Deretan pohon ketapang pantai dan kelapa yang tumbuh di bibir pantai seakan menjadi payung raksasa yang melindungi pengunjung dari teriknya mentari. Dibawah pohon itulah pengunjung duduk bercengkrama bersama keluarga sambil menikmati bekal yang telah dibawa dari rumah atau membakar ikan.

Setiap akhir pekan atau liburan, Pantai Tanjung Kasuari penuh sesak dengan warga yang ingin berekreasi bersama keluarga. "Sewaktu saya masih kepala desa. Saya bersama warga setempat sering membuat berbagai kegiatan untuk menarik pengunjung," ujar Permenas Fakdawer di kediamannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Permenas Fakdawer menerima laporan, ada pengunjung yang mengeluh usai mandi badan terasa gatal. Ketika musim panas, udara sekitar kawasan wisata menjadi berdebu akibat aktivitas truk muatan material tambang galian C hilir mudik membawa muatan. "Posisi rumah warga yang dekat dengan badan jalan menjadi sasaran empuk debu yang bertebaran," kata Permenas Fakdawer menyampaikan keluhan warga. Seharusnya pihak perusahaan membuat jalan sendiri untuk membawa material tanpa harus melalui pemukiman warga.

Charles Tawaru dari Papua Forests Watch mengaku mendapatkan banyak keluhan dari warga setempat di kawasan Tanjung Kasuari yang terkena Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat dari polusi udara. "Rumah warga dengan badan jalan sangat dekat sekali. Karena memang jalan tersebut ditujukan buat warga atau mereka yang ingin berkunjung ke lokasi taman wisata. Malah digunakan untuk hilir mudik truk perusahaan tambang," aku Charles yang sementara sedang melakukan pendampingan di wilayah Kabupaten Sorong Selatan melalui sambungan telephone selulernya.

Hanafi bersama warga di Tanjung Kasuari tidak sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong sangat mendukung segala upaya yang mereka lakukan untuk memertahankan lingkungannya. Krisis lingkungan yang terjadi di sempadan Pantai Tanjung Kasuari telah diketahui oleh DPRD Kota Sorong. Bahkan Anggota Dewan pernah turun langsung untuk melihat aktivitas penambangan dan kondisi kawasan wisata.

Syafrudin Sabonna, Anggota Komisi II DPRD Kota Sorong, yang juga Ketua Fraksi Amanat Kesejahteraan Bangsa pernah turun langsung ke lokasi obyek wisata dan meminta pemerintah untuk serius melihat kondisi di Tanjung Kasuari baik dari sisi pengelolaan maupun ekosistem lingkungan yang ada di sana.

Aktivitas penambangan galian C yang notabene sangat dibutuhkan untuk pembangunan di wilayah Sorong Raya tentu tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan. “Masyarakat di Pantai Tanjung Kasuari yang mengelola usaha pariwisata secara swadaya sangat bergantung hidupnya dari sektor tersebut. Jika kemudian tidak ada intervensi dari pemerintah, maka pantai Tanjung Kasuari akan rusak total dan berdampak juga bagi perekonomian masyarakat setempat,” ucap Sabonna saat ditemui di Kediannya, Rabu (10/11/2021).

Sebagai wakil rakyat dirinya menyakini, bila pertambangan dilakukan dengan asas-asas pengendalian dan memastikan analisis lingkungan secara baik, maka tidak akan membuat rusaknya ekosistem atau ekologi yang ada di sempadan Pantai Tanjung Kasuari.

Sejauh ini, sebagai Anggota Dewan dirinya melihat orientasi perusahaan tambang yang ada di Kota Sorong baik tambang batu maupun pasir hanya untuk mengejar profit. “Hampir semua perusahaan galian C yang ada di Kota Sorong ini orientasinya hanya kejar profit dan mengabaikan dampak-dampak yang diakibatkan dari aktivitas penambangan terhadap lingkungan hidup,” kata Sabonna.

Hal ini terjadi karena kurang tegasnya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. “Jika kemudian penekanan dalam bentuk sanksi -sanksi bisa diberikan, saya yakin pihak perusahaan galian C akan melakukan langkah-langkah yang konstruktif untuk turut pula memerhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat setempat,” Sabonna memberi penekanan.

Penekanan yang disampaikan Syafrudin Sabonna senada dengan yang dituturkan Charles Tawaru dari Papua Forests Watch. “Di sini peran pemerintah harus lebih optimal untuk memerhatikan soal rencana tata ruang wilayah dan kepatuhan perusahaan galian C terhadap dokumen lingkungan yang telah disepakatinya,” ucap Charles.

Dalam artian, Pemerintah dapat mereviu kembali dokumen Amdal yang dimiliki, sehingga walaupun aktivitas Galian C tetap berjalan, bisa benar-benar memerhatikan dampak lingkungan. “Dinas terkait perlu melakukan review kembali dokumen amdal bersama pihak perusahaan, sehingga perusahaan menjadi tahu apa yang perlu diperbaiki,” tuturnya.



Loury da Costa, Ketua LBH PBHKP Sorong menilai banyak aspek yang dilanggar dalam aktivitas pertambangan Galian C dan Rencana Reklamasi Pantai di sekitar kawasan Pantai Tanjung Kasuari. Foto : Sayied/Papuarbaratpos

Hanafi Warfandu tidak sendiri mempertahankan lingkungan dan usaha warisan orangtuannya. Dalam proses hukumnya, Hanafi Warfandu di dampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong.

Ketua LBH PBHKP Sorong, Lorry da Costa mengatakan, sekitar awal Oktober intensitas hujan di lokasi kawasan wisata Pantai Tanjung Kasuari sangat lebat. Air kemudian mengalir turun dari Lokasi tambang yang berada di dataran tinggi membawa endapan tanah dan sisa tambang. Akibatnya badan jalan menjadi berlumpur hingga sampai daerah taman wisata. "Pihak perusahaan bahkan sampai mengerahkan alat berat guna membersihkan lumpur yang menutupi badan jalan di Kawasan Pantai Tanjung Kasuari," kata Lorry da Costa di Markas PBHKP Sorong.

Dia menilai banyak aspek yang dilanggar oleh aktivitas pertambangan Galian C dan Rencana Reklamasi Pantai di sekitar kawasan Pantai Tanjung Kasuari. Pertama dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan Galian C. Yang kedua, dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

"Karena laut tercemar, sehingga jumlah wisatawan yang mau datang ke mereka punya lokasi pantai menjadi berkurang. Padahal yang saya tahu, mereka (pengelola taman wisata, red) sangat bergantung pendapatan ekonomi keluarga dari kunjungan wisatawan".

Dimana hasil pendapatan kunjungan wisatawan digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak-anaknya dan biaya berobat bila sakit. "Itu dampak-dampak yang bisa dilihat baik dari segi lingkungan maupun ekonomi," tuturnya.

Kemudian limbah dari aktivitas Tambang Galian C dan pembangunan reklamasi pantai di sekitar kawasan wisata diduga telah menimbulkan kerusakan ekosistem dan sedimentasi bahkan masuknya material berupa kerikil ke area perairan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia melalui Lokakarya Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong pada

Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 9 Maret 2021 telah mengeluarkan hasil analisis atas pengaduan dari pengelola taman rekreasi di Pantai Tanjung Kasuari. “Jadi sudah ada hasil audit dari KKP terkait kondisi di sempadan Pantai Tanjung Kasuari,” Loury menegaskan. Dalam hasil analisisnya, KKP menyebutkan aktivitas tambang galian C dan reklamasi telah berpengaruh terhadap kejenuhan perairan dan estetika pantai yang merupakan kawasan wisata pantai, sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi kegiatan wisata yang umumnya dikelola oleh masyarakat lokal.

Lokasi taman wisata mengalami krisis lingkungan. Kata Loury, berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayan (RTRW) Kota Sorong tahun 2014, lokasi ini merupakan lokasi sempadan pantai dan Hutan Produksi Terbatas. Kawasan sempadan Pantai Tanjung Kasuari berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Papua Barat termasuk Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Selat Dampier.

“Lalu dikuatkan lagi dengan hasil verifikasi Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPLH) Kota Sorong,” tutur Loury.

Dinas PPLH Kota Sorong menemukan fakta pasir pantai yang dulunya berwarna putih berubah berwarna hitam karena tercampur dengan batu-batu kerikil dari limbah aktivitas tambang. Kondisi air laut yang dulunya berwarna biru atau bening, sekarang sudah berubah warna menjadi coklat atau kekeruhan akibat tercampur dengan sisa material berupa lumpur dari limbah tambang. Kemudian Bronjong yang di buat untuk menahan material sudah rusak dan terbawa arus ke lokasi taman rekreasi.

Hasil analisis dari KKP dan verifikasi lapangan yang dilakukan Dinas PPLH Kota Sorong sudah sangat jelas. Aktivitas Tambang Galian C dan reklamasi pantai di Kawasan Wisata Tanjung Kasuari jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian Sorong

juga memberikan legal opini terkait aktivitas penambangan Galian C dan reklamasi pantai. Berdasarkan fakta lapangan dan fakta hukum yang diperoleh akibat tambang galian C telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil, UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

“Dengan dasar ini, masyarakat setempat bisa mengajukan gugatan *Class Action* atau bisa juga gugatan *Citizen Lawsuit*. Bisa juga Lembaga Swadaya Masyarakat mengajukan gugatan *Legal Standing*,” papar Loury.

Dijelaskan Loury, gugatan legal standing dapat pemulihan kawasan wisata yang terkena dampak tetapi tidak ada ganti rugi. Berbeda bila dilakukan gugatan *Class Action*. “Kalau gugatan *class action* bisa dilakukan bersamaan antara ganti rugi dan pemulihan,” jelas Loury.

Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu katakan, lingkungan baru akan dibicarakan ketika sudah terjadi bencana. Padahal seharusnya, perencanaan program dilakukan dengan memikirkan pencegahan bencana.

Cara berpikir konsep pembangunan berkelanjutan, seharusnya didasarkan pada wawasan lingkungan. Dengan demikian, bukan hanya berpikir memenuhi target pertumbuhan ekonomi saja.

“Seharusnya kita berpikir hari ini, esok dan buat anak serta cucu, generasi mendatang. Jadi kalau kualitas udara di hari ini baik, maka kualitas udara itulah yang ingin kita wariskan buat anak cucu ke depan. Air yang bersih hari ini, harus kita wariskan,” ujarnya.

“Lingkungan hidup harus ditempatkan sebagai *leading* untuk semua sektor. Mau bikin apa saja silahkan, tetapi pertimbangannya adalah lingkungan. Kalau kita hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi saja, nanti ekologi jadi berantakan. Yang dimaksud dengan

konsep berpikir perencanaan pembangunan berkelanjutan itu, kita mendudukan ekonomi, ekologi dan sosial berimbang,” lanjutnya.

Persoalan dunia saat ini, termasuk di Indonesia akan krisis perubahan iklim akibat pemanasan global terjadi karena cara pandang dulu yang lebih mengejar target pertumbuhan ekonomi. “Kita genjot pertumbuhan ekonomi, kita lupa masalah ekologi dan sosial. Setelah pertumbuhan ekonomi naik yang terjadi kemudian muncul masalah ekologi dan sosial. Sekarang baru kita mulai merasakan setelah beberapa dasawarsa. Masalah yang sekarang kita rasakan perubahan iklim pemanasan global, banjir dan kekeringan akibat cara berpikir pembangunan di 30 sampai 50 tahun yang lalu,” imbuh Kelly Kambu di halaman salah satu hotel di Kota Sorong, Jumat (5/11/2021).

Kelly Kambu juga menyampaikan terkait kondisi di Kawasan Tanjung Kasuari hingga Saoka, sesuai Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sorong memiliki potensi wisata dan punya potensi batuan beku Andesit. Karena itu dalam perencanaan tetap dimasukkan rencana pengelolaan batuan Andesit untuk kebutuhan pembangunan. “Memang dalam ketentuan ada prosedurnya, bisa juga izin pakai pinjam kawasan dalam pengambilan dan pengelolaan material itu. Kita tetap akan evaluasi terus dan melakukan pemantauan, apakah keuntungan dari hasil ini seimbang dengan tingkat kerusakan atau tidak. Kita tetap melakukan pengawasan,” kata dia.

Bila kemudian harus ditutup, menurut Kelly Kambu perlu dipikirkan solusi ke depannya. Belajar dari situasi ketika Galian Pasir di Malanu ditutup, justru menimbulkan masalah baru. “Harga material pasir jadi naik dua kali lipat dari biasanya Rp 500 ribu per-rit sekarang sudah jadi Rp 1 juta per rit. Sama juga dengan di sana kalau kita tutup di Saoka, kita harus berpikir solusi untuk datangkan material pengganti penunjang pembangunan akan didatangkan dari mana,” ucap dia dengan nada tanya.

Apakah nantinya, lanjut dia, material galian C didatangkan dari Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Tambrau, Manokwari atau dari luar Papua. “Ini yang belum ada solusinya, sehingga kita tetap ada

tahapan izin sesuai prosedur dan tetap melakukan pengawasan,” Kelly Kambu menerangkan.

Dinas PPLH Kota Sorong bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH), KKP dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus lakukan pengawasan berkelanjutan untuk menjaga aktivitas yang harus dilakukan para pelaku usaha dalam menjaga lingkungan.

“Kalau dilihat harus di desain ulang saluran drainase dan kolam penampungannya. Itu kerja besar, terencana dan berkelanjutan. Sesuaikan kewenangan pengusaha dan pemerintah. Jadi harus duduk bersama. Pegiat lingkungan hanya bisa memberi rekomendasi. Pada intinya masalah lingkungan sekarang ini tidak hanya bicara saja, tetapi ada tindakan nyata semisal kebijakan penganggaran untuk menopang program pembangunan,” kata Kelly Kambu menekankan.

Lingkungan hidup harus terus di jaga, sebab kita tidak ingin wariskan mata air buat generasi mendatang. “Justru kita harus wariskan mata air buat mereka. Biasa saya sampaikan atau simpulkan, sebaik apapun perencanaan program atau kegiatan yang kita lakukan tanpa memasukkan perencanaan dan pertimbangan lingkungan, maka semua yang kita lakukan akan sia-sia saja, sebab tidak bernilai,” Kelly Kambu menuturkan.

Kota Sorong ini, sesuai kajian Agrarian dan Tata Ruang merupakan kawasan rawan bencana banjir, tanah longsor dan tanah bergerak, gempa disertai tsunami. “Jadi dalam kajian itu, empat bencana alam ini bisa berdiri sendiri-sendiri atau terjadi bersamaan, sehingga ini juga menjadi kewaspadaan,” lanjut Kelly Kambu.

Suku Moi menyebut Kota Sorong dengan sebutan “Kla” yang berarti air. “Beberapa daerah di sini, dinamakan dengan Klamana, Klasaman, dan Klawuyuk. Artinya kalau ingin membangun kota ini, kita harus bangun saluran airnya dengan baik,” imbuh Kelly Kambu.

Memang orang bilang banyak jalan ke Roma, tetapi untuk menurunkan temperatur dan pemanasan global hanya dengan satu cara, tanam pohon. Nanti fungsi pohon itulah yang banyak, bisa untuk penyerapan air, penyerapan karbon dan menyuplai oksigen, sehingga paru-paru kita sehat. (*)

*Karya telah dipublikasikan di papuabaratpos.com,
15 November 2021*



Yosep Erwin Nothan Tupen
Papua Channel TV

Kini berkarir di Papua Channel TV sebagai Pimpinan Redaksi. Mengenal dunia broadcast dan belajar jurnalistik saat masih kuliah dengan aktif di unit kegiatan mahasiswa TV Komunitas (WMtv) di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Setelah lulus, lelaki kelahiran Sorong 19 Maret 1979 ini bergabung dengan TV Lokal CWM Channel Sorong (2010-2014).

Sempat juga membuka usaha bidang multimedia dan menjadi freelance untuk produksi dokumenter dari sejumlah LSM (2014-2017).

Prestasi diraihnya di tahun 2020 dengan keberhasilannya menyabet Juara I Anugerah Jurnalistik Kominfo-RI Kategori Liputan TV dengan judul “Tidak Berharap Bantuan, Sekelompok Mahasiswa di Sorong Justru bagikan masker.”

“Fellowship “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” memberikan pengalaman tersendiri bagi Saya untuk menambah perspektif, dan menyemangati bahkan mengingatkan para jurnalis di Papua bahwa masih banyak hal terkait isu lingkungan yang perlu didorong lewat media, selain memberitakan isu kekerasan seputar separatis dan kamtibmas.”

JUDUL : 56 TAHUN KE DEPAN, PULAU UM
TERANCAM HILANG AKIBAT “ABRASI”
PROGRAM : PAPUA UPDATE PETANG
HARI/TGL : SABTU / 13 NOVEMBER 2021
LINK VIDEO : [https://www.youtube.com/
watch?v=5Vw0IPodzng](https://www.youtube.com/watch?v=5Vw0IPodzng)



LEAD-IN :

PERUBAHAN IKLIM YANG MENYEBABKAN NAIKNYA PERMUKAAN AIR LAUT / MENCIPTAKAN FENOMENA ABRASI DAN AKRESI DI PULAU UM / KAMPUNG MALAUMKARTA / DISTRIK MAKBON / KABUPATEN SORONG PAPUA BARAT // NAMUN / BERDASARKAN KAJIAN LPSPL SORONG / DISIMPULKAN BAHWA TERJADI PENGURANGAN LUAS PULAU / RATA-RATA 725 METER PERSEGI SETIAP TAHUN // OLEH SEBAB ITU / PULAU UM DIPERKIRAKAN AKAN HILANG AKIBAT TERKIKIS ABRASI / PADA 56 TAHUN MENDATANG //

APA YANG AKAN TERJADI APABILA PULAU EKSOTIS INI

TERKIKIS ABRASI // BERIKUT HASIL INVESTIGASI TIM LIPUTAN PAPUA CHANEL //

ROLL-PKG :

SLUG : PULAU UM SAJIKAN Pemandangan Unik

PULAU UM BERADA DI WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KAMPUNG MALAUMKARTA / DISTRIK MAKBON / KABUPATEN SORONG / PAPUA BARAT // PULAU INI BERJARAK SEKITAR 36 KILOMETER / DARI BANDARA DOMINE EDUARD OSOK KOTA SORONG //

UNTUK MENCAPAI PULAU UM / PERJALANAN DAPAT DITEMPUH DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN RODA DUA / MAUPUN RODA EMPAT / DENGAN WAKTU TEMPUH KURANG LEBIH SATU JAM //

SESAMPAINYA DI KAMPUNG MALAUMKARTA / PERJALANAN SELANJUTNYA HANYA DAPAT DITEMPUH DENGAN MENGGUNAKAN PERAHU MOTOR // PERJALANAN LAUT DARI DERMAGA KAMPUNG MALAUMKARTA / HINGGA TIBA DI PULAU UM / MEMBUTUHKAN WAKTU SEKITAR 5 MENIT //

PULAU UM / MENJADI SEBUAH TEMPAT WISATA YANG RAMAI DIKUNJUNGI / BEBERAPA TAHUN BELAKANGAN INI // BUKAN TANPA SEBAB / KARENA Pemandangan Sekitar Pulau yang masih alami / dan keindahan pantai / dengan pasir putih dengan air yang jernih / serta ribuan ekor burung kelelawar / yang bergantung di pohon / pada siang hari / adalah pemandangan eksotis / yang mengundang decak kagum //

SEBALIKNYA / PADA MALAM HARI / PULAU YANG TERLETAK DI TELUK DORE ITU / JUGA MENJADI TEMPAT

BERISITIRAHAT RIBUAN EKOR BURUNG CAMAR / SERTA TEMPAT BERTELUR PENYU / PADA MUSIM TERTENTU / YAITU BULAN FEBRUARI / HINGGA AGUSTUS / SETIAP TAHUN //

SELAIN ITU / PULAU UM JUGA DIHUNI BEBERAPA SATWA LAINNYA SEPERTI BURUNG MALEO BIAWAK / DAN KUPU-KUPU // TUMBUHAN YANG TERDAPAT DI PULAU UM DIDOMINASI POHON-POHON BESAR SEPERTI CEMARA / MERBAU / DAN KETAPANG //

DEMIKIAN JUGA DENGAN PEMANDANGAN BAWAH LAUT YANG MEMILIKI DAYA TARIK TERSENDIRI UNTUK DINIKMATI PENGUNJUNG //



WWC-01 : FREDY (Wisatawan) ----- “ Wilayah ini sangat bagus, makanya bisa jadi alternatif tempat wisata untuk masyarakat Kabupaten Sorong juga dari Kabupaten Tambrau dan sekitarnya. Di Pulau Um sini wilayahnya masih alami karena terisolasi belum semua orang tahu tentang Malaumkarta dan Pulau Um. Jadi mungkin ini juga alternatif untuk akhir libur bisa ke sini. Saya kesini sudah dua kali. Disini daerahnya cukup bersih, lingkungannya juga bagus. terawat dengan baik “.

=====

WWC-02 : TORIANUS KALAMI (Ketua PGM)----- “ Pulau terindah mungkin banyak di Papua tetapi pulau yang unik hanya sedikit. Kenapa saya bilang pulau Um itu unik ? pertama, karena pulaunya kecil, diameternya tidak sampai 1 kilometer tetapi memiliki pantai yang indah dengan pasir putih. Kedua, pulau Um dihuni berbagai satwa seperti burung kelelawar, burung camar, burung Maleo, kupu-kupu, dan biawak. Pulau Um juga menjadi daerah perteluran penyu berbagai jenis. Saya bilang ini pulau terunik, punya kelengkapan satwa yang banyak. ”

=====

=====

WWC-03 : HENRIK SOMBO (Sub-Koordinator Pendayagunaan & Pelestarian LPSPL Sorong) ---- “ Kalau di bagian laut nya sendiri Pulau Um memiliki ekosistem Lamun dan ekosistem karang yang cukup luas sehingga itu menjadi daya tarik tersendiri ”.

=====

=====

SLUG : PULAU UM DULU & SEKARANG

SEJUMLAH POHON BERUKURAN BESAR DIPANTAI SELATAN PULAU / DITEMUKAN TUMBANG / PERTENGAHAN 2020 LALU // TIGA POHON BESAR SERTA SEJUMLAH POHON KECIL LAINNYA / JUGA KEMBALI DITEMUKAN TUMBANG / DI LOKASI YANG SAMA / TAHUN INI //

TUMBANGNYA PEPOHONAN DI PULAU UM DIKETAHUI SUDAH TERJADI SEJAK TAHUN 2000-AN // POHON TUMBANG DIDUGA KUAT / AKIBAT TERKIKIS AIR LAUT / ATAU ABRASI //

DUGAAN INI DIPERKUAT DENGAN KONDISI GEOGRAFIS SEBELAH SELATAN PULAU UM / DIMANA TERDAPAT RONGGA / ANTARA TANAH DAN BIBIR PANTAI // AKAR PEPOHONAN TAMPAK MENGGANTUNG //

DEMIKIAN PULA DENGAN LUAS PANTAI YANG TELAH MENGALAMI PENGURANGAN // MENURUT KETERANGAN SEJUMLAH PENDUDUK ASLI KAMPUNG / KONDISI PANTAI SAAT INI / KETIKA AIR LAUT SURUT / TERLIHAT TIDAK SEPERTI DULU / SEBELUM TAHUN 2000-AN //



=====

=====

WVC-04 : BENYAMIN KALAMI (Pelopor Pendirian Kampung Malaumkarta) ---- “ Dari dulu sejak saya lahir hingga berumur remaja sekitar tahun 1973, pemandangan Pulau Um sangat indah karena pulau ini didiami oleh berbagai hewan unik. Saat itu, Pulau Um sangat luas, dan juga banyak tanaman pepaya yang tumbuh alami, ada juga pohon-pohon besar seperti kayu Besi, Beringin dan Merbau. Pulau Um saat itu sangat luas sekali ”.

=====

=====

WVC-05 : EFRAIM MOBALEN (Mantan Penghuni Pulau Um) -----
 - “Ombak besar naik. Tidak aman lagi. Pohon-pohon rubuh karena tidak ada penahan. Kalau dulu saya lihat ada pasir panjang, pohonnya di darat. Tapi sekarang semakin air pasang, air sampai di dekat pohon di darat. Bandingkan dulu masih bagus. Sekarang sudah kurang”.

=====

=====

SLUG : LUAS PULAU UM BERKURANG SETIAP TAHUN

BERDASARKAN KAJIAN YANG DILAKUKAN LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT / L-P-S-

P-L SORONG / LUAS PULAU UM DI TAHUN 2013 / KURANG LEBIH 4 HEKTAR //

AKIBAT KENAIKAN PERMUKAAN AIR LAUT SETINGGI 4,5 MILI METER / LUAS PULAU UM DIKETAHUI BERKURANG 0,91 HEKTAR / DALAM KURUN WAKTU TAHUN 2009 HINGGA 2013 / AKIBAT ABRASI //

SEBALIKNYA / LUAS PULAU UM JUSTRU BERTAMBAH 0,31 HEKTAR DALAM KURUN WAKTU 2013 HINGGA 2017 / AKIBAT AKRESI //

FENOMENA PERUBAHAN LUAS PULAU TERJADI AKIBAT PERUBAHAN POLA ARUS / DAN KENAIKAN PERMUKAAN AIR LAUT / SEBAGAI DAMPAK DARI PERUBAHAN IKLIM //

MESKI TERDAPAT FENOMENA ABRASI DAN AKRESI / NAMUN DAPAT DISIMPULKAN BAHWA TERJADI PENGURANGAN LUAS PULAU / RATA-RATA 725 METER PERSEGI SETIAP TAHUN //

OLEH SEBAB ITU / PULAU UM DIPERKIRAKAN AKAN HILANG AKIBAT TERKIKIS ABRASI / PADA 56 TAHUN MENDATANG //



=====
=====
WVC-06 : HENRIK SOMBO (Sub-Koordinator Pendayagunaan & Pelestarian LPSPL Sorong)---- "Hasil penelitian Fakultas Teknik Geomatika ITS Surabaya, periode 25 tahun hingga tahun 2018, melalui analisis peta citra alimetri itu terjadi kenaikan muka air laut rata-rata 4,5 milimeter per tahun. Ini penelitian secara umum skala nasional di Indonesia. Kami sempat melakukan kajian selama 8 tahun dari tahun 2009 hingga 2017, menggunakan software Digital Shoreline Analysis System yang dikembangkan oleh NOAA dan memang dari tahun 2009-2013 itu luas pulau Um berkurang 0.91 Hektar. Pada periode tahun 2013 hingga 2017 justru terjadi penambahan luas pulau Um sebesar 0,31 Hektar.

Kami lakukan perhitungan dan kami peroleh sebuah kesimpulan bahwa dalam setiap tahunnya terjadi pengurangan luas Pulau Um sebesar 720 meter persegi per tahun. Sehingga diperkirakan 56 tahun kedepan pulau Um bisa hilang".

=====
=====
SLUG : DAMPAK KERUGIAN JIKA PULAU UM HABIS TERKIKIS ABRASI

SEBAGAI SALAH SATU OBYEK WISATA YANG RAMAI DIKUNJUNGI / TERUTAMA SAAT HARI LIBUR / PULAU UM MENDATANGKAN MANFAATEKONOMI BAGI MASYARAKAT KAMPUNG SEKITAR //

JASA ANGKUTAN PERAHU MOTOR UNTUK PENYEBERANGAN DARI DERMAGA KAMPUNG MALAUM KARTA MENUJU PULAU UM / BERJUMLAH 15 ARMADA // ADA JUGA 10 WARGA KAMPUNG YANG MENJADI PEMANDU WISATA //

JIKA PULAU UM HABIS TERKIKIS ABRASI / MASYARAKAT SEKITAR YANG SELAMA INI MENGGANTUNGAN HIDUP / DARI SEKTOR PARIWISATA DIPASTIKAN KEHILANGAN POTENSI PENDAPATANNYA //

TIDAK HANYA ITU / LETAK PULAU UM YANG BERADA

DI TELUK / MENJADIKANNYA SEBAGAI PENGHADANG
GELOMBANG LAUT / YANG MENGARAH KE PEMUKIMAN
WARGA DI PESISIR MALAUMKARTA RAYA // DENGAN
DEMIKIAN / JIKA PULAU UM HABIS TERKIKIS ABRASI /
MAKA CAKUPAN POTENSI KERUSAKAN AKAN LEBIH
KOMPLEKS / SERTA MENGANGGU STABILITAS EKOSISTEM
SEKITAR //

WILAYAH YANG AKAN TERDAMPAK MENCAKUP 4
KAMPUNG YAITU / SWATUT / SWATOLO / MIBI / DAN
MALAUMKARTA // KE EMPAT KAMPUNG TERSEBUT
BERADA DI WILAYAH PESISIR PANTAI //

=====
=====

WWC-07 : TORIANUS KALAMI (Ketua PGM) ----- “ Kalau untuk
jasa transportasi dan guide maka bisa kita hitung berapa pendapatan
masyarakat dari sektor pariwisata yang akan hilang”.

=====
=====

WWC-08 : HENRIK SOMBO (Sub-Koordinator Pendayagunaan &
Pelestarian LPSPL Sorong) ---- “Dari segi fungsi fisik, pulau Um
yang berada di depan wilayah Malaumkarta Raya itu sangat berperan
mengurangi laju arus dan gelombang yang bisa tiba di pesisir. Dengan
adanya Pulau Um, laju ombak atau gelombang itu bisa diredakan.
Sehingga ancaman terhadap gelombang dan arus itu bisa jadi pelindung.
Yang tidak kalah penting yaitu fungsi Pulau Um sebagai habitat eksotik
ini seperti Kelelawar, burung Camar, Penyu dan lain-lain. Kami fokus
pada biota, jadi jika Pulau Um hilang, maka akan mengganggu ekosistem
seperti habitat penyu dimana pantai Um menjadi pusat peneluran penyu.”

=====
=====

SLUG: UPAYA PENYELAMATAN PULAU UMDARI ANCAMAN
ABRASI

UPAYA PENYELAMATAN PULAU UM / AGAR TIDAK HILANG
DIKIKIS ABRASI / BELUM BANYAK DILAKUKAN / HINGGA
SAAT INI // L-P-S-P-L SORONG SEBAGAI SALAH SATU UNIT

PELAKSANA TEKNIS / DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA / TELAH MELAKUKAN TRANSPLANTASI TERUMBU KARANG / DI SEKITAR PERAIRAN PULAU TERSEBUT //

TRANSPLANTASI MERUPAKAN UPAYA PENYELAMATAN PULAU UM SECARA ALAMI / KARENA KARANG DAPAT MENJADI PEMECAH GELOMBANG DAN PENGHALAU ARUS / GUNA MEMINIMALISIR ABRASI //

PEMBUATAN TALUD MASIH DALAM PENGKAJIAN LEBIH DALAM KARENA SELAIN BERBIAYA TINGGI / JUGA BERPOTENSI MENGANGGU STABILITAS EKOSISTEM DAN HABITAT ALAMI PULAU UM //



=====

=====

WWC-09 : HENRIK SOMBO (Sub-Koordinator Pendayagunaan & Pelestarian LPSPL Sorong) ----- “ Kita hanya bisa melakukan mitigasi dan bisa kita lakukan secara ekologi kita bisa memperbaiki ekosistem terumbu karang. Memang akan cukup besar upaya dan biaya yang dikeluarkan. Kita harus membuat perlindungan alami dengan trasnplantasi terumbu karang yang jadi penghalang arus di Pulau Um. Kalau pembangunan tanggul

butuh kajian yang lebih spesifik karena ini akan berdampak di tempat lain."

=====

=====

WWC-10 : TORIANUS KALAMI (Ketua PGM) -----*"Minimal harus sejajar dengan bibir air paling bawah (pembuatan tanggul). Kita buat tanggul dengan penyesuaian kondisi alam sekitar pulau. Karena upaya penyelamatan pulau juga harus memperhatikan keberlangsungan ekosistem. Ada ekosistem yang terbangun di Pulau Um dengan biota seperti penyu. Dua-duanya harus kita selamatkan."*

=====

=====

SLUG : SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB
MEMPERTAHAKAN KEBERADAAN PULAU UM ?

KEBERLANGSUNGAN PULAU UM MENJADI TANGGUNG JAWAB SEMUA PIHAK / TERUTAMA MASYARAKAT ASLI SETEMPAT /KARENA MEREKALAH YANG MENERIMA MANFAAT LANGSUNG DARI KEBERADAAN PULAU TERSEBUT // UNTUK ITU SEKUMPULAN ANAK-ANAK MUDA SUKU MOI BERINISIATIF MENJADI MOTOR PENGGERAK MASYARAKAT SETEMPAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA UNTUK BERSAMA SAMA MELESTARIKAN PULAU UM DAN KAWASAN SEKITAR // MEREKA TERGABUNG DALAM WADAH PERKUMPULAN GENERASI MUDA MALAUMKARTA ATAU PGM / GUNA MENGABDIKAN DIRI MENJAGA PULAU// SEJAK BERDIRI TAHUN 2017 LALU / BERBAGAI UPAYA SUDAH DILAKUKAN PGM / SEPERTI PEMETAAN WILAYAH ADAT /MONITORING DAN PENANGKARAN PENYU SERTA PENINGKATAN KAPABILITAS SDM KONSERVASI UNTUK SEBUAH CITA-CITA MENJAGA TANAH WARISAN DAN LELUHURNYA / MALAMOI //

=====

=====

WWC-11 : HENRIK SOMBO (Sub-Koordinator Pendayagunaan & Pelestarian LPSP Sorong) *"Wilayah Pulau Um sudah ditetapkan sebagai wilayah konservasi adat di Malaumkarta Raya sehingga kita berharap*

kegiatan yang bersifat memulihkan kondisi ekologi di sana dan kegiatan berpihak pada konservasi biota di sana sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat di sana. Karena masyarakat di sana sudah maju sehingga kegiatan konservasi di sana didukung masyarakat."

=====
=====

WWC-12 : TORIANUS KALAMI (Ketua PGM) ----- "*Pulau Um merupakan salah satu ikon pariwisata kabupaten Sorong, maka konsekuensinya adalah upaya penyelamatan menjadi tanggung jawab bersama. Ada keterlibatan semua pihak, pemerintah dan masyarakat adat yang ada di sekitar Pulau Um."*

END //

Karya telah dipublikasikan di Papua Chanel TV, 13 November 2021



Olha Irianti Mulalinda

Sorongnews.com

Bekerja di media online sorongnews.com lebih banyak menulis straight news di hampir semua desk liputan. Selain itu juga bekerja sebagai stringer foto pada Kantor Berita Antara.

Perempuan yang aktif di organisasi Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sorong ini juga pernah bekerja sebagai kontributor Wartaplust.com, Koran Papua Barat Pos dan Koran Fajar Papua. Kiprah di dunia penulisan dibukukan bersama FJPI dengan judul “Jurnalis Perempuan Menulis Indonesia”.

“Saya jarang menulis isu lingkungan yang mendalam. Dari workshop dan fellowship dengan mentoring ini, Saya banyak belajar cara menggali data dan menulis dengan baik agar pesan penting di karya ini mudah dipahami publik. Mentor sangat sabar membimbing sehingga kendala keterbatasan menuangkan tulisan panjang bisa teratasi. Terima kasih SIEJ dan EcoNusa. Semoga tetap konsisten memberikan edukasi bagi jurnalis di timur Indonesia. Saya pun harus konsisten menulis persoalan lingkungan dikemudian hari. Karya ini untuk Perempuan Papua, Mama Papua, bahwa Hutan adalah Ibu.”

Mama Papua Penjaga Mangrove Kampung Maibo

Kamis, 18 November 2021



Sejumlah Mama Papua menanam bibit mangrove di kampung Maibo. Foto : Oke

Pagi itu, usai sholat subuh Mama Marwah Simurut sudah bersiap-siap memasak. Ia akan membuat masakan Papeda yang akan disuguhkan kepada sejumlah Mama-Mama Papua lainnya di Balai Kampung Maibo Klalin Kabupaten Sorong, Papua Barat, Minggu (31/10/21).

Usai memasak, sejumlah mama-mama satu persatu mulai berdatangan di Balai Kampung. Sebelum makan bersama, Mama Marwah mengatakan bahwa hari ini akan menanam sejumlah bibit

mangrove di dekat kawasan tempat tinggal mereka.

“Seperti biasa, hari ini kita akan menanam Pohon Mangi-mangi (Mangrove). Nanti habis makan langsung turun kebawah (ke lokasi),” ujar Mama Marwah diikuti teriakan siap dari mama-mama lainnya.

Usai menyantap papeda kuah kuning, mama-mama dan sejumlah anak-anak pun ikut menanam bibit mangrove. Mereka satu per satu menanam bibit Mangrove di sejumlah lokasi yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai istri dari Kepala Kampung, keberadaan Marwah sangat penting dalam menggerakkan mama-mama Papua lainnya di kampung tersebut. Selain memiliki kebijakan secara teritorial, Marwah juga lebih banyak mendapatkan informasi terkini dari sang suami.

“Tidak semua mama-mama disini mau bergabung juga. Mereka lebih memilih bekerja membantu suami mencari ikan, mencari Bia (sejenis kerang yang berada di hutan Mangrove), mencari kayu dan batu karang,” ujar istri dari Sudin Simurut ini.

Ia menceritakan bahwa mayoritas penduduk di Kampung Maibo bergantung pada hasil hutan Mangrove seperti mencari kepiting dan Bia Kodok serta menambang batu karang dari sisa tumbangnya pohon Mangrove. Sebagian warga lainnya pun, masih menggantungkan bahan bakar dapur serta untuk penghasilan dari kayu Mangi-Mangi (Mangrove).

“Kayu yang bagus dijual, sedangkan sisanya dibawa pulang untuk bahan bakar dirumah,” ujar Marwah.

Warga kampung yang secara defenitif baru menatap di kampung tersebut pada tahun 2016, perlahan mulai merasakan bahwa pohon Mangi-mangi perlahan mulai berkurang akibat ketergantungan warga pada hutan Mangrove, hingga kawasan ini oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menjadi salah satu kawasan kritis.

“Sekarang, meski masih banyak yang bergantung di hutan, Kami juga turut melestarikan hutan dengan menanam bibit-bibit Mangrove baru di lahan yang sudah rusak,” ujar Marwah.

Dia juga kerap memberikan nasehat kepada anak-anaknya bahwa saat ini Mama sudah menanam Mangi-Mangi yang nanti harus dijaga anak cucu mereka.

“Jangan tebang lagi, nanti kalau besar supaya banyak kepiting dan Bia lagi. Nanti kalau tebang habis, sudah tidak ada sumber makanan lagi buat kalian,” pesan Marwah.

Salah satu mama yang turut menanam Pohon Mangrove, Sakinah Iba mengatakan, setelah para suami pergi ke kota atau bekerja dan mereka usai membuat sarapan pagi, mereka akan melakukan pembibitan pohon Mangrove dan menanam pohon Mangrove.

“Kalau bibit, biasanya tong ambil dari biji Mangrove yang sudah jatuh. Kita tanam di plastik dulu, kalau sudah besar kita tanam. Ada juga yang pesan bibit untuk kegiatan menanam pohon Mangrove,” ujar Sakinah.

Meski tidak dibayar saat menanam Mangrove, Ia merasa memiliki tanggung jawab sebagai seorang Ibu untuk melestarikan kawasan hutan Mangrove tersebut agar anak-anak mereka masih bisa bergantung hidup dari pohon Mangrove.

Mama Papua lainnya, Hanafiah Kawagir dan Sanafiah Kawagir kakak beradik itu mengaku bahwa dikampung mereka juga digilir bantuan sosial menanam pohon Mangrove dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) RI. Sudah dua tahun program berjalan di kampung itu dengan sistem bergilir.

“Tahun lalu ada 30 orang, tahun ini ada 43 orang, nanti digilir, yang tahun lalu sudah dapat, berarti tahun ini diganti yang lain,” ujar Hanafiah.



Salah seorang anak berpose di kawasan kritis yang telah ditanami bibit mangrove di Kampung Maibo, Kabupaten Sorong. Foto : Oke

Setiap hari usai menjala ikan di laut, Ia bersama suami bergegas ke hutan Mangrove Untuk menanam sekitar 100 sampai 150 bibit Mangrove. Sekitar sebulan bercocok tanam bibit Mangrove, ia menerima upah stimulus dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang diterimanya melalui rekening pribadi di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“Saya terima Rp 7,9 juta karena Rp100 ribu untuk saldo di Bank. Saya pakai untuk kehidupan sehari-hari dan membeli jaring buat tambahan suami saat mencari ikan di laut. Ini sangat membantu sekali apalagi saat Corona (Covid-19) seperti sekarang,” terang Hanafiah.

Ia bersyukur dengan adanya program menanam Mangrove sekaligus mendapatkan stimulus dana untuk mereka. Mereka berharap program tersebut dapat berkelanjutan.

Mama-Mama di Kampung Maibo - Klalin kemudian membentuk sebuah kelompok kerja yang diberi nama Kelompok Perempuan

Mikore. Mikore sendiri merupakan singkatan dari nama dua kampung asal masyarakat setempat yaitu Migori dan Korewatara yang berasal dari Kabupaten Sorong Selatan.

Pada kelompok itu, mereka tidak hanya berbicara soal menanam Mangrove tapi juga kegiatan pemberdayaan perempuan lainnya. Seperti pelatihan maupun kegiatan sosialisasi.

“Saat ini kami sangat berharap ada pelatihan cara memanfaatkan Pohon Mangrove. Saya dapat informasi bahwa ada hasil olahan pohon Mangrove yang bisa dijadikan sumber makanan. Saya berharap ini bisa dilakukan untuk kelompok Mikore ini,” harap Sakinah, sekretaris Kelompok Perempuan Mikore.



Makan papeda bersama menjadi salah satu cara komunikasi aktif warga. Foto : Oke

Kepala Kampung Maibo, Sudin Simurut pun turun tangan dalam memberikan edukasi kepada warga Kampung Maibo. Edukasi yang diberikan berupa sosialisasi, seminar kerja sama dengan sejumlah LSM, salah satunya Yayasan EcoNusa dan LSM Lingkungan lainnya yang tergerak membangun kawasan kritis tersebut dengan seminar dan pelatihan. Ia berharap istrinya perempuan juga ikut

terlibat karena perempuan dianggap cukup efektif menggerakkan warga.

“Kalau Mama-Mama yang bergerak ini cepat, anak-anak dan suami tinggal ikut. Saya selalu ingatkan kalau saat ini kita tanam, butuh waktu bertahun-tahun Mangrove tumbuh besar dan kokoh. Jangan sampai anak cucu kita yang terima akibatnya, tidak bisa lagi makan Bia, Kodok atau rumah kita terbawa banjir karena sudah tidak ada lagi Mangi-mangi yang menahan ombak,” ujar Sudin.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX Sorong, Sarteis Sagrim mengatakan ada sekitar 270 hektar kawasan Mangrove yang kritis di wilayah Kampung Maibo. Dimana sudah 100 hektar kawasan yang direhabilitasi dengan ditanam kembali bibit Mangrove dengan melibatkan warga setempat sejak tahun 2020 hingga 2021. Dimana target dari penanaman adalah 3 ribu bibit per hektar sehingga untuk 100 hektar lahan yang sudah ditanam ada sekitar 300 ribu bibit pohon.

Dari 300 ribu bibit pohon yang telah ditanam di kawasan tersebut, ia mengaku ada bibit yang dapat bertahan dan ada yang tumbang karena air pasang atau gagal tumbuh. Dari 100 hektar dan 300 ribu lebih bibit Mangrove yang sudah ditanam menurut Sagrim hanya 5 persen yang gagal tumbuh dan mereka telah menyiapkan petugas pengawasan untuk mengawasi tumbuh kembang bibit Mangrove.

“Ada tim yang secara berkala melakukan pemantauan dan pengawasan pada bibit Mangrove yang telah ditanam, kalau ada yang patah langsung dilaporkan dan akan diganti dengan bibit yang baru,” terang Sagrim.

Ia pun berharap dengan kegiatan penanaman Mangrove baik melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat dan masyarakat umum di sejumlah kegiatan, maupun melalui kelompok yang mendapatkan bantuan stimulan dari BRGM, dapat menjaga semua pohon Mangrove yang telah ditanam.

“Kita sudah menanam Mangrove ini dengan susah payah. Mari kita

jaga Mangrove ini supaya dapat mengembalikan ekosistem dan habitat serta keanekaragaman hayati di kampung Maibo,” harap Sagrim.



Menambang batu karang menjadi salah satu aktivitas warga di Kampung Maibo. Foto : Oke

Sementara itu, sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Ayu Dewi Utami didampingi Kepala Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Remu Ransiki, Giri Suryanta dan Plt. Kepala BBKSDA Papua Barat, Budi Mulyanto pada 22 September lalu menyatakan bahwa Badan Restorasi Gambut dan Mangrove bersama KLHK memiliki tugas melakukan rehabilitasi di 9 provinsi, salah satu diantaranya di Papua Barat.

Kepala Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Remu Ransiki, Giri Suryanta menjelaskan bahwa hutan mangrove di Papua Barat seluas 438.252 hektar. Dimana Daerah yang memiliki hutan mangrove terluas adalah Bintuni dengan luas 225.367 hektar atau 52 persen, kerusakan mangrove mencapai 8.553 hektar. Disusul Kabupaten Manokwari dengan kerusakan sekitar 44 persen dari 1.995 hektar ditambah daerah di bagian Sorong dengan total kerusakan hutan Mangrove mencapai 15 ribu hektar.

“Untuk tahun 2021 kami melaksanakan rehabilitasi total 33 ribu hektar diseluruh Indonesia. Data yang kami dapat, di Papua Barat sekitar 15 ribu hektar lahan kritis,” terang Ayu.

Adapun intervensi dari BRGM selain mendukung bibit Mangrove juga stimulasi dana melalui upah kerja harian warga untuk menanam bibit Mangrove .

Hal ini dilakukan dalam rangka pemulihan nasional dimana dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara ekosistem hutan Mangrove. Bantuan upah kerja juga sebagai stimulan agar dapat menjadi modal bagi mereka yang meninggalkan kebiasaan lama dan beralih mencari mata pencarian baru. Misalnya membuat tambak ikan atau tambak udang dan lain sebagainya,” ujar Ayu.

Program BRGM ini menurut Ayu harus didukung penuh oleh pemerintah daerah dan instansi teknis lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Terutama melibatkan perempuan, mama-mama Papua ini potensial menggerakkan bapak-bapaknya, anak muda untuk “Ayo jangan menebang Pohon Mangrove lagi. Ayo jangan menambang karang lagi. Lebih baik menjala Ikan atau mencari kepiting, udang atau kerang.” Kalau hutannya lebat, habitatnya juga bertambah. Kepiting, udang dan kerang melimpah,” ujar Ayu. (*)

Karya telah dipublikasikan di sorongnews.com, 18 November 2021



John Victor
Tabloid Papua Baru

Bekerja di perusahaan media yang berada di Kota Jayapura, Papua, ini hadir dengan dua versi yakni media cetak tabloid dan portal berita online dengan mengusung motto “Satu Tungku Membangun Papua”.

Media ini hadir untuk menambah referensi informasi yang edukatif, cermat, dan mudah dicerna, dengan bernuansa kebudayaan Tanah Papua.

Nasib Mangrove Kampung Enggros

Kamis, 18 November 2021

Kawasan hutan mangrove di Teluk Youtefa, Kota Jayapura, Papua yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Kampung Enggros, kondisinya kini pelan-pelan mulai terancam. Beberapa studi bahkan menemukan di sejumlah titik kawasan hutan Mangrove Teluk Youtefa terindikasi pencemaran. Ancaman sampah dan alih fungsi lahan untuk pembangunan terus mengerus luasan kawasan hutan ini.



Kawasan mangrove menjadi tempat pembuangan sampah material. Foto:John Victor

JAYAPURA.- Matahari belum terbenam sempurna saat Petronela Merauje, Warga Kampung Enggros, Jayapura, Papua, merapikan tumpukan kayu Mangrove kering. Tangannya terlihat cekatan

mengumpulkan kayu yang berserakan di sekitarnya. Dengan waktu cepat, semua kayu Mangrove kering yang tercecer sudah tersusun rapi.

Petronela adalah satu dari sekian banyak warga Kampung Enggros yang memanfaatkan hutan Mangrove sebagai sumber kehidupan. Saban hari wanita separuh baya ini mencari ikan, kepiting, udang dan kayu kering di sepanjang kawasan mangrove di Teluk Youtefa.

Bagi Petronela, hutan Mangrove di kampungnya itu merupakan dapur bagi masyarakat. Mangrove memberikan kehidupan untuk masyarakat Kampung Enggros dengan menyediakan kebutuhan pangan seperti ikan, kepiting, udang hingga kerang. Keberadaan hutan Mangrove adalah penyelamat kehidupan, mengingat kehidupan sehari-hari masyarakat kampung ini sangat bergantung kepada hutan mangrove.

“Bisa dikatakan hidup kami di sini sangat bergantung pada hutan Mangrove. Banyak sekali pemberian dari hutan Mangrove ini, mulai ikan, kepiting hingga kerang,” ungkap Petronela saat ditemui di Teluk Cyberi, Kamis (4/11) 2021.

Menurut Petronela, kawasan hutan mangrove di kawasan Teluk Youtefa bagi masyarakat di Kampung Enggros, sudah dianggap merupakan kawasan sakral yang dijaga turun temurun. Kawasan ini secara adat tidak boleh dirusak dan nodai. Hutan mangrove di Kampung Enggros ini dinamakan hutan perempuan lantaran banyak perempuan di kampung mencari kerang tanpa busana. Hutan Perempuan adalah nama hutan bakau yang keberadaannya tak bisa dipisahkan dari perempuan Enggros dan Tobati.

Kaum lelaki dilarang mendatangi kawasan ini. Jika ada yang berani datang ke hutan itu ketika ada perempuan di dalamnya, maka ada sanksi adat. Dia harus membayar denda adat berupa manik-manik, barang berharga bagi warga Enggros yang mahal harganya.

“Hutan mangrove ini sesuatu yang sangat sakral. Sudah turun-temurun hutan ini biasanya akan disambut kalau ada laki-laki yang mau dan hingga hari ini kami menjaganya. Perempuan yang masuk

kawasan hutan mangrove itu biasanya langsung dilarang dan tidak bisa sembarang. Batang pohon mangrove di sini pun hanya diizinkan untuk pakai jadi tiang rumah. Itu tradisi sudah dari nenek moyang sampai sekarang, jadi hutan mangrove buat kami sangat penting,"sebutnya.



Petronela Marauje, warga kampung Enggros, Jayapura, Papua. Foto : John Victor

Meski demikian, sepuluh tahun terakhir ini kata Petronela, keberadaan hutan Mangrove di kampung Enggros pelan-pelan terlihat mulai terancam. Kehadiran Jembatan Merah Teluk Youtefa yang diharapkan dapat mendorong ekonomi masyarakat tanpa merusak lingkungan justru berbeda. Ribuan pohon mangrove ditebang hanya untuk mempercepat pembangunan jembatan. Dibeberapa titik kawasan, keberadaan hutan mangrove terlihat sudah mulai hilang.

“Padahal dari kitong (kita) lahir, hutan mangrove ini sudah ada, Tuhan yang kasih. Sekarang justru kita bongkar,”sesal Petronela.

Hutan Mangrove di Kota Jayapura, Papua terletak sepanjang pesisir pantai Hamadi, Kampung Tobati, sekitar Kampung Enggros hingga ke Holtekamp dan di sekitar Tanjung Resyuk menuju mata air Muri. Luas kawasan hutan mangrove di sepanjang pesisir ini mencapai 90,58 hektar.

Sebelumnya, penelitian yang dilakukan Universitas Cenderawasih pada 1967 mengungkap luas hutan bakau di Teluk Youtefa ini mencapai 514,24 hektare. Luas kawasan mangrove berkurang hampir 40% pada 2014, menjadi 259,1 hektar. Lalu pada 2018, luas hutan mangrove hanya tersisa 233,12 hektare. Saat ini menyisakan kurang lebih 90 hektar.

“Saya berani katakan hampir 50 persen hutan mangrove di kampung Enggros tergerus karena dampak pembangunan,” kata Mama Lena begitu biasa disapa.

Ancaman lain kawasan hutan mangrove di Kampung Enggros adalah pencemaran laut dan alih fungsi lahan untuk pemukiman. Letak pasar yang berada di pinggir pantai membuat kawasan hutan mangrove di Teluk Youtefa selalu penuh dengan kiriman sampah. Beberapa biota laut seperti karang dan udang yang kerap menjadi sumber kehidupan masyarakat Kampung Enggros mulai sulit ditemukan.

Hasil kajian Bapedalda Papua pada tahun 2007 lalu, bahkan sudah menemukan limbah cair maupun limbah padat sudah masuk di Teluk Youtefa. Penelitian Janviter Manalu dkk, dari Institut pertanian Bogor pada 2011, juga menyebutkan, perairan di Teluk Youtefa sudah masuk kategori tercemar ringan dan sedang. Untuk itu pemantauan kualitas air perairan Teluk Youtefa perlu dilakukan secara periodik dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah Papua dapat membantu menjaga kelestarian hutan mangrove di sepanjang Teluk Youtefa, karena membiarkan kerusakan kawasan hutan mangrove ini sama halnya membunuh sumber kehidupan masyarakat di Kampung Engros.

“Kami berharap masalah ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah. Apalagi kita pernah sama-sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi melestarikan kawasan ini sebagai tempat wisata,” kata Roy Inggama, warga kampung Enggros.

Menjaga kelestarian hutan mangrove di Teluk Youtefa, dapat dilakukan dengan menghijaukan kembali kawasan hutan

mangrove yang hilang. Penanaman bibit mangrove harus menjadi program yang rutin dilakukan untuk menjaga keseimbangan hutan mangrove. Kebiasaan menanam mangrove secara sporadis sebaiknya mulai ditinggalkan.

“Kalau penanaman mangrove dikontrol dengan baik mungkin hasilnya saat ini sudah tumbuh baik dan banyak. Ini banyak pihak peduli dengan menanam 1000 bibit tapi yang tumbuh hanya 300 pohon. Kenapa begitu, karena kita tidak kontrol,” tutur Roy.



Petronela Marauje, warga kampung Enggros, Jayapura, Papua. Foto : John Victor

Pencemaran Menjadi Ancaman

John D Kalor, Ketua Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Cenderawasih, mengungkapkan dari hasil penelitiannya pada tahun 2018 ditemukan jika di beberapa lokasi di Teluk Youtefa sudah terkonfirmasi terjadi pencemaran dengan kadar ringan hingga sedang. Tampemawa dalam penelitian pada tahun 2020 bahkan mendapatkan logam berat, *plumbum* (Pb) dengan konsentrasi cukup tinggi ada pada beberapa titik di perairan Teluk Youtefa.

Padahal ada banyak jenis mangrove yang tumbuh di kawasan tersebut seperti dari genus *Sonneratia* yaitu *Sonneratia ovata* dan *S. alba*, Genus *Rhizophora* yaitu *R. mucronata*, *R. apiculata* dan *R. stylosa*. Genus *Avicennia* yaitu *avicennia alba*, Genus *Xylocarpus* yaitu *Xylocarpus granatum* dan genus *Bruguiera* yaitu *Bruguiera gymnorhiza* dan *B. cylindrica*.

Tingkat kerapatan pohon mangrove di kawasan Teluk Youtefa ini bahkan diketahui memiliki tingkatan yang berbeda-beda setiap wilayah. Kerapatan mangrove di wilayah Enggros misalnya mencapai sekitar 1455,6 pohon per hektar, wilayah Nafri 1477,8 pohon per hektar dan wilayah Tobati 1033.5 pohon per hektar.

“Untuk status kesehatan ekosistem mangrove sendiri berdasarkan tingkat kepadatan vegetasi masih tergolong sedang dan baik. Namun di beberapa titik memang sudah ditemukan pencemaran dengan kategori rendah,”kata Kalor.

Dari hasil penelitian, pencemaran di Teluk Youtefa berdampak pada keseimbangan ekologis beberapa biota laut dan sangat mengancam kelangsungan berbagai jenis ikan dan biota perairan lainnya. Beberapa jenis kepiting yang biasa diketahui melimpah pelan-pelan sudah mulai menurun. Penelitian Wanimbo dkk pada tahun 2016 menyebutkan populasi Kerang *Polymesoda erosa* di kawasan ini bahkan mulai terancam dan menurun.

Tingkat keanekaragaman dan kelimpahan ikan pada perairan ekosistem mangrove di Teluk Youtefa juga mengalami penurunan. Semua itu disebabkan adanya kerusakan ekosistem, konversi ekosistem, dan pencemaran yang terjadi pada ekosistem mangrove. “Penelitian ini hanya menemukan 12 spesies dan 10 famili ikan, dengan kelimpahan 188 individu/hektar yang hidup dan berasosiasi dengan perairan ekosistem mangrove Teluk Youtefa Kota Jayapura,” ujar Kalor.

“Untuk memulihkan sumber daya perikanan ini hanya bisa dilakukan dengan pemulihan ekosistem mangrove dengan cara meningkatkan luas area ekosistem mangrove dan pengendalian sampah.”



Menjadi Benteng Tsunami

Andre Liem, aktivis lingkungan di Jayapura, Papua mengatakan kawasan hutan mangrove di Teluk Youtefa sesungguhnya merupakan *buffer zone* yang sangat penting dalam melindungi area tersebut dari dampak negatif terutama ancaman dari bencana Tsunami, Apalagi sejarah mencatat, bencana Tsunami pernah beberapa kali menerjang pesisir Jayapura yaitu tahun 1952, 1960, 1970, 1998, dan terakhir terjadi tahun 2011. Gelombang sampai masuk hingga Teluk Youtefa. Sedikitnya 20 rumah hancur di Desa Holtekamp, Enggros, dan Tobati akibat Tsunami yang dipicu oleh gempa besar dengan kekuatan 8,9 SR yang terjadi di Jepang pada tanggal 11 Maret 2011.

“Beruntung di beberapa titik kawasan mangrove memperkecil kekuatan gelombang. Jadi tidak berdampak besar. Jadi saat ini kita memang sudah harus mulai berfikir bagaimana menanam kembali Mangrove di Cyberi, Mendug, hingga pesisir pantai Holtekamp. Ini penting karena berhubungan dengan kelangsungan hidup warga kampung,”kata Andre.

Beberapa studi terkait mangrove di Teluk Youtefa mencatat,

ekosistem mangrove di kawasan tersebut merupakan benteng alami yang sangat kokoh terhadap gempuran gelombang dan juga tsunami. Ekologi mangrove di kawasan ini berfungsi sebagai pelindung alami. Karenanya, penanaman kembali mangrove pada kawasan yang kosong menjadi penting dilakukan. Upaya penanaman mangrove yang dilakukan oleh banyak pihak secara sporadis dan tanpa pengawasan sudah mulai diubah. Selama ini tak sedikit bibit mangrove yang ditanam secara sporadis tidak tumbuh secara sempurna.

“Melibatkan pemilik hak ulayat dalam menanam kembali mangrove adalah langkah yang baik dan bisa menjadi semacam proteksi, sehingga tanaman mangrove bisa tumbuh secara baik. Apalagi rata-rata kawasan yang ada di sepanjang Holtekamp sudah dikelola pihak ketiga, dan tidak ada perhatian dari pemerintah,” ujar Andre sembari mengungkapkan kehadiran Jembatan Youtefa sesungguhnya bukanlah solusi, mengingat pembangunannya justru merusak kawasan hutan mangrove.

Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yan Richard Pugu, S.Hut, M.Si menuturkan bahwa berbicara tentang menjaga hutan mangrove, berarti harus ada upaya agar masyarakat dalam menjaga kawasan hutan mangrove juga mendapat manfaat. “Dalam 3 tahun terakhir di kawasan mangrove di Teluk Youtefa, itu ada sarana namanya tracking wisata dalam kawasan mangrove di dekat Hanyaan Entrop, sebelum di tahun 2016 itu sudah dibangun juga tracking mangrove di kawasan yang bersebelahan dengan hutan perempuan,” tuturnya.

Selain berwisata, ujar Yan Pugu, masyarakat juga mendapat kenyamanan dalam melihat hutan mangrove yang terdiri dari berbagai jenis saat berkunjung.

“Harapan kita, ada aktivitas ekonomi, seperti jualan makanan dan minuman untuk pengunjung, artinya kita berharap pengunjung datang, masyarakat juga mendapat manfaat dari wisata hutan mangrove itu,” ujarnya.

Menyoal pencemaran lingkungan, Yan Pugu kembali membeberkan

bahwa pihaknya bersama dengan salah satu komunitas yakni Rumah Bakau selalu rutin melakukan pembersihan, seperti di muara sungai Hanyaan, yang sering menjadi tempat pembuangan sampah.

“Kita sudah menggandeng komunitas-komunitas masyarakat seperti Rumah Bakau itu untuk kegiatan pembersihan tetapi juga kedepan jika ada pencemaran, otomatis salah satu bidang di Dinas Kehutanan dan LH Provinsi Papua, yakni Bidang Penanggulangan Pencemaran melakukan pengecekan ke lapangan. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu untuk ditangani, seperti ambang batas kualitas air disana pasti kami akan cek,” bebernya.

Terkait tidak adanya solusi selain keberadaan jembatan Hamadi Holtekamp, Yan Pugu kembali menegaskan bahwa secara teknis perizinan dan lainnya sudah dipikirkan, sehingga jembatan tersebut bisa dibangun.

“Kalau ditanya tidak ada solusi, saya pikir ini memang bagian dari konsekuensi pembangunan, tetapi kita juga melakukan rehabilitasi di sepanjang jembatan merah (jembatan Hamadi Holtekamp) bagian kanan, beberapa waktu lalu, setempat bersama ibu-ibu dari Kementerian Pertahanan dan Persit, kita lakukan kegiatan untuk menahan abrasi, tentu dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura,” tegasnya.

Dalam rehabilitasi, pihaknya juga bersinergi dengan masyarakat pemilik hak ulayat, sehingga ada pemberdayaan dimana selalu melibatkan kelompok tani hutan yang sudah dibentuk oleh masyarakat untuk melakukan rehabilitasi.

“Kita punya kelompok-kelompok masyarakat yang membantu, misalnya untuk membantu polisi hutan (polhut), kami punya masyarakat mitra polhut yang selalu bersinergi dengan kami,” pungkasnya.

***Karya telah dipublikasikan di Tabloid Papua Barut,
18 November 2021***



Nees Nicolas Makuba
Parapatv.Id

Lulus dan menyandang predikat sarjana di Universitas Muhammadiyah Jayapura ini mengawali karir jurnalistik ketika mendirikan Radio Komunitas Yoka FM di Kampung Yoka bersama sebuah LSM di Papua.

Kemudian berkarir secara profesional sebagai jurnalis TV lokal CWM Chanel Sorong, RRI Sorong, koresponden Tabloid Jubi.com dan Koran Jubi, Teropong News Sorong. Kini, sosok yang akrab disapa Nesta, berkiprah di Parapatv.id, media yang diinisiasinya bersama sejumlah jurnalis senior.

“Saya senang berkesempatan mengikuti Fellowship dari SIEJ dan EcoNusa. Harapannya, kegiatan seperti ini terus diadakan dan melibatkan banyak stakeholder untuk mengawal isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, khususnya di Papua. Kami mendapat banyak ilmu dari awal workshop hingga menjadi sebuah karya jurnalistik, dari berdiskusi dengan para pembicara dan mentor yang luar biasa. Terima kasih.”

Raibnya Khayouw dan Kahebey dari Danau Sentani Akibat Rusaknya Habitat Asli

Rabu, 17 November 2021



Tresia Suebu, salah satu nelayan perempuan tengah sibuk menarik jaring untuk menjala ikan di Danau Sentani Papua. Foto: Ness Makuba

Jayapura - Revan Pallo, 29 tahun, sehari-harinya bekerja menyumpit ikan di Danau Sentani, Jayapura, Papua. Dalam bahasa lokal Sentani namanya “molo ikan” atau “Khafela.” Ia menekuni aktivitasnya ini sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Pada waktu itu, sekitar tahun 2007-2008, ia mengaku sangat mudah untuk mendapatkan ikan asli seperti *Khayouw* (Gabus kecil), *Kahebey* (Gabus besar) dan *Khandey* (gete-gete).

“Bahkan di bawah kolong rumah saya, kalau molo siang atau malam, pasti dapat banyak ikan asli,” katanya, 7 November 2021.

Danau Sentani kini tak seperti dulu lagi. Revan merasa dalam beberapa tahun belakangan ini makin sulit untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak, khususnya ikan-ikan asli Danau Sentani. Kalau lagi beruntung, kata Revan, dia bisa mendapatkan satu hingga dua tali gabus. Sisanya adalah ikan Lohan dan Mujair. Harga satu tali gabus Rp 300 ribu, Mujair Rp 100 ribu. Sedangkan harga ikan Lohan per tumpuk seharga Rp 50 ribu.

Revan mengaku tak tahu persis kapan persisnya ikan-ikan asli itu seperti menghilang dari danau. “Sejak tahun 2014 sampai saat ini, mau dapat ikan asli itu kita susah sekali. Kalau molo pagi dan siang, paling cuma dapat delapan ekor ikan Gabus,” tuturnya.

Keluhan senada juga disampaikan Tresia Suebu, yang bekerja sebagai nelayan di Danau Sentani. Menurut dia, ikan asli dari danau kini sudah jarang bisa didapatkan. “Kalau kita pasang jaring, sekarang paling banyak kita dapat ikan Lohan atau Mujair saja,” kata ibu dari lima anak ini, pada 10 November 2021. Namun, ia mengaku sesekali masih mendapatkan ikan gabus tapi jumlahnya sangat sedikit.

Danau Sentani, yang luasnya 9.360 hektare dan berada di ketinggian 7 mil di atas permukaan laut, merupakan salah satu sumber utama penghidupan bagi masyarakat sekitarnya. Suku yang mendiami danau ini terbagi dalam 3 bagian besar, yakni Sentani Barat (Waibhu), Sentani Tengah (Nolobhu) dan Sentani Timur (Rallibhu).

Terdapat 30 kampung yang berada di kawasan Danau Sentani. Umumnya mereka bermukim di pesisir danau dan menggantungkan kehidupannya dengan mencari ikan. Ada yang melakukannya dengan teknik menjaring atau memancing. Namun ada juga warga sekitar yang memilih tak ke danau, tapi berkebun.

Ada 21 buah pulau kecil di area Danau Sentani. Di area danau itu terdapat sekitar 30 spesies ikan air tawar dan empat di antaranya merupakan endemik, yaitu Gabus Danau Sentani (*Oxyeleotris*

heterodon), Pelangi Sentani (*Chilatherina sentaniensis*), Pelangi Merah (*Glossolepis incisus*) dan Hiu Gergaji (*Pristis microdon*).

Danau Sentani membentang dari timur ke barat. Sisi timur berada di Kota Jayapura, sisi barat di Kabupaten Jayapura. Sisi lain danau ini berada di pelataran kaki Gunung Cyclops. Selain menjadi sumber ekonomi melalui perikanan, airnya juga digunakan untuk konsumsi warga sehari-hari.



Salah satu nelayan saat mengambil ikan dari jaring penangkap di Danau Sentani, Papua. Foto: Nees Makuba.

Namun Danau Sentani kini tak seperti dulu lagi. Revan mengatakan, berkurangnya ikan asli itu akibat adanya predator baru yang sengaja di lepaskan dan dikembangkanbiakan di Danau Sentani, seperti Ikan Lohan dan ikan Mujair serta Gastor (Gabus Toraja). Faktor lainnya adalah hilangnya tempat-tempat persembunyian ikan asli danau seperti Hului (Rumput Laut) dan Neli (Ganga Danau sentani).

Tresia Suebu sependapat dengan Revan bahwa berkurangnya ikan asli itu akibat perkembangan ikan baru. Namun dia juga menilai ada faktor lain. "Adanya pergeseran moral dari penduduk

Danau Sentani yang sengaja merusak tempat-tempat berkembang biak ikan endemik Sentani dengan cara-cara kasar, yakni menebang hutan sagu, penimbunan dan banyaknya sampah akibat limbah masyarakat yang masuk ke dalam danau sehingga terjadinya pendangkalan dan rusaknya kualitas air,” kata dia.

Akuatik Ekologis Departemen Biologi Universitas Cenderawasih, Jayapura Dr.rer.nat. Henderite L. Ohee yang akrab di sama Henni Ohee ini mengatakan, dari sejumlah penelitian, bisa diidentifikasi ada sejumlah hal yang menyebabkan biota endemik asli Danau Sentani hampir punah. Faktornya antara lain adalah rusaknya habitat asli, menurunnya kualitas habitat, dan masuknya ikan-ikan asing. “Ketiga masalah besar yang menyebabkan jenis-jenis masalah ini, baik ikan, kemudian kerang, siput dan udang mulai hilang atau akan hilang dari Danau Sentani,” katanya saat ditemui, 8 November 2021.

Perubahan kualitas habitat itu, kata Henderite L. Ohee ditunjukkan dengan perubahan sepanjang tepian pantai danau akibat pembuatan tempat-tempat hiburan seperti restoran, kafe, pembangunan jembatan, dan pembangunan jalan. Aktivitas ini menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan di sepanjang bibir Danau Sentani. Apalagi ini menyasar tempat-tempat resapan air seperti hutan sagu yang menjadi habitat favorit bagi biota-biota endemik Danau Sentani.

Henni Ohee juga menjelaskan, menurunnya kualitas air Danau Sentani setelah terjadinya penumpukan sampah di bibir muaramuara sungai yang mengalir ke danau, “Sampah-sampah tersebut terbawa oleh air hujan ke Danau Sentani hingga mengakibatkan pendangkalan,” kata dia.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah masuknya ikan asing yang sengaja maupun tidak sengaja dilepaskan ke dalam danau. Henni menilai, masuknya ikan itu mengancam spesies-spesies asli danau. “Karena ikan-ikan asing mempunyai sifat di antaranya adalah mereka cepat berkembang biak sehingga populasinya tinggi dan mengalahkan jenis-jenis biota asli,” kata dia.

Mulai menghilangnya ikan asli danau ini berdampak terhadap adat. Heni mengingat bahwa pada acara-acara adat di Keondoafian Sentani (Ondofolo), ikan Gabus jenis Kahebey menjadi identitas dan wibawa seorang Ondofolo. Ikan Gabus itu hidangan spesial yang diletakkan di dalam baki tanah (hote) dan disajikan di meja makan oleh seorang pesuruh (abuakho) di rumah Ondofolo .

Henderite L. Ohee mengaku pernah menanyakan kepada salah satu tokoh adat di Ayapo alasan selalu meletakkan Kahebey di dalam hote. “Itu tugasnya Abuakho taruh jadi orang akan datang dan tahu bahwa ini meja Ondofolo (Ondoafi) tempat makan. Nah ikan Gabus tidak mungkin diganti oleh ikan Mujair atau Lohan. Itu satu contoh kecil,” tuturnya.

“Saya khawatir hal-hal seperti ini akan mempengaruhi tata budaya orang Sentani,” imbuhnya.

Corry Ohee, salah satu sesupuh Keondoafian Asei Besar menjelaskan, ikan Gabus selalu disajikan saat prosesi adat atau acara besar keondoafian. “Menjadi kebesaran atau kebanggaan bagi ondofolo/ondoafi saat bisa menyuguhi ikan Kahebey dalam sungguhan hidangan atau makanan yang disajikan kepada tamu,” kata Ohee, 11 November 2021.

Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakonias Maitindom mengatakan, sudah ada wacana membuat Peraturan Daerah tentang pengelolaan Danau Sentani dan area Gunung Cycloop. “Kalau ingin menyelesaikan persoalan di Danau Sentani, maka Cagar Alam Cycloop harus lebih dulu diperhatikan,” kata Maitindom, 8 November 2021.

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua akan melakukan kordinasi dengan akademisi dari Universitas Cenderawasih. “Sejauh mana kajian akademis yang dilakukan terkait dengan hilangnya biota-biota atau spesies ikan asli Danau Sentani dan ada kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab,” lanjut Yakonias Maitindom.

Direktur Yayasan Lingkungan Hidup (YALI) Papua, Deni Yomaki mengatakan, Danau Sentani memiliki beragam ikan-ikan lokal yang tidak kita temukan di wilayah lain. Dia mendesak pemerintah untuk terbuka kepada masyarakat tentang pengembangbiakan ikan-ikan asing yang didatangkan dari luar.

“Dengan demikian masyarakat akan melihat pemerintah jujur dalam melihat persoalan kelangkaan ikan lokal di Danau Sentani, lalu bersama-sama masyarakat menggunakan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Sentani sejak nenek moyang, bisa bersama mengembangkan pola-pola untuk membudidayakan ikan ini kembali,” kata Deni Yomaki, 10 November 2021.

Di masa lalu ikan Gabus bisa dikembangbiakkan tidak harus dalam karamba jaring, tetapi bisa dengan bahan alam seperti daun kelapa, daun sagu dan pelepah sagu. “Oleh karena itu kearifan lokal perikanan perlu dikawinkan dengan pengetahuan perikanan oleh Dinas Perikanan,” kata Deni Yomaki. Ia ingin agar kasus ini ditangani serius dan dicari solusinya agar generasi berikutnya masih bisa mengenali ikan-ikan asli ini dan bisa menjadi sumber ekonomi.

Karya telah dipublikasikan di paraparatv.id, 17 November 2021



Musa Abubar

Tribun Papua

Sebelum bekerja sebagai editor di Tribun Papua pada Februari 2021, karir jurnalistik terbilang cukup panjang. Diantaranya sebagai fotografer di Kantor Berita AFP Perancis (2009), kontributor Tempo SEMENAL, Timor Leste (2010), Timor Pos, Timor Leste, editor Laporan SKPKC Fransiskan Papua, di Jayapura, Tabloid Jubi (2007–2013), kontributor Mongabay.co.id (2012) dan kontributor LKBN ANTARA (2013-2020)

Meski sudah cukup lama berkiprah di dunia jurnalistik, fellowship ini merupakan fellowship pertamanya.

“Ternyata banyak hal baru yang didapat. Jurnalis di Papua lebih banyak menulis straight news. Saya berharap kegiatan serupa diadakan tiap tahun agar jurnalis di Papua dapat mengasah keterampilan dalam peliputan dan penulisan karya jurnalistik, khususnya liputan mendalam untuk menghasilkan karya berbobot, detail dengan data lengkap.”

Menjaga Gerabah Kampung Abar

Jumat, 19 November 2021



Hasil gerabah buah tangan Barbalina Ebalkoi

JAYAPURA - Sekelompok remaja terlihat sibuk mengatur tumpukan tanah liat pada sebuah lapang ukuran 5x6 meter. Tangan mereka terlihat cekatan memainkan adonan tanah liat pada peralatan perubahan gerabah. Sesekali mereka bersendau gurau sambil menyanyikan lagu daerah Papua.

Mereka adalah Siswa Menengah Atas yang belajar membuat kerajinan gerabah di Kampung Abar, Santani, Jayapura Papua.

Saban akhir pekan, kelompok remaja ini rutin menekuni cara membuat gerabah.

Kampung Abar sendiri hingga kini masih menjadi perkampungan di tepi Danau Sentani, Kabupaten Jayapura yang mempertahankan kerajinan gerabah. Orang dewasa hingga anak-anak muda di kampung itu mahir membuat gerabah berbahan tanah liat dengan berbagai bentuk.

Danau Sentani membatasi kampung ini dengan ibu kota kabupaten. Satu-satunya transportasi ke kampung ini menggunakan *speedboat* dari Pantai Yahim, Sentani dengan jarak tempuh sekitar 25 menit perjalanan mengarungi Danau Sentani.

Biaya pulang pergi satu orang penumpang Rp 20 ribu. Kampung Abar, Distrik Ebungfauw, masuk salah satu kampung di wilayah Sentani Tengah. Kampung itu terletak di bawah kaki gunung, jumlah penduduk yang menetap disitu sebanyak 286 orang.

Warga membangun rumah panggung di atas kulit air Danau. Rata-rata rumah yang dibangun beratap seng dan berdinding papan hasil gergaji mesin sensor, lainnya berdinding *gaba-gaba* dari pelepah pohon sagu, beralaskan papan.

Masyarakat yang berdomisili disitu ramah menerima orang luar yang datang. Komunikasi dengan menggunakan *handphone* di Abar lancar, ada juga jaringan internet tapi tak selancar komunikasi menggunakan gawai, tersendat-sendat alias jaringan internet lambat.

Warisan Moyang Marga Felle

Abar merupakan kampung yang unik. Gerabah dari kampung Abar umumnya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan peralatan masak maupun wadah penyimpanan makanan bagi masyarakat di wilayah Sentani dan sekitarnya.

Kepala Suku Abar, Naftali Felle mengatakan munculnya kerajinan gerabah di Kampung Abar dimulai oleh marga Felle dari Suku

Assouw. Kerajinan gerabah tersebut diperkenalkan oleh nenek moyang marga Felle yang bermigrasi dari Pasifik, dengan berlayar hingga tiba di wilayah Papua.



Yemima Ebalkoi, salah satu warga kampung Abar menunjukkan caramengambil tanah liat untuk dijadikan gerabah. Foto: Musa Abubar

Mereka datang dengan membawa tanah liat yang diikat dalam wadah dari pelepah nibung. Ketika bermigrasi, nenek moyang marga Felle tersebut tiba di kampung Kayu Batu di wilayah Teluk Humboldt, Kota Jayapura, dan mereka tinggal di tempat tersebut untuk beberapa waktu dan selanjutnya melakukan perjalanan ke arah Danau Sentani.

Tanah liat yang dibawa dari Pasifik tersebut, ada sebagian yang terjatuh di wilayah Kayu Batu, hal ini mungkin yang membuat masyarakat yang tinggal di kampung Kayu Batu juga membuat gerabah.

Perjalanan jauh dari kampung Kayu Batu hingga tiba di kawasan Danau Sentani, yaitu di Kampung Yobe, dan mereka tinggal di tempat tersebut sampai beberapa generasi, namun karena ada masalah di Dusun Kelapa akhirnya mereka pun berpindah lagi, dan tiba di Kampung Atamali.



Barbalina Ebalkoi, warga di Kampung Abar membuat gerabah berukuran kecil. Foto : MUsa Abubar

Di Kampung Atamali, mereka diterima dengan baik dan diberi tempat tinggal oleh suku setempat. Nenek moyang marga Felle pun tinggal bersama di Kampung Atamali untuk beberapa waktu, dan ketika itu juga tanah liat yang mereka bawa dari timur dikembalikan ke alam di wilayah kampung yang sekarang disebut kampung tua atau Kampung Ebale, dan mereka juga tinggal di wilayah tersebut serta membuat kerajinan gerabah.

Selanjutnya nenek moyang suku Felle membuka kampung baru ke arah selatan yaitu di tempat Kampung Abar sekarang ini. Di Kampung Abar, marga Felle terus membuat kerajinan gerabah. Kerajinan ini awalnya dibuat hanya oleh laki-laki di dalam ruang tertutup dan tidak boleh ada orang yang melihatnya.

Pembuatan gerabah ini dibuat secara sembunyi-sembunyi dan pembakaran dilakukan pada saat malam hari karena ada aturan yang harus ditaati, dan jika aturan tersebut dilanggar maka gerabah yang dihasilkan tidak baik, yaitu pecah dan hancur.

Seiring perjalanan waktu dan pembauran masyarakat suku-suku

di Kampung Abar, kerajinan gerabah pun beralih dikerjakan oleh kaum perempuan dan kaum laki-laki juga kadang membantu.

Pelestarian Gerabah Abar

Pembuatan kerajinan ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, namun tetap mengikuti aturan-aturan adat yang berlaku, dan pembuat kerajinan tersebut tidak lagi hanya dilakukan oleh marga Felle, tetapi oleh semua suku yang ada di Kampung Abar demi kebersamaan dan persekutuan antarsuku.

Dalam aturan adat disebutkan dalam kegiatan mengambil bahan tanah liat atau dalam membuat gerabah tidak boleh dilakukan oleh para perempuan yang sedang datang bulan atau juga dalam keadaan hamil. Ini bertujuan untuk menjaga kemurnian tanah liat, dan jika ada yang melanggar aturan tersebut maka gerabah yang dihasilkan akan hancur.



Beatrikz Felle menunjukkan cara membakar gerabah yang dibuatnya. Proses pembakaran ini agar gerabah menjadi kuat. Foto : Musa Abubar

Yemima Eballoi salah satu warga Abar mengatakan hingga kini tanah liat yang diambil oleh masyarakat untuk membuat gerabah

agak jauh dari kampung, jaraknya sekitar 500 meter lantaran tanah di sekitar kampung, tidak cocok untuk pembuatan gerabah.

Rata-rata masyarakat Abar mengambil tanah liat untuk membuat gerabah dari pinggir bukit dengan menggunakan besi linggis untuk mencungkil dan wadah karung untuk mengisi. Karung yang digunakan berbagai ukuran. Tanah liat yang diambil tak sembarang harus dipilih. Warga taat terhadap tata cara pengambilan tanah liat.

Ketaatan itu menjadikan kerajinan gerabah di Kampung Abar masih diminati penduduk sekitar dan menjadi sovenir. Barbalina Ebalkoi salah satu pengrajin sekaligus pengajar gerabah di Abar mengatakan hingga kini masih tekun mempertahankan kerajinan membuat gerabah/sempe setelah diajari ibu kandungnya.

“Saya belajar buat gerabah ini secara otodidak dari mama saya sewaktu masih muda,”kata orang tua dari delapan cucu ini.

Dari belajar otodidak, perempuan 9 bersaudara itu mengumpulkan ibu-ibu dan anak-anak muda di kampung itu lalu mengajari mereka membuat gerabah. Alhasil, seluruh ibu rumah tangga dan anak-anak muda mahir membuat gerabah. Sempat ada kelompok pembuatan gerabah yang dibentuk.

Namun, karena masalah keuangan dan lainnya, kelompok itu bubar. Hingga kini pengrajin gerabah Abar masih mengupayakan koperasi atau semacam tempat untuk memasarkan gerabah. Meski begitu, mereka tetap tekun membuat gerabah dalam rumah untuk dijual jika ada yang datang ke kampung untuk mencari.

Perempuan Kelahiran,10 Agustus 1952 itu menyebut anak-anak sekolah disitu mahir membuat gerabah hanya saja tidak fokus lantaran sekolah.

Data dari komunitas gerabah bimbingan Barbalina Ebalkoi hingga kini siswa SMP asal Kampung Abar yang mahir membuat gerabah sekitar 15 orang, Sekolah Dasar sebanyak 20 orang, selanjutnya Sekolah Menengah Atas sekira 10 orang.

Pada momentum Pekan Olahraga Nasional XX Papua, mama Barbalina menyiapkan 22 gerabah/sempe untuk dijual di Stadion Lukas Enembe. Namun, kurang diminati.

Kala itu, Barbalina menjual gerabah untuk masak ikan atau biasa disebut belanga tanah Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu. Lalu gerabah berukuran kecil mirip vas bunga, tiga buah seharga Rp100 ribu. Gerabah berukuran sedang dengan dilalut anyaman rotan di bagian bawahnya, biasa disebut roda dihargai Rp 200 ribu.

Untuk gerabah berbentuk baki dua buah masing-masing dijual dengan harga Rp 100 ribu. Dari 22 gerabah yang dijual hanya dua gerabah yang laku yakni gerabah berbentuk baki. Sementara Pekan Paralimpik Nasional XVI Papua, tidak diberikan kesempatan mempromosikan gerabah.

Meski kreativitas gerabah unik dan menarik di Abar namun belum ada tempat untuk dipasarkan. Beatrikz Felle pengrajin gerabah lainnya menyebut hingga kini ia masih tekun membuat gerabah namun tak dijual lantaran tak ada tempat di ibu kota kabupaten.

“Sampai sekarang sisah 22 gerabah berbagai bentuk yang saya simpan di dalam rumah, saya mau jual tapi tidak ada tempat. Banyak yang saya buat tapi orang beli sampai tinggal itu. Biasanya kalau orang butuh gerabah mereka datang ke kampung untuk beli,”katanya.

Kepala Kampung Abar, Yonas Doyapo menyebut hingga kini tak ada alokasi dana khusus untuk pembinaan dan pengembangan kerajinan gerabah di Abar.

“Harus ada proposal yang memuat tentang pengembangan gerabah diajukan ke pemerintah kampung lalu ke pemerintah kabupaten, agar ada dana khusus untuk pengembangan kreativitas gerabah,” ujar Yonas Doyapo.

Ada dana untuk pembangunan kampung seperti pembangunan rumah dan jalan, tapi tak ada untuk pengembangan kerajinan gerabah. Meski demikian, pemerintah kampung masih berupaya

mencari tempat untuk warga memasarkan gerabah di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura.

Pemerintah Kampung Abar masih terus membangun komunikasi dengan sejumlah instansi terkait di kabupaten itu, di antaranya Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Jayapura serta Dinas Pariwisata kabupaten itu. Komunikasi yang dibangun terkait tempat untuk memasarkan kerajinan gerabah khas Kampung Abar tapi juga promosinya. Jalinan komunikasi yang sama juga sudah dilakukan dengan bupati kabupaten setempat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi menyebut, pemerintah kabupaten setempat sudah pernah mengarahkan masyarakat Abar terkait pembuatan gerabah hingga penjualannya. “Waktu itu kita lakukan pelatihan dan bilang kamu bikin gerabah berukuran kecil untuk perabot rumah dan vas bunga sehingga bisa dibagi ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tapi tidak pernah dikerjakan,” kata Hana.

Hana pernah mengarahkan masyarakat Abar agar membuat gerabah yang bagus, menarik dan unik agar tak mudah pecah saat dibakar.

Untuk pengembangan, kepala kampung diminta mengalokasikan sebagian dana kampung untuk pengelolaan kerajinan ini.

Masyarakat disarankan membuat sovenir gerabah beragam bentuk lalu dijual di Bandar Udara Theys Hiyo Eluay Sentani agar menarik dan bisa dibeli. Jika gerabah yang dibuat besar, maka susah dibawa dan tak bisa dibeli.

“Kalau masyarakat buat tempat taruh pulpen, tempat minum dari tanah liat, dan sovenir lainnya lalu dijual di Bandara Sentani dengan harga murah maka akan laris manis, dan itu harus diproduksi setiap hari,” katanya.

Warga Abar sudah diajari untuk menjual gerabah dengan harga murah melalui daring / online, dengan demikian mereka bisa menjual gerabah dari rumah karena kini zaman digital.

Pemerintah kabupaten Jayapura telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Papua untuk mendorong benda-benda budaya, kreativitas masyarakat kampung termasuk gerabah agar dilindungi oleh negara.

Perlindungan ini bisa secara nasional dan dunia, seperti noken yang sudah masuk warisan budaya dunia, diharapkan gerabah juga demikian. Bisa punya hak intelektual dan dilindungi oleh negara.

Asal Usul dan Arti Gerabah

Peneliti dari Balai Arkeologi Papua Hari Suroto menjelaskan istilah gerabah dalam dunia arkeologi sudah sangat terkenal. Namun, orang awam pun mengenalnya dari sisi yang lain.

Berbagai benda juga dihasilkan oleh para pengrajin, seperti gentong, bejana atau pasu, pot bunga, mangkok, cobek, kendi, dan sebagainya. Seringnya diadakan pameran pun menandakan benda ini cukup populer di mata masyarakat.

Istilah gerabah biasanya untuk menunjukkan barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat. Selain dengan sebutan di atas, ada pula sebagian orang menyebutnya dengan tembikar dan sebagian lagi menyebutnya keramik lokal, untuk membedakannya dari istilah keramik asing.

Gerabah dibuat dari jenis tanah liat yang dicampur. Campuran yang digunakan terdiri dari tanah liat, pasir dan batu gamping yang dihaluskan. Suhu pembakarannya antara 350-1000 derajat celsius. Warna gerabah tidak bening, berpori, dan bersifat menyerap air.

Diduga gerabah pertama kali dikenal pada masa neolitik (kira-kira 10 ribu tahun SM), di daratan Eropa dan mungkin pula sekitar akhir masa paleolitik (kira-kira 25 ribu tahun SM) di daerah Timur Dekat. Menurut para ahli kebudayaan, gerabah merupakan kebudayaan yang universal (menyeluruh).

Ini berarti gerabah ditemukan di mana-mana, hampir di seluruh bagian dunia. Perkembangannya bahkan juga penemuannya

muncul secara individual di tiap daerah tanpa harus selalu dipengaruhi oleh budaya yang datang dari luar. Mungkin juga masing-masing bangsa menemukan sistem sendiri.

*Karya telah dipublikasikan di Tribun-Papua.com,
19 November 2021*



Putri Nurjannah Kurita
Papua Unik

Selain bekerja sebagai jurnalis di Papua Unik, perempuan kelahiran Jayapura, 20 Juni 1992 ini juga aktif sebagai sukarelawan di Teknologi Informasi dan Komunikasi Papua (R-TIK), Rumah Belajar Papua dan sekretaris di Yayasan Hano Wene Indonesia.

Lulusan Teknik Informatika dari STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura ini pernah belajar di Sekolah Advokasi Perempuan Papua yang diselenggarakan LBH Papua.

“Ini pengalaman pertama mengikuti fellowship isu lingkungan. Banyak tantangan saat mengganti outline sesuai tema, tapi tidak menyerah karena mentor membimbing dan memperbaiki sampai akhir pengerjaan tulisan hingga siap dipublikasikan. Saat liputan harus naik perahu kecil bersama kelompok pembersih danau dan seorang ibu yang memegang kemudi lincih menyeimbangkan perahu agar tidak terbalik. Fellowship ini juga menggerakkan Saya untuk mendalami liputan lingkungan.”

Semoga kedepannya ada kegiatan serupa untuk membantu meningkatkan kualitas jurnalis di Papua dalam menulis isu lingkungan yang berdampak untuk masyarakat sehingga mereka dapat ikut serta menjaga lingkungan di Papua. Terima kasih SIEJ dan EcoNusa.”

Gerakan Menjaga Ibu dari Kampung Yoka

Jumat, 19 November 2021



Mama Gerda Okoka (kiri) bersama Mama-mama dari Kampung Yoka saat bersihkan Danau Sentani

Ivone Ohodo, warga Kampung Yoka, Kabupaten Jayapura, sehari-harinya adalah nelayan yang mencari ikan di Danau Sentani, Papua. Pagi hari biasanya ia mendayung perahu ke tengah danau untuk memasang jaring. Setelah itu ia akan kembali ke rumah dan kembali mengecek jaringnya di siang hari. Terkadang ia melepas jaring saat malam hari dan memeriksa hasilnya di pagi hari.

Ikan hasil tangkapan Ivone itu dikumpulkan di keramba selama dua hari sebelum dijual. Ia menjual hasil tangkapannya itu di dermaga

atau di pondok di depan rumahnya. Ikan yang didapatkannya adalah mujair. Dalam dua hari, dia bisa menjual lima ekor ikan ukuran sedang dengan harga Rp 150 ribu. Hasil penjualan itulah yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu suami membiayai pendidikan anaknya.

Salah satu pemandangan yang sangat mengganggu Ivone adalah kondisi danau yang sangat kotor. Dulunya danau ini bersih sehingga airnya bisa dikonsumsi. Kini danau terluas di Papua itu banyak sampahnya, baik yang berasal dari rumah tangga hingga tanaman enceng gondok. "Saya harus selalu memantau jaring, karena kadang bukan ikan yang terjaring, tapi sampah," kata dia, 25 Oktober 2021 lalu.

Ivone menambahkan, orang-orang yang datang dari Kampung Ayapo hendak masuk di dermaga di Yoka juga mengalami kesulitan karena sampah eceng gondok yang pertumbuhannya sangat pesat itu. Ia tak ingat persis sejak kapan tanaman enceng gondok ini bisa seperti merajai Danau Sentani.

Gerda Okoka, warga Kampung Yoka lainnya, juga tiap hari menjaring ikan di danau. Perempuan 55 tahun ini menjadi ibu sekaligus bapak bagi 5 anak setelah sang suami meninggal 2011 lalu. Ikan hasil tangkapannya, Lohan, ia jual di depan rumahnya dalam keadaan sudah digoreng. Satu piring harganya Rp 20 ribu. Kalau campuran ikan Lohan dan Mujair harganya Rp 50 ribu. Selain ikan, dia juga menjual pinang.

Seperti halnya Ivone, Gerda merisaukan soal kondisi Danau Sentani. Ia mengingat bahwa sekitar tahun 1980an, lingkungan danau masih bersih. "Saya menggunakan air danau untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum dan mandi. Tetapi setelah jumlah penduduk bertambah dan banyak orang membuang sampah dan limbah ke danau, saya tidak lagi menggunakan air danau," katanya, 25 Oktober 2021.

Kerisauan soal kondisi danau yang dipenuhi sampah inilah yang mendorong Ivone dan suaminya mengusulkan kepada Kepala Pemerintah Kampung (KPK) Yoka saat itu, Antonius Mebri, untuk

melakukan kegiatan pembersihan danau. Ide ini disambut baik. Pada tahun 2017, dibentuklah Kelompok Pembersih Danau. Ivone Ohodo ditetapkan menjadi ketuanya, Gerda Okoka salah satu dari 12 anggotanya.



Danau Sentani terletak di bawah lereng Pegunungan Cagar Alam Cyclops dengan luasan sekira 9.360 hektar, terbentang melintasi Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Sedangkan Kampung Yoka berada di ujung Timur Kabupaten Jayapura dan sebelah barat Kota Jayapura. Kampung ini dibentuk pada 2 Januari 1956. Bagi masyarakat asli Yoka, daerah ini dikenal dengan nama adatnya, Hebheibhulu.

Dalam Bahasa Sentani, kata “Yo” berarti kampung dan “ka” berarti ikan. Secara sederhana “Yoka” dimaknai sebagai kampung ikan. Pada tahun 2017, populasinya tercatat 2.900 jiwa dengan mata pencaharian yang cukup beragam. Data Balai Kampung Hebheibhulu menyebutkan bahwa ada 92 orang bekerja sebagai nelayan, 164 orang bertani, 157 orang pegawai negeri sipil (PNS), dan 36 orang anggota TNI/Polri.

Kampung Yoka mudah didatangi karena letaknya di tepi danau sebelah timur Kabupaten Jayapura. Sebelumnya kampung ini masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Jayapura. Setelah pemekaran wilayah tahun 1993, ia menjadi bagian dari Pemerintahan Kota Jayapura, meskipun secara kultur ia menjadi satu kesatuan dengan masyarakat adat wilayah Sentani Barat, Sentani Tengah dan Sentani Timur.

Kampung Yoka dibelah dua jalur sebagai jalan utama. Warga menyebutnya jalur atas dan jalur bawah. Di Jalur atas terdapat Sekolah Dasar (SD) Inpres Yoka Pantai, SMP Negeri 7 Jayapura, lapangan bola dan sebuah gereja tua yang dibangun sejak 1956, GKI Ebenhaizer. Singkatnya, jalur atas itu menjadi tempat infrastruktur publik milik kampung.

Sedangkan jalur bawah merupakan pusat pemukiman warga kampung yang terletak di bibir danau. Ujung gereja terhubung dengan rumah-rumah warga. Namun di ujung jalan ada sebuah fasilitas kesehatan publik yang bernaung di bawah gereja kristen injil di Tanah Papua, yaitu Klinik “Walihole”, sebuah pusat layanan kesehatan yang khusus menangani pasien yang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

Menurut peneliti dari Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih Dra. Henderita Ohee, Msc, sampah adalah salah satu masalah utama di Danau Sentani saat ini. Kebanyakan sampah ini berasal dari aktivitas penduduk di darat. “Danau Sentani ini seperti ‘tempat sampah besar’. Begitu banyak orang yang membuang sampah langsung ke badan-badan sungai atau ke lingkungan daratan yang kemudian terbawa ke danau melalui sungai atau terbawa air pada saat hujan,” katanya, 8 November 2021.

Penduduk kampung di tengah Danau Sentani pernah mengeluhkan bahwa mereka telah berusaha menjaga daerahnya tetap bersih, tetapi mereka menerima banyak sampah dari pinggiran Danau Sentani. Ia memberi contoh Kampung Ayapo. “Ibu dan anak-anak mengeluhkan bahwa sampah yang berasal dari Waena saat musim angin timur terbawa ke kampung mereka. Kampung mereka

menerima imbas dari sampah dari masyarakat yang tinggal di danau Sentani,” kata Henderita.

Henderita mengatakan, pada 5 Juni 2021, ia membuat aksi bersih lingkungan di Waena dan di Yahim. Ini adalah dua tempat yang merupakan alur sungai yang membawa sampah dari aktivitas penduduk di Pasar Sentani dan aktivitas penduduk sepanjang sungai Kampwolker sampai ke danau. “Sampah terbanyak adalah plastik kemasan makanan, botol mineral, dan semacamnya,” kata dia. Total sampah yang bisa dikumpulkan saat itu lebih dari 700 kg di Waena. Selain plastik, juga ada sampah kain, pakaian bekas, helm dan mesin cuci.

Di kampung Yoka, kata Henderita, aktivitas penduduk di darat yang kemudian menghasilkan sampah dan terbawa ke danau. Ada juga warga yang langsung membuangnya ke danau. Sehingga banyak sampah yang ditemukan di sepanjang tepian danau, khususnya di Yoka yang banyak tumbuhan air. Sebagian sampah inilah yang pada saat angin timur dan ada gelombang terbawa ke tengah danau dan sampai ke kampung terdekat mereka, Ayapo.

Banyaknya sampah di Danau Sentani ini berdampak terhadap kehidupan warga Sentani, termasuk Yoka. Kata Henderita, masyarakat sekitar Sentani tak lagi bisa memanfaatkan danau untuk mandi, mencuci, dan mereka mencari nafkah seperti dulu. Warga juga mengeluhkan berubahnya kondisi danau menyebabkan mereka sulit mendapatkan jenis-jenis ikan asli danau seperti ikan Gabus. Ikan yang banyak didapatkan adalah Lohan, ikan nilem, yang bukan ikan asli danau.

Henderita menambahkan, warga kini masih memanfaatkan air danau untuk kebutuhan sehari-hari meski tak sama lagi seperti sebelumnya. “Kalau mencuci, memang mereka masih lakukan hingga sekarang. Tetapi sekarang masyarakat sudah tidak pakai itu untuk minum, mereka lebih banyak menggunakan air galon atau isi ulang. Ada beberapa yang tetap menggunakan air danau untuk minum,” tambahnya.



Ivone Ohodo menceritakan, untuk kebutuhan sehari-hari, ia dan keluarganya tidak lagi menggunakan air danau. “Kami menggunakan air sumur bor dan air isi ulang untuk minum dan masak,” kata dia. Dampak lain dari banyak sampah di danau adalah mengganggu transportasi. Orang-orang yang datang dari kampung sebelah sulit masuk dermaga Yoka karena banyak eceng gondok. Saat ia pulang menjaring pun kesulitan memasukkan perahu ke rumah karena eceng gondok yang sangat rimbun.

Tidak bisa dipastikan sejak kapan persisnya Danau Sentani bisa seperti saat ini. Henderita mengisahkan, saat ia menulis skripsi pada tahun 1995, sudah ada sampah tapi tidak separah saat ini. “Saya rasakan sampah mulai banyak ketika saya memulai penelitian disertai saya di tahun 2009. Sampah sudah banyak sekali. Sebagian masyarakat membuang sampah ke sungai dari kepala air di Kampwolker,” ujarnya.

Soal banyaknya eceng gondok, kata Henderita, juga berdampak terhadap transportasi warga di danau. Namun yang juga penting adalah efek lainnya, yaitu mengurangi kandungan oksigen terlarut di dalam air. Eceng Gondok ketika sudah menutupi daerah danau

tertentu, air dibawahnya itu akan “miskin” oksigen. Akibatnya, itu bisa menyebabkan kematian biota biota atau bertahan dengan pindah tempat.

“Jika kita sebelumnya biasa temukan ikan Pelangi (*Chilatherina sentaniensis*), itu sudah jarang sekali kita temui karena ikan ini membutuhkan air yang bersih, berbeda dengan ikan-ikan introduksi seperti ikan Nilem dan ikan Lohan yang mana ikan ini dapat bertahan. Sedangkan ikan-ikan asli berpindah ke tempat-tempat yang lebih bersih seperti kondisi sebelumnya,” kata Henderita.

Sebagai peneliti, Henderita khawatir suatu saat danau tidak akan bisa lagi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat. Menghilangnya species-species asli danau seperti ikan, kerang dan siput ini sudah terjadi. Dari tiga jenis endemik di danau, tersisa dua jenis, dari tujuh jenis ikan asli danau, tersisa enam jenis. “Jika kita tidak mengubah cara kita membuang sampah sembarangan, hal itu (kepunahan) bisa saja terjadi,” ujarnya.

Bukan hanya soal sampah yang mengancam Danau Sentani, tetapi juga “penggundulan” di hutan di sekitar danau. Menurut Henderita, pematangan pohon menyebabkan pendangkalan di banyak tepian danau. Perubahan di tepian danau itu dipicu antara lain oleh pembangunan restoran, jembatan, dan semacamnya. Ini yang menyebabkan Danau Sentani lebih dangkal.

Kepala Kampung Yoka, Antonius Mebri mengatakan, umumnya aktivitas masyarakat di Kampung Yoka adalah berkebun atau menjadi nelayan. Namun warga umumnya punya penghargaan tinggi terhadap danau. “Danau adalah ibu bagi orang Sentani, khususnya Kampung Yoka. Danau memberikan segala yang dibutuhkan oleh masyarakat di kampung, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti, makan dan minum, ikan yang dapat dijual,” kata dia, 28 Oktober 2021. “Seandainya danau rusak, berarti kita telah melukai seorang ibu.”

Menurut Antonius Mebri, belum ada satu sistem penanggulangan sampah yang dapat mencegah limbah ini masuk ke danau. Akibatnya, ribuan ton sampah, mulai dari plastik, kotoran binatang

atau ternak, masuk ke danau Sentani. Saat ada warga yang mengusulkan kegiatan pembersihan danau pada tahun 2017, ia pun menyetujuinya dengan membentuk Kelompok Pembersih Danau

Pembersihan danau oleh tim beranggotakan 12 warga itu dilakukan 3 kali dalam seminggu, yaitu Selasa, Rabu, dan Jumat. Mereka dalam sehari bekerja selama 4 jam, yaitu dari pukul 8 - 11. Anggota tim pembersihan ini, kata Antonius Mebri, digaji Rp 2 juta perbulan. Sedangkan ikan hasil menjaring saat membersihkan danau, dapat dijual ke pasar atau dikonsumsi sendiri oleh anggota Kelompok Pembersih Danau itu.

Ada ritual rutin tertentu bagi anggota Kelompok Pembersih Danau sebelum beraksi. PapuaUnik membuat janji dengan warga yang tergabung dalam kelompok ini, pada 9 November lalu. “Mari anak. Mama dorang su tunggu dari tadi,” kata pria paruh baya saat menyambut di depan rumah. Di dalam sudah ada beberapa perempuan paruh baya yang berkumpul. Yang lainnya sibuk menyiapkan sarapan pagi. “Anak mau makan pinang atau minum teh,” tanya seorang ibu.



Mama Ivone Ohodo saat membersihkan eceng gondok di tepian Danau Sentani

Berbeda dari rumah di jalur atas yang dibangun di bawah kaki gunung, rumah-rumah di jalur bawah umumnya rumah panggung yang dibangun di atas permukaan danau. Rumah-rumah itu bagian depannya menghadap ke daratan, bagian belakang menjorok ke arah danau. Kampung ini diapit gunung dan Danau Sentani.

Nampak dari tengah danau ada lima perahu yang datang. Setelah meletakkan perahu di bawah kolong rumah, mereka bergabung. Hari itu adalah jadwal bekerja. Seperti biasanya mereka berkumpul di rumah ketua kelompok pembersih danau untuk sekedar makan dan minum, bercerita atau mendengar arahan dari ketua kelompok.

Sebelum bekerja, sekertaris desa mengunjungi mereka. Setelah kepala kampung turun jabatan dan sekertaris menjabat sebagai pejabat sementara selama 4 bulan. Bulan April tahun depan rencananya akan diadakan Pemilu Kampung. Akan ada 14 kampung di Kota Jayapura yang akan melakukan pemilihan kepala kampung pada 2022. Ibu-ibu itu duduk dan mendengarkan arahan dari pejabat kampung terkait pekerjaan dan nasib mereka jika pergantian kepala kampung nanti tahun depan.

Tepat pukul 08.00, ibu-ibu sudah siap ke tengah danau. Satu-persatu “khai” (perahu) mulai menyebar. Mereka mendayung dan menyisiri pinggiran danau, mengangkat Eceng Gondok dan sampah lainnya. Eceng Gondok diangkat seperti menimbang bayi diayunan, naik-turun agar airnya berkurang, lalu dilemparkan ke dalam perahu. Di dalam sudah perahu ada piring dan spons yang akan dipakai untuk menguras airnya.

Ibu-ibu itu tampak bersemangat mengangkat sampah. Berdiri, lalu duduk lagi, sambil mengangkat sampah-sampah dengan “tangan kosong”. Jika perahu sudah penuh, mereka mendayung ke daratan untuk menaruh sampah, kemudian kembali lagi. Perahu yang digunakan merupakan fasilitas dari kepala kampung. “Kami mendapat perahu, jaring, sarung tangan, topi, dan baju. Sarung tangan hanya dapat bertahan beberapa hari saja, setelah itu rusak namun tidak pernah diberikan yang baru lagi,” kata Ivone.

Bau menyengat muncul dari balik Eceng Gondok. Tampak ikan

yang sudah mati mengambang di atas permukaan air. “Ini sudah biasa,” ujar Hermina, perempuan berusia 45 tahun, yang berusaha berdiri dan menyeimbangkan perahunya. Rambut keritingnya disisir rapi. Dia memakai baju pembersih danau berwarna abu-abu yang tampak tua. Baju itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh kepala kampung enam tahun lalu.

Saat jam menunjukkan pukul 10.00, matahari seakan ada di atas kepala. Hermina yang memegang kemudi perahu, tidak mengangkat sampah seperti yang lainnya. Ternyata dia tidak ingin tamunya yang ikut pembersihan danau ini terkena sampah dan Eceng Gondok. Setelah diberi penjelasan, ia pun melanjutkan pengambilan sampahnya.

Setelah perahu sudah penuh dengan setumpuk sampah dan enceng gondok, Hermine mengayuh perahu ke daratan untuk memindahkan muatan. Perahunya juga dikeringkan. Air yang tersisa diambil menggunakan spons yang tidak lagi berwarna kuning, namun telah berubah menjadi coklat akibat bercampur lumpur. Tak lama kemudian perahu kembali ke danau.

Tepat pukul 12.00, datang panggilan dari Ivone Ohodo untuk menyelesaikan pekerjaan. “Ayo, hari ini sampai di sini saja,” dia berseru. Sesekali menyeka keringat sambil memutar kemudi, Hermine mulai mendayung ke daratan. Sekitar 10 menit kemudian perahu sudah sampai di kolong rumah ketua kelompok dan aktivitas membersihkan danau selesai untuk hari itu.

Kepala Bidang Sampah dan Limbah B3 Kota Jayapura, Agtustibus Bondi mengatakan, sudah ada pengujian terhadap kondisi air danau di Kampung Yoka pada 18 Juni 2021. Untuk saat ini belum bisa dikatakan bahwa danau sudah tercemar. “Jika danau berbau dan berwarna, maka termasuk klasifikasi sudah tercemar,” kata dia. 4 November 2021.

Jika ada fakta populasi habitatnya berkurang atau mati tanpa sebab,

itu bisa menjadi indikasi danau sudah tercemar. “Tetapi itu semua harus dibuktikan.”



Antonius Mebri, Kepala Kampung Yoka.

Laporan Hasil Uji Sanitasi Lingkungan pada kondisi air danau di Kampung Yoka pada 18 Juni 2021 yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura

Parameter Satuan Baku Mutu Hasil Uji

1. Coli Tinja MPN/100 ml 100 19 IKM/5.4.9001-01/BLK-Papua
 2. Coliform MPN/100 ml 1000 29 IKM/5.4.9001-01/BLK-Papua
- Spesifikasi metode : tabung ganda

Untuk penanganan sampah di Kota Jayapura, kata Agustibus Bondi, pemerintah mempunyai tenaga honorer sekitar 143 orang, armada dump truck 40, truk ambrol 20 dan motor tiga roda 16, dan mobil pickup. Untuk armada laut, ada 5 buah speedboat. Setiap hari petugas itu menjemput sampah dari kampung ke kampung. Ini juga bentuk edukasi kepada masyarakat yang bermukim di atas permukaan air atau istilahnya permukiman-permukiman pasang surut untuk tidak membuang sampah langsung ke air.

Agustibus Bondi mengatakan, belum pernah ada aduan masyarakat ke pemerintah kota terkait sampah di danau. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jayapura juga mengakui belum pernah mengangkat sampah dari danau. Dengan adanya pemberitaan media soal kondisi danau tersebut, itu akan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Jayapura untuk memperhatikan sampah di danau dekat Kampung Yoka. “Kami akan menaruh 1 buah speedboat untuk mengangkut sampah,” katanya.

Setelah ada gerakan pembersihan danau oleh warga Yoka ini, ada perubahan yang bisa dirasakan. “Setelah danau dibersihkan, danau terlihat lebih bersih dan baik. Saya sangat senang karena ini adalah hasil dari pekerjaan Saya,” kata Gerda Okoka. Sejak bekerja sebagai pembersih danau, ia masih “membuang” jaring di danau.

Antonius Mebri mengatakan, sejak ada pembersihan danau, jumlah eceng gondok semakin berkurang. Namun itu tidak memulihkan habitat asli. “Ikan endemik danau menurut saya sudah menghilang dan sangat sulit mendapatkan ikan ini, yaitu ikan Gabus danau. Kerang (bia) asli danau sudah tidak ditemukan lagi saat ini, karena bia ini hanya dapat berkembang biak di air yang jernih,” kata dia.

Untuk mengurangi aliran sampah ke Danau Sentani, kata Henderita, yang perlu diubah adalah pola pikir manusianya. Masyarakat perlu diedukasi untuk mengumpulkan sampah. Pemerintah juga perlu memastikan sampah warga diangkut dan dibawa ke tempat pembuangan akhir Koya Koso. Pendidikan soal sampah ini juga harus diberikan di sekolah. “Jika kebiasaan buang sampah sembarangan bisa diubah, maka masalah ini tentu perlahan-lahan dapat diatasi,” kata dia.

Henderita menambahkan, upaya lain yang juga harus dilakukan adalah memberikan pelatihan-pelatihan untuk pemanfaatan eceng gondok menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. “Seperti di daerah lain, (eceng gondok) dijadikan produk berupa sandal, tempat tissue, tas,” kata dia. Selain itu, juga bisa dimanfaatkan untuk kompos dan pupuk tanaman.

Upaya pemanfaatan sebagian sampah danau juga sudah dilakukan. Menurut Antonius Mebri, sampah dari danau terdiri dari plastik, rumput neli (rumput danau), bangkai binatang, dan eceng gondok. Sampah plastiknya dibawa ke tempat pengelolaan sampah. Sedangkan rumput neli ditumpuk dalam jumlah banyak. Setelah membusuk lalu dicampur dengan tanah dan dijadikan pupuk untuk tanaman di kebun.

Karya telah dipublikasikan di Papuaunik.com, 19 November 2021



Tantowi Djauhari

Jurnalpapua.id / Portaljepe.id

Banyak meliput isu hulu energi migas dan isu lingkungan pada umumnya. Pengalaman di dunia jurnalistik sudah digeluti sejak tahun 2001 ketika menjadi penulis lepas di Majalah Pantau Jakarta dan kontributor Kantor Berita Radio 68H Jakarta. Kemudian menjajaki sebagai jurnalis di Harian Surya (2003 -2012) dan portal berita online Teropongnews.com di Sorong. Sejak Februari 2021 ini aktif bekerja di portal media online Portaljepe.id / jurnalpapua.id

“Hutan Papua disebut sebagai benteng terakhir penjaga krisis iklim di Indonesia. Tapi isu lingkungan, khususnya kelestarian hutan, belum mendapatkan perhatian dan porsi pemberitaan lebih dari media di Papua. Bisa jadi ini karena kurangnya pemahaman para jurnalis. Jadi kegiatan ini menjadi anugerah bagi jurnalis di Papua karena mendapat kesempatan belajar dan memahami seluk beluk tata kelola lingkungan dan hutan Papua. Banyak persoalan lingkungan dan hutan di Papua, tapi kesulitan untuk mendapatkan angle dan memulai menulisnya. Hambatan lainnya, tidak ada dana liputan cukup mengingat geografis Papua yang sangat menantang dan jarak tempuh ke lokasi liputan yang jauh. Jika program seperti ini berkelanjutan, Saya yakin isu lingkungan akan menjadi menarik diulas para jurnalis di Tanah Papua.”

Menepis Bujuk Rayu Cukong Kayu

Jumat, 19 November 2021



Operator chain saw yang dibayar Edison Salamala, menebang kayu Merbau di Tanah Adat Dusun Gilulus, Kampung Klatomok, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong. Foto: Ist/JP

“SA macam stress kah lihat kayu-kayu itu. Sedih sekali. Banyak yang su ditebang, ada yang masih utuh, ada yang su di iris-iris,” kata Eka Kambuaya Kalami.

JURNALPAPUA.ID - Tokoh perempuan di Kampung Klatomok, Distrik Klayili Kabupaten Sorong, Papua Barat ini baru berani menginjakkan kembali kakinya di tanah adat Dusun Gilulus, setelah sumpah adat di atas tanah itu satu tahun berlalu.

Pada Minggu, 14 November 2021, Eka Kambuaya Kalami seperti melepas kerinduan di tanah ulayat yang masuk wilayah administratif Kampung Klatomok ini. Ia datang bersama Silas Onge Kalami, suaminya, yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi.

Perasaan sedih menyeruak saat Eka menyaksikan batang-batang pohon kayu Merbau tumbang, tergeletak begitu saja di antara semak-semak. Ada yang masih berwujud gelondongan, ada pula yang sudah di gergaji menjadi potongan balok. Eka menyebut proses pengolahan ini dengan istilah di iris-iris.

Kayu-kayu itu adalah sisa peninggalan Edison Salamala, warga Kampung Asbaken Distrik Klayili. Jarak dari Kampung Klatomok ke Asbaken, sekitar 2,5 kilometer. Di Gilulus, Edison mengolah kayu bersama keluarga besarnya, seperti Maklon Salamala, Nahum Salamala dan Samuel Salamala.

Perhitungan kasar Silas O. Kalami, tidak kurang dari 15 hektare luas di area hutan adat Klatomok yang sudah rusak akibat pembalakan. Angka yang dicatat Yayasan Auriga Nusantara, sebuah CSO Lingkungan, lebih besar lagi. Total luas deforestasi di Klatomok hingga tahun 2020, mencapai 24 hektare, yang meliputi 19 hektare terjadi di tahun 2016, dan ada penambahan 5 hektare di tahun 2017.

Yustinus, staf Direktorat Informasi dan Data Yayasan Auriga Nusantara menyebut, data deforestasi di Klatomok ini didapatkan melalui kombinasi dataset *Global Forest Change* dari *Global Land Analysis and Discovery (GLAD) University of Maryland*, dan peta penutupan lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Deforestasi tahunan dilakukan berdasar *year of gross forest cover loss event (tree cover loss)* 2000-2019 dalam tutupan hutan alam KLHK tahun 2000.

“Artinya, deforestasi pada tabel ini hanya mencakup *tree cover loss* pada tutupan hutan alam KLHK 2000, tapi tidak semua *tree cover loss* pada GLAD,” kata Yustinus, Selasa 16 November 2021.

Data Deforestasi Distrik Klayili, kabupaten Sorong, Papua Barat

| Kampung | Tahun (ha) | | | | | Total |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| KLASOWOH | | | | | 0,18 | 0,18 |
| KLATOMOK | 0,19 | 0,05 | | | | 0,24 |
| KLAWULUH | 1,29 | | | 0,12 | 0,57 | 1,98 |
| KLAYILI | | | | | | 0,00 |
| KWAKEIK | 0,46 | | 0,80 | | | 1,26 |
| MALAKOBUTU | 0,31 | | | | | 0,31 |
| MALALILIS | 3,71 | 0,16 | 1,03 | 0,78 | 1,85 | 7,53 |
| MLAWER | 0,01 | | | 0,17 | 0,63 | 0,81 |
| Total | 5,96 | 0,21 | 1,83 | 1,06 | 3,23 | 12,30 |

Diolah Yayasan Auriga Nusantara dari :

1. Administrasi Kemendagri 2020
2. Tutupan lahan KLHK 2000
3. Year of gross forest cover loss event 2000-2019 *Global Land Analysis and Discovery (GLAD)* University of Maryland

Dari hasil tabulasi data yang diterima Jurnalpapua.id, total luas deforestasi di Distrik Klayili hingga tahun 2020 mencapai 12,30 hektare, yang terletak di Kampung Klasowoh 18 hektare dari total luas Tutupan Hutan dan Bukan Tutupan Hutan 3.534,54 hektare. Klatomok (24 hektare/3.113,95), Klawuluh (1,98 hektara/3.159,68), Kwakeik (1,26 hektare/2.767,51), Malakobutu (31 hektare / 3.010,20), Malalilis (7,53 hektare / 3.904,44) dan di Kampung Mlawer mencapai 0,81 hektare / 3.159,89 hektare.

Kampung Klatomok Distrik Klayili sendiri, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 53 Tahun 2013, tentang Pembentukan 112 Kampung dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong. Obed Kalami diangkat sebagai Kepala Kampung melalui Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 141/KEP.370-ADPEM/XII/TAHUN 2015 tertanggal 11 Desember 2015, tentang Penunjukkan/Pengangkatan Kepala Kampung pada 11 Distrik dalam Wilayah Kabupaten Sorong.

Kampung Klatomok yang berbatasan dengan Kampung Asbaken, Distrik Makbon ini, dihuni oleh keluarga besar marga (gelek) Kalami Malasili, seperti gelek Gifelem, Magablo, Ulala, Mambrasar dan Kalasibin. Tetapi menurut Silas Ongge Kalami, Ketua Lembaga

Masyarakat Adat (LMA) Malamoi Sorong, pemegang Eges Pemun (hak milik) tanah adat itu adalah Gelek Kalami Malasili.

Edison Salamala, generasi dari marga Salamala Kalabili bukanlah pemilik hak ulayat di Dusun Gilulus, Kampung Klatomok.

Berdasarkan keputusan sidang Peradilan Adat oleh Dewan Adat Suku Moi di Aimas, Kabupaten Sorong pada 5 November 2020, Dusun Gilulus dan sekitarnya yang ada di Jl. Sorong – Tambrauw, adalah hak milik Gelek Kalami Malasili, secara turun temurun dengan status Eges Bebemun.

Keputusan bernomor 10/DAS-MOI/AMS/KAB.SRG/XI/2020 ini ditandatangani enam Nedinbulu (hakim) Sidang Adat dari tujuh orang Neninbulu; Tukang Matius Osok, Masanwom Yohanis Bisi, Untelem Yesaya Bisi, Unlas David Filis, Tilimai Berthus Osok dan Sipai Esau Kalawen. Satu orang Nedinbulu, Tiliwi David Ulimpa tidak membubuhkan tandatangan dalam keputusan sidang tersebut.

Namun dalam Sidang Peradilan Adat yang digelar di Distrik Makbon pada Sabtu, 9 Maret 2013, Gelek Salamala Kalabili mengklaim bahwa hutan adat yang ada di Gilulus adalah miliknya, hasil pemberian dari Gelek Gahlala. Selain di Gilulus, yang diklaim sebagai hak adat Salamala Kalabili adalah Gunung Malaeges Em dan Kali Kalami.

Perjalanan Gelek Kalami Malasili untuk menjaga dan meraih kembali hak ulayatnya itu, cukup panjang dan menumpahkan darah. Gesekan fisik dampak sengketa lahan oleh kedua marga ini beberapa kali terjadi.

Silas Ongge Kalami pernah memenjarakan Edison Salama satu tahun tiga bulan, akibat pembalakan hutan itu. Selain vonis penjara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang diketuai Hanifzar, mengganjar Edison denda uang Rp 500 juta, yang apabila tidak dibayar, diganti kurungan badan selama 3 bulan.

Edison dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana dengan sengaja memuat, membongkar,

mengeluarkan, menguasai dan memiliki hasil penebangan kayu di kawasan hutan tanpa izin. Perbuatan ini melanggar Pasal 83 Ayat (1) juncto Undang Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kutipan amar putusan bernomor 110.Pid.Sus/2017/PN Son yang dibacakan pada Senin, 4 September 2017 ini, juga menetapkan 146 batang kayu Merbau dengan berbagai ukuran, dirampas untuk Negara.



Salah satu hasil sidang adat oleh Dewan Adat Malamoi, melarang Edison Salamala tinggal dan beraktivitas di Dusun Gilulus, Kampung Klatomok. Foto: Ist/JP

“Kami tidak mau hutan adat yang diwariskan para orangtua kami, dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Secara turun temurun kami menjaganya, tapi ada orang lain yang tiba-tiba mengaku sebagai pemilik ulayat, dan merusaknya,” kata Silas, ditemui di Sekretariat LMA Malamoi dan di rumahnya, Selasa, 16 November 2021.

Proses hukum ini berawal dari Laporan Polisi yang disampaikan Silas ke Polres Sorong pada 8 Maret 2017. Silas melaporkan Edison, karena membabat hutan di wilayah hak ulayat marga Kalami, tanpa hak dan tidak dilengkapi izin.

Perbuatan Edison ini diketahui Silas sejak Senin, 14 September 2015, ketika masih dalam proses pembangunan base camp. Silas diberitahu oleh Kori Kalami dan Sem Paa, saudara iparnya. Esoknya, Silas menyuruh Yosepus Kalami, Petrus Kalami, Yordan Kalami dan Anton Kalami, untuk mengecek kebenaran informasi itu.

Di lokasi yang disebutkan, Yosepus mendapati Edison bersaudara sedang menebang kayu, dan menegurnya agar aktivitas itu dihentikan. Merasa tak digubris, pada 28 September Silas melaporkan penebangan kayu itu ke Polres Sorong dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong.

Pada 29 September 2015, tim dari Dinas Kehutanan turun ke lokasi, menanyakan surat ijin penebangan kayu itu dan meminta Edison menghentikan aktivitasnya. Perintah ini ternyata juga tak digubris, sehingga pada 1 Oktober 2015, anggota Polsek Makbon yang turun dan mem-*police line* kayu yang sudah diolah.



Silas Ongge Kalami, Ketua LMA Malamoi.

Saat itu, polisi juga menyita 3 unit *chain saw* dari Edison Cs. Namun tindakan hukum dari polisi ini ternyata hanya bertahan menghentikan kegiatan Edison selama 1 tahun. Edison kembali beraksi memabat hutan, dan menjual kayu olahan yang sebelumnya di *police line*.

Atas tindakan itu, pada 6 Maret 2017 Silas kembali melapor kembali ke Polres, dan resmi membuat Laporan Polisi (LP) pada 8 Maret 2017. Polisi menangkap dan memproses Edison secara hukum.

Tetapi tinggal di hotel prodeo selama 1,5 tahun, tidak membuat Edison jera. Beberapa hari setelah menghirup udara bebas, pada 12 Agustus 2018 Edison kembali mengancam Obed Kalami, Kepala Kampung Klatomok dengan sebilah parang dan cangkul.

Padahal, ketika Edison masih berada di bui menjalani hukuman, keluarga besar Salamala Kalabili sudah membuat surat pernyataan kepada keluarga besar Marga Kalami Malasili. Isinya, keluarga Salamala Kalabili tidak akan mengganggu tanah adat dan keluarga Kalami Malasili yang ada di kampung Klatomok.

Pernyataan yang disaksikan Kepala Kampung Asbaken dan Kepala Kampung Klatomok ini, juga terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan keluarga Salamala terhadap Yulianus Ulala, pada 31 Desember 2017 di Kampung Asbaken.

Selain mengancam Obed Kalami, sepulang dari LP, Edison Salamala kembali mengolah kayu di Gilulus. Aktivitas itu dipergoki keluarga Kalami. Bahkan, saat di base camp operator yang ada di dalam hutan, juga didapati Frengky Baransano, oknum bintang anggota Polsek Sorong Kepulauan, Polres Sorong Kota, Polda Papua Barat.

Atas temuan ini, pada 22 November 2018, Silas Ongge Kalami kembali melapor ke Polres Sorong. Selain mengadakan Edison bersaudara, Silas juga menyeret nama Frengky Baransano, yang diduga terlibat dalam illegal logging itu.

Satu minggu sejak Silas mengadu ke Polres Sorong, seluruh operator yang ada di lokasi itu ditarik keluar. Tidak ada lagi aktivitas penebangan kayu. Frengky Baransano melaporkan balik Silas ke Polres Sorong Kota, dengan pasal pencemaran nama baik.

“Saya tidak ada sangkut paut dengan mereka (Edison Cs). Hubungan saya sebatas mobil saya dipakai untuk keperluan turun ke kota atau naik ke lokasi,” kata Frengky, mengklarifikasi tuduhan Silas.

Mobil Toyota Hilux double cabin miliknya, sering dicarter keluarga Edison yang dia kenal sejak 2018, dengan tarif Rp 1 juta sekali jalan. Karena mobil itu dia bawa sendiri, makanya dia sering terlihat berada di lokasi pengolahan kayu yang dilakukan Edison.

Meski tahu Edison mengolah kayu, sebagai aparat penegak hukum, Frengky tidak pernah menanyakan apakah aktivitas yang mereka lakukan itu berijin, atau illegal.

“Saya tidak ada sampai kesitu, menanyakan apakah ada surat-surat resminya. Karena posisi saya sebatas pemilik kendaraan yang mereka gunakan. Jadi sama sekali tidak ada hubungan kerja terkait kayu, Makanya ketika saya dilaporkan ke polisi, saya diarahkan Kasi Propam untuk melaporkan balik,” urai Frengky.

Aksi nekat Edison bersaudara memabat kayu di hutan Gilulus, diduga untuk memenuhi kontrak jual beli kayu yang sudah dijalin dengan Suhaelly Herwanto, bos kayu asal Depok, Jawa Barat.



*Edison Salamala (kanan), saat menerima uang pembayaran kayu dari Suhaelly Herwanto.
Foto: Ist/JP*

Dalam transaksinya, Suhaelly membeli kayu dari Edison sebanyak 50 m³ seharga Rp 5 juta/m³. Secara bertahap, Edison sudah menerima uang pembayaran kayu itu. Pertama senilai Rp 30 juta, dibayarkan di sebuah warung makan di Aimas, Kabupaten Sorong.

Terakhir, Edison terlihat menerima uang pelunasan sebesar Rp 10 juta, pada 10 Oktober 2018, sesuai tanggal yang tertulis di kwitansi pembayaran. Pelunasan ini terekam di base camp pengolahan kayu, yang juga disaksikan oleh Aipda Frengky Baransano, seorang Babhinkamtibmas Kampung Soop, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong.

Dari kontrak volume kayu itu, Suhaelly baru menerima 20 m³. Sisanya, dia mempercayakan kepada Alfred Tenmury, warga Aimas, Kabupaten Sorong, untuk mengurus.

Melalui surat kuasa yang ditanda tangani Suhaelly di atas materai Rp 6000 pada 5 Februari 2020, Alfred berkuasa menyeret Edison ke jalur hukum, jika sisa kayu yang telah dibeli, tidak dipenuhi. Pasalnya, dari total volume transaksi senilai Rp 250 juta, menurut Suhaelly, telah terbayar lunas.

Misi yang emban Alfred adalah menyelesaikan kontrak pembelian kayu pengusaha yang tinggal di Perumahan Lembah Hijau Blok C21 No 02, RT 003 RW 013 Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat dengan Edison Salamala, warga RT 1 RW 1 Kampung Asbaken Distrik Makbon Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Hingga kini Alfred Tenmury mengaku sangat kecewa dan menyesalkan transaksi dengan Edison ini. Dia menyalahkan bosnya, yang gegabah menyerahkan duitnya ke Edison untuk membeli kayu, tanpa melakukan uji rekam jejak Edison. Kata Alfred, setiap orang bisa saja mengaku memiliki lahan dan kayu yang bisa diolah. "Tapi apakah itu bisa dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah dari negara," kata Alfred, dalam perbincangan dengan media ini, Selasa 19 Oktober 2021.

Apalagi, kata Alfred, sebelum menjalin kongsi bisnis dengan juragannya, Edison baru saja meringkuk di bui karena divonis

bersalah melakukan pembalakan liar. Dengan fakta persidangan ini, seharusnya Suhaelly tanggap, bahwa kayu yang diolah Edison adalah ilegal.

“Tapi barang sudah terjadi Bang, mau bagaimana lagi. Saya rencana akan membuat Laporan Polisi, agar masalah ini diselesaikan secara hukum. Tidak ada opsi lain,” tandas Alfred.

Sejatinya, dalam membat kayu, Edison Salamala sudah mengantongi surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK-ALAM) pada hutan produksi yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua Barat, bernomor 570/1199/PSTP-I/x/2018.

Pada beleid yang ditandatangani Bungaran Sitanggang pada 12 Oktober 2018, mengizinkan Edison mengolah kayu di areal seluas 5 hektare pada kawasan Hutan Produksi Konservasi (HPK), yang ada di arah 3,25 kilometer Barat Daya Kampung Malagubtuk. Jarak lokasi antara Kampung Malagubtuk dengan Klatomok, sekira 2,5 kilometer.

Volume dan jenis kayu yang diperbolehkan diolah, sebanyak 50 meter kubik dengan rincian 20 meter kubik jenis Merbau, 25 meter kubik kayu Meranti dan 5 meter kubik Kayu Indah.

Dalam permohonannya ke DPMPTSP tertanggal 28 Agustus 2018, Edison merinci volume dan jenis kayu yang akan diolah adalah Merbau sebanyak 20 meter kubik, Meranti 10 meter kubik dan kayu rimba campuran sebanyak 20 meter kubik. Yang tertulis pada permohonan IPHHK ini, lokasi pengolahan kayu yang disebut Edison berada di Kampung Malagubtuk, seluas 3 hektare. Durasi masa berlaku IPHHK yang diajukan, selama 1 tahun terhitung sejak dikeluarkan oleh DPMPTSP.

“Izin ini diberikan untuk memfasilitasi kebutuhan kayu masyarakat umum pada pembangunan daerah di Kabupaten Sorong,” begitu bunyi kutipan surat DPMPTSP.

Kewajiban Edison juga dibebaskan dalam surat itu, diantaranya;

Membayar iuran kehutanan (Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH), dan kompensasi kepada pemilik hak ulayat berdasarkan jenis dan jumlah kubikasi yang dipungut.

Larangannya; Edison tidak boleh memasukkan kayu olahan hasil produksi IPHHK sebagai bahan baku industri pengolahan kayu; memindahtangankan izin kepada pihak lain; serta memungut hasil hutan melebihi target izin yang diberikan.

Selain itu, Edison juga dilarang menebang kayu di dalam kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi, dan memperdagangkan kayu produksi IPHHK di luar keperluan sesuai izin yang diberikan.

IPHHK-ALAM yang dikantongi Edison ini, dikeluarkan DPMPTSP Papua Barat berdasarkan Rekomendasi bernomor 522/217/VIII/CDK-IX/2018, yang dikeluarkan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX Sorong tertanggal 29 Agustus 2018.

Rekomendasi ini terbit sebagai dokumen yang harus dilampirkan Edison dalam permohonan IPHHK-ALAM, bersamaan dengan rekomendasi dari Petrus Malak, Kepala Kampung Malagubtuk dan Surat Pelepasan Hak Ulayat Hasil Hutan.

LUAS KAWASAN HUTAN BERDASARKAN FUNGSI KAWASAN

| No | Fungsi | Luas | % |
|----|-------------------------|------------|------|
| 1 | Hutan Lindung | 54,374.63 | 6.7 |
| 2 | Hutan Produksi tetap | 167,221.47 | 20.7 |
| 3 | Hutan Produksi terbatas | 99,051.01 | 12.3 |
| 4 | HPK | 309,741.17 | 38.4 |
| 5 | APL | 150,405.16 | 18.6 |
| 6 | SUNGAI | 17,894.74 | 2.2 |
| 7 | CAGAR ALAM | 6,551.10 | 0.8 |
| 8 | TWA | 1,892.71 | 0.2 |
| | total luas | 807,131.99 | 100 |

Dari data yang ada di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX Sorong, areal yang di ijinakan ditebang oleh Edison menjadi bagian dari 309.741,17 hektare area Hutan Produksi Konversi (HPK) yang ada di Kabupaten Sorong. AHK memiliki porsi sebesar 38,4 persen dari total hutan yang ada di Kabupaten Sorong, seluas 807,131.99 hektare.

Yang menjadi problem, dalam memenuhi pesanan kayu dari Suhaely, Edison diduga menebang Merbau di luar area yang tertera dalam ijin. Edison merambah kawasan hutan ulayat milik Gelek Kalami Malasili di Dusun Gilulus, Kampung Klatomok. Tindakan ini yang berakibat Edison Salamala di bui.

Awal tahun 2020, keluarga Edison Salamala kembali berselisih dengan keluarga besar Kalami Malasili di Kampung Klatomok, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong.

Edison Salamala melaporkan Hengki Gifelem, Yosepus Kalami, Yeheskel Kalami, Yusak Kostantinus Magablo, Yulianus Ulala, Melkianus Ulala, Daud Kalami, Yordan Kalami, Niko Kalami, Anthon Kalami, Eliaser Mambrasar dan Hendrik E.Kalasibin ke Polres Sorong.

Perkaranya, pada 28 Maret 2020, Edison dan saudaranya, Maklon Salamala, menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan Hengki Gifelem Cs. Laporan Polisi (LP) Edison dibuat pada 30 Maret 2020, bernomor LP/K/107/IV/2020/SPKT-II.

Atas perkara ini, Hengki Cs memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Sorong pada Selasa, 2 Juni 2020. Hengki Gifelem berdalih, adu fisik itu terjadi karena Edison Salamala sudah tidak mempan diperingatkan secara lisan, agar tidak menebang kayu merbau di wilayah adat Klatomok.

Edison menolak tuduhan itu. Ia menyatakan mengolah kayu di lahan ulayatnya sendiri, dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun.

Keributan di tengah hutan ini berawal saat warga Klatomok mendatangi base camp penebangan kayu di Kampung Gilulus,

yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari Kampung Klatomok. Para orangtua, pemuda dan ibu-ibu yang membawa serta anaknya, bertemu Edison, Maklon, Nahum dan Samuel Salamala di lokasi.

Rombongan warga Klatomok ini melarang Edison bersaudara mengolah kayu di lahan adat yang bukan menjadi hak ulayatnya.

“Tapi kedatangan kami yang ingin bicara baik-baik, disambut dengan parang oleh keluarga Edison. Perut saudara kami, Anthon Kalami ditebas parang oleh Maklon. Beruntung masih bisa menghindar, dan hanya kena kausnya,” kata Hengki.

Mendapat serangan tiba-tiba, warga Klatomok yang sudah tersulut emosi, dengan sigap menyerang balik ke arah Edison bersaudara. Keributan pun pecah. Karena warga Klatomok menang jumlah, Edison tersungkur dan babak belur.

Empat unit gergaji mesin (*chain saw*) yang diduga digunakan untuk menebang kayu merbau di lahan ulayat warga Klatomok, berhasil direbut dan diserahkan warga ke Polsek Makbon sebagai Barang Bukti. Iptu Riklof Tutupary, Kapolsek Makbon saat itu, menerima penyerahan barang bukti ini pada 29 Maret 2020.

Maklon Salamala, Nahum dan Samuel Salamala melarikan diri masuk hutan. Dalam laporannya ke polisi, Edison mengaku mengalami luka sobek di kepala bagian belakang dan pelipis, akibat hantaman benda tumpul.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi Sorong, Silas Ongge Kalami menyebut, di Dusun Gilulus Kampung Klatomok. Wilayah ini menjadi kawasan ulayat Marga Kalami Malasili secara turun temurun.

“Angka pasti luasnya berapa, kami belum mengukur. Tapi kami tahu batas-batas wilayah tanah adat kami,” kata Silas.

Batas wilayah adat milik Kalami Malasili itu juga diakui oleh marga Gelek Salamala Warsatun, Gelek Paa Kami, Gelek Kalami Tiloke, Gelek Kalami Malagufuk serta Gelek Kalami Kiningpilik. Kelima

marga ini memiliki tanah adat yang berbatasan langsung dengan tanah adat Marga Kalami Malasili di Gilulus.



Gergaji mesin (chain saw) yang menjadi barang bukti penebangan liar oleh Edison Salamala, diserahkan ke Polsek Makbon, Polres Sorong, Polda Papua Barat. Foto: Ist/JP

Dalam dokumen pernyataan pengakuan hak adat yang ditandatangani pada 10 April 2013, batas wilayah tanah adat marga Kalami Malasili di Gilulus adalah; sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Gelek Salamala Warsatun, sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Gelek Paa Kami dan Gelek Kalami Tiloke, di sisi Selatan berbatasan dengan tanah adat Gelek Kalami Malagutuk, serta di sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Gelek Kalami Kiningpilik.

Diantara nama yang tertulis dalam pengakuan tanah adat itu, ada Yunus Salamala dan Matius Salamala (perwakilan gelek Salamala Warsatun), Sem Pa dan Wenan Pa (gelek Pa Kami), Niklas Kalami dan Maikel Kalami (gelek Kalami Tiloke), Yorven Kalami dan Amos Kalami (gelek Kalami Malagufuk) serta Evert Kalami dan Metusala Kalami yang mewakili gelek Kalami Kiningpilik.

Keluarga Salamala Kalabili bisa menempati tanah adat itu, karena

peristiwa perang honggi (perang adat) di masa lampau. Leluhur Edison Salamala yang masuk trah Salamala Kalabili, kata Silas, memiliki tanah adat di Kampung Klabili, Distrik Selemkai, Kabupaten Tambrau, jauh dari Klatomok.

Namun Silas tidak mengetahui persis berapa luas tanah adat Salamala Kalabili itu. Yang menjadi fokus selama kepemimpinannya, adalah mengupayakan pemetaan dan identifikasi tanah adat masing-masing marga, khususnya dari Suku Malamoi.

“Identifikasi hutan adat masing-masing marga ini penting, tapi sampai sekarang kami belum memiliki angka-angka luasan itu,” kata Silas.

Peristiwa honggi yang sudah berlalu empat generasi itu, berawal dari pelanggaran adat oleh leluhur Gelek Salamala Kalabili. Seorang laki-laki marga Salamala Kalabili yang menikah dengan perempuan gelek Salamala Lagampefek, suatu ketika melakukan hubungan intim di Kofok Kalabili, tempat yang dikeramatkan.

Perbuatan itu baru terungkap ketika pasangan suami istri ini bertengkar. Sang istri pulang ke rumah orangtua, lalu bercerita kalau dirinya pernah berhubungan badan di Kofok Kalabili. Bagi suku Moi, hubungan seks di tempat keramat adalah larangan, sangat bertentangan dengan hukum adat.

Keluarga Salamala Lagampefek marah. Honggi dengan keluarga Salamala Kalabili tak terhindarkan. Banyak warga Salamala Kalabili yang tewas. Saat honggi berlangsung, ada warga Salamala Kalabili yang berhasil dilarikan oleh marga Kalami Kiningpilik dari peperangan. Gelek Salamala Lagampefek mengejar mereka hingga masuk wilayah Asbaken, Kabupaten Sorong.

Untuk menyelamatkan pelarian Salamala Kalabili, keluarga Kalami Malasili memberikan perlindungan. Setelah honggi reda, gelek Kalami Malasili menyuruh mereka tinggal di gunung Malaeges Em, yang masuk wilayah tanah adat Kalami Malasili.

Gelek Kalami juga sempat menjadi mediator perdamaian Salamala

Kalabili dengan Lagampefek, agar Kalabili bisa kembali ke tanah leluhurnya. Namun upaya itu gagal, dan banyak korban jiwa di kedua belah pihak.

Penyelamatan oleh gelek Kalami Kiningpilik ketika terjadi hong, berbuah penyerahan atribut sakral milik Salamala Kalabili ke Kalami Kiningpilik. Sebagai penolong dan pemberi perlindungan, Gelek Kalami Malasili mengangkat pelarian perang hong Salamala Kalabili ini menjadi Daman (pesuruh).

“Gelek Salamala Kalabili itu hanya menerima hak eges woti atau hak perlindungan. Kami tidak pernah memberikan tanah adat yang status hak eges pumun atau hak milik, kepada pihak manapun,” kata Silas Ongge.

Dampak dari pembalakan hutan itu, melalui sidang peradilan adat pada 29 Agustus 2020, marga Kalami Malasili mencabut hak perlindungan (woti) yang pernah diberikan kepada marga Salamala Kalabili. Terdapat lima poin alasan yang menjadi dasarnya;

Ancaman kehilangan hak atas sebagian besar tanah adat Kalami Malasili di kawasan dusun Gilulus dan sekitarnya, akibat klaim hak oleh Edison Salamala dan Gelek Salamala Kalabili. Klaim tersebut mulai muncul sejak sidang adat di Makbon pada Sabtu, 2 Maret 2013, serta keterangan kesaksian Edison Salamala, Maklon Salamala dan istri Edison Salamala di Polres dan Pengadilan Negeri Sorong.

Kerugian akibat penebangan dan pengolahan kayu oleh Edison Salamala Cs, diatas tanah adat Kalami Malasili sejak tahun 2015. Terjadinya kerusakan hutan alam sekitar 15 hektare di Dusun Gilulus dan sekitarnya.

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2020, sering terjadi konflik fisik / perkelahian antara keluarga Kalami Malasili dengan Edison Salamala di Gilulus.

Akibat dari aktivitas Edison Cs di Dusun Gilulus, maka masyarakat adat Kalami Malasili secara langsung maupun tidak langsung, tidak lagi dapat menokok sagu di Dusun Gilulus.

“Berdasarkan alasan itu, dengan ini kami mencabut perlindungan dan menolak keberadaan Gelek Salamala Kalabili atau Edison Cs diatas tanah adat kami,” kata Findoi Yosepus Kalami, Ketua Gelek Kalami Malasili dalam suratnya.



Pengucapan sumpah adat oleh Findoi Yosephus Kalami di Dusun Gilulus, Kampung Klatomok, Klayili, Kabupaten Sorong. Foto: Ist/JP

Marga ini juga menuntut Edison Cs membayar seluruh kerugian atas pembalakan yang ia lakukan di Gilulus. Jika tidak, marga Kalami akan memproses hukum lewat jalur pidana maupun perdata.

Keluarga besar Edison Salamala kini sudah berpindah ke Kampung Asbaken. Dalam sumpah adat yang diucapkan Findoi Yosepus Kalami di Gilulus, keluarga Edison tidak boleh lagi memungut apapun hasil hutan yang ada di Gilulus.

“Bahkan mendengar suara burung yang ada di Gilulus, dia tidak boleh. Kalau itu dilanggar, dia akan termakan sumpah adat. Bambu tui yang kami tancapkan di tanah adat Gililus, akan menikam dia,” tukas Silas Ongge Kalami.

Selama tiga kali digelar sidang adat, Edison Salamala selalu

diundang oleh Dewan Adat Suku Moi di Aimas. Tapi hingga sidang ketiga yang berlangsung di tanah adat Gilulus, Edison tidak tampak.

Isack Yable, Orang Asli Papua (OAP) yang duduk di lembaga DPRD Kabupaten Sorong menilai, gesekan masyarakat adat seperti ini, sejatinya tidak akan terjadi jika pemerintah daerah mampu memberdayakan masyarakat adat dan melibatkan mereka dalam menjaga hak ulayat.

Memang sudah ada regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017, tentang Perlindungan dan Pengakuan Hukum Masyarakat Adat Moi yang disahkan melalui sidang Paripurna DPRD.

Namun kata Isack, urusan perut masyarakat adat, tidak cukup hanya dengan menerbitkan beleid. Harus ada tindakan riil berupa pendampingan masyarakat, agar mereka mengelola hutan sebagai sumber kehidupan secara arif.

“Kalau perut su lapar, sering membuat orang berpikir jalan pintas. Tapi kesadaran untuk menyiapkan masa depan anak cucu ini yang juga harus dipikirkan. Tidak harus menebang kayu untuk bisa mendapatkan uang. Ada yang namanya Hasil Hutan Bukan Kayu yang juga bisa dikelola,” tukasnya.

Pernyataan ini juga diamini Endra Gunawan, mantan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Papua (Unipa) Manokwari, Papua Barat. Menebang kayu hutan, bukan satu-satunya jalan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adat. Ada banyak hasil hutan bukan kayu yang juga bisa menjadi sumber penghidupan.

Kalaupun terpaksa harus menebang kayu, harus ada pola yang ketat agar hutan Papua yang menjadi benteng terakhir menghadapi krisis iklim ini, tetap lestari. Misalnya dengan menerapkan pola tebang pilih, atau tebang tanam.

“Selain memilih pohon tertentu, masyarakat adat juga harus menanam pohon yang baru ketika menebang. Kesadaran

masyarakat adat agar menjaga hutan ini tetap lestari, memang butuh waktu untuk secara terus menerus di kampanyekan,” kata Endra Gunawan.

Perkumpulan Pemuda Generasi Muda (PGM) Malaumkarta yang dipimpin Tori Kalami, memiliki strategi yang dianggap jitu dalam melestarikan hutan adat Papua.

Secara teknis, ada tiga hal penting yang saat ini tengah ia jalankan; Mengidentifikasi dan mengorganisir kembali kelompok Tua Adat, Mengorganisir kembali kelompok muda sebagai implementator pengetahuan, dan ketiga, Menemukan metode baru, menginisiasi gerakan di Masyarakat Adat, untuk meminimalisir konflik lahan.

Jika pemetaan wilayah adat berdasarkan marga tuntas, selanjutnya adalah mengidentifikasi potensi alam yang bisa dikembangkan dan dikelola. Jika memang terdapat lahan kosong bekas konsesi di dalamnya, ini adalah tugas generasi muda untuk membangun unit usaha masyarakat adat.

“Berawal dari kesadaran yang sama dalam menjaga hutan, semua tahapan dijalankan secara simultan, dan ini juga perlu dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi,” kata Tori Kalami.

Pemahaman tentang pola itu gencar di kampanyekan Papua Forest Watch, lembaga nirlaba di Sorong yang memiliki konsen terhadap penyelamatan hutan adat. Charles Tawaru, direktur PFW mengaku, dalam setiap kesempatan bertemu dengan tokoh dan masyarakat adat, dirinya selalu menyelipkan pesan pentingnya mengelola hutan secara bijak.

“Memang mengubah mindset masyarakat adat itu tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa. Selama kita secara terus menerus menyampaikan pesan positif ini, kesadaran mereka untuk menolak kedatangan cukong kayu juga terbangun,” kata Charles. ** (tantowi djauhari)

Karya telah dipublikasikan di portaljepe.id, 19 November 2021

MENTOR DAN PEMBICARA TAMU

TENTANG MENTOR JOURNALIST FELLOWSHIP 2021

Abdul Manan

Abdul Manan, bekerja sebagai jurnalis sejak 1996. Pengalamannya meliputi politik, hukum, hubungan internasional, dan lingkungan. Kini ia menjadi redaktur Majalah Tempo, Jakarta, di desk lingkungan, iptek.

Anggota The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) ini memiliki pengalaman sebagai pelatih dalam isu-isu peningkatan kapasitas jurnalis, mulai dari liputan hingga penulisan untuk berbagai isu termasuk isu lingkungan.

Ia menulis sejumlah buku dan laporan tentang isu-isu media di Indonesia. Sebagian besar diterbitkan oleh AJI.

Manan juga menjadi anggota AJI sejak 1997. Pada 2005-2008 menjadi sekretaris jenderal AJI, kemudian ketua AJI periode 2017-2021. Selain AJI, ia juga aktif di serikat pekerja media Tempo, dan federasi serikat pekerja media independen (FSPMI) sebagai ketua.

Kontak korespondensi via surel : abdulmanan1974@gmail.com.

Budi Nurgianto

Malang melintang di dunia jurnalistik sejak tahun 2007 dengan menanganwali karir profesional sebagai jurnalis Harian Tribun Malut, Harian Mimbar Kieraha, Harian Posko Malut dan sejak 2009 aktif

sebagai koresponden Tempo untuk wilayah Maluku utara, Lulusan Sarjana Ekonomi Akutansi Universitass Muhammadiyah Maluku Utara ini menempuh pendidikan Magister Managemen Bisnis di Universitas Sam Ratulangi Manado.

Aktif diberbagai organisasi sejak di bangku kuliah, Budi pernah menjadi Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Ternate periode 2011 dan dua periode pada posisi sekretaris Aji di Kota Ternate. Terakhir menjabat sebagai sekretaris eksekutif Yayasan Satu Data Indonesia, Provinsi Maluku Utara. Selama bekerja sebagai jurnalis, Budi menulis buku yang diterbitkan oleh AJI Ternate, diantaranya “Potret Jurnalis Maluku Utara”, “Amplop itu Candu”, “Loyaiutas Pembaca Surat kabar”, dan menjadi editor untuk beberapa buku terbitan AJI dan buku “Pedoman Liputan Jurnalisme Data” dari Yayasan Satu Data yang bekerjasama dengan Kedutaan Amerika untuk Indonesia.

Menorehkan banyak prestasi dalam karir jurnalsitiknya sebagai penerima beasiswa liputan skala nasional hingga internasional. seperti Fellowship Keamanan Pangan yang Diselenggarakan AJI Indonesia- Oxfom Terpilih Sebagai Peserta Konferensi Hari Kebebasan Pers Dunia di Jakarta Yang Diselenggarakan UNESCO, Beasiswa Liputan Investigasi TEMPO Intitute, Beasiswa Liputan Investigasi Berbasis Jurnalisme Data- AJI Indonesia-USAID, Grant Competition dari Kedutaan Amerika Serikat, *Story Grant* Isu Kehutanan dari Earth Journalism Network dan *Internews*, *Story Grant Special Report* Earth Journalism Network dan *Internews* dan Fellowship PASOPATI 2021 dari Yayasan AURIGA Indonesia. Budi juga terpilih sebagai delegasi Indonesia untuk Program International Visitor Leadership Program (IVLP) di Amerika Serikat. Dan kini aktif di Divisi Kampanye The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ).

Kontak korespondensi : b.nurgianto@gmail.com

Twitter: @budhynurgianto

Instagram : @budhynurgianto

TENTANG PEMBICARA TAMU JOURNALIST FELLOWSHIP “HUTAN PAPUA KUNCI MITIGASI KRISIS IKLIM”

Richarth Charles Tawaru

Pendiri Papua Forest Watch

Sebuah organisasi non profit yang aktif bekerja dalam isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan serta penguatan masyarakat adat di Tanah Papua.

Yan Richard Pugu, S.Hut, M.Si.

Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua

Mengemban tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua. Serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan, perlindungan kawasan hutan, konservasi hutan dan jasa lingkungan.

Budi Mulyanto

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Papua Barat

Balai Besar KSDA Papua Barat mengemban tugas menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial di Papua Barat.

Dina Helena Anita Homer, S.Hut

Kepala cabang Dinas Kehutanan wilayah IX Sorong

Dinas Kehutanan melaksanakan urusan pemerintahan daerah/ kewenangan provinsi, dibidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusahaan hutan, rehabilitasi hutan lahan dan perlindungan hutan serta tugas pembantuan. Tugas Kepala cabang Dinas Kehutanan, membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah. Provinsi Papua mempunyai 11 Cabang Dinas Kehutanan, termasuk wilayah IX Sorong.

Maurits J. “Aiesh” Rumbekwan

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua

Bagian dari WALHI Eksekutif Nasional, yang didirikan pada tahun 2012 oleh organisasi masyarakat sipil di Jayapura. WALHI Papua berperan mempromosikan kesadaran lingkungan hidup melalui pendidikan, advokasi kebijakan, kampanye lingkungan hidup. Salah satu upayanya, melakukan penyelamatan ekosistem hutan yakni tanaman obat melalui praktik kearifan lokal, sebagai pendekatan budaya dalam perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan hutan, sebagai sumber penghidupan untuk hidup yang berkelanjutan.

Torianus Kalami

Tori – panggilan akrab Torianus, pemuda asli suku Moi yang sejak 2008, merintis dan menjadi pelopor gerakan Perkumpulan Generasi Malaumkarta. Ia mengorganisasi anak muda kampung sebagai ujung tombak untuk memperjuangkan hak atas tanah, hak atas sumber daya alam dan pengetahuan tradisional di Papua. Tori menginisiasi konsep partisipasi pembangunan berkelanjutan di Kampung Malaumkarta dengan mendekati pada masyarakat adat.

Bustar Maitar

CEO Yayasan EcoNusa ini lebih dari 20 tahun telah mengkampanyekan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan untuk Indonesia, bekerja dengan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dari tingkat akar rumput hingga gerakan global. Mendirikan LSM berbasis di Papua, PERDU pada tahun 1998 dan salah satu staf pertama yang direkrut untuk kantor baru Greenpeace di Indonesia pada tahun 2005 dan menghabiskan lebih dari 11 tahun bersama Greenpeace untuk berkampanye mencapai nol deforestasi global.

Pencapaian besar ini bersama dengan tim Greenpeace berhasil memimpin upaya organisasi untuk bekerja sama dengan pemerintah dan industri Indonesia untuk menerapkan moratorium konversi hutan Mei 2011. Memimpin tim Greenpeace Internasional mengubah perusahaan pelanggan multinasional teratas dan perusahaan produsen utama untuk menyelaraskan dengan upaya nol deforestasi global dalam rantai pasokan mereka yang menghasilkan sekitar 75% minyak sawit yang diperdagangkan secara global dan 80% produksi pulp dan kertas Indonesia menjadi produk bebas deforestasi.

Aktif mengembangkan *social and eco enterprise* untuk mempromosikan ekowisata masyarakat di kawasan timur Indonesia dan mendukung yayasan lokal di pulau Papua bernama Bentara Papua (www.bentarapapua.org) untuk menghasilkan talenta muda kepemimpinan di bidang sosial, lingkungan dan kewirausahaan masyarakat. Membangun dan mengelola inisiatif pengembangan ekowisata yang disebut “Kurabesi Nusantara” (www.kurabesiexplorer.com) yang mengoperasikan kapal kayu untuk sewa kapal pesiar pribadi dan memasarkan produk masyarakat dari Indonesia bagian timur.

Ahmad Arif

Bekerja sebagai jurnalis di Koran Kompas sejak tahun 2003, Magister ilmu sosiologi di Fisip UI ini aktif sebagai pembicara dan pelatih di berbagai konferensi dan pelatihan isu lingkungan dan kebencanaan. Serta melahirkan banyak buku terkait isu lingkungan dan kebencanaan.

Passion di isu lingkungan dibuktikan dengan banyak grants dan penghargaan skala nasional maupun internasional yang diraihinya. Diantaranya, Earth Journalism Network COP25-Madrid Fellowship Program 2019, BNPB Citra Dharma Bakti Award”, Disaster Mitigation and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Award, Japan Foundation Fellowship, Adiwarta Award for reporting environment issues in Indonesia, InWent Fellowship Environmental Reporting Course at International Institute for Journalims in Berlin, Mochtar Lubis Award. Saat ini, Arif menjabat sebagai ketua Umum Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia, Co-founder Project Multatuli, Co-founder Laporcovid19.org dan divisi pendidikan di Aliansi Jurnalis Independen.

Kontak korespondensi : aikkompas@gmail.com

Andi Fachrizal

Akrab disapa Rizal Daeng, adalah Koordinator Bidang Pengembangan Isu Wilayah Tengah Indonesia The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ). Selain itu juga aktif sebagai Ketua MPO Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pontianak, dan Anggota Kelompok Penjelajah Alam SAKAWANA. Andi kini bekerja sebagai jurnalis Mongabay Indonesia dan mendirikan situs berita Katanya.co. Serta konsultan bidang komunikasi Yayasan WWF-Indonesia, sejak tahun 2010.

Ketertarikan pada isu lingkungan pun membuahkan karya buku yang diterbitkan oleh WWF Indonesia, seperti “Jalan Lingkar Restorasi”, “Warna-Warni Borneo” dan menyunting karya, diantaranya “Desa Hijau di Jantung Kalimantan.”

Untuk mempertajam kapasitas sebagai jurnalis, berbagai pelatihan jurnalistik diikuti, seperti Lokakarya Peningkatan Jurnalistik oleh Dewan Pers (2007), Pelatihan Jurnalistik oleh Lembaga Gemawan (2010), Pelatihan Jurnalisme Lingkungan Hidup oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (2010), Pelatihan Investigasi Jurnalistik oleh Transparency International Indonesia (2011).

Kontak korespondensi : andifachrizal@gmail.com

"Cerita masyarakat adat menjaga dan melindungi sumber daya alam dengan kearifan dan pengetahuan lokalnya penting disuarakan ke publik. Kehadiran buku ini dapat memacu para jurnalis di Papua untuk lebih intens mengangkat cerita ini, persoalan lingkungan dan sumber daya alam ditengah krisis lingkungan dan kerusakan alam di Papua yang makin mengkhawatirkan."

- **Dominggus Mampioer**, *Redaktur Senior Jubi.co.id* -

"Hutan Papua adalah benteng terakhir keragaman hayati di Indonesia, bahkan juga di dunia. Tak hanya menjadi rumah bagi ragam flora fauna serta penyerap emisi gas rumah kaca, hutan hujan tropis ini menjadi sumber hidup dan pusat kebudayaan masyarakat lokal. Reportase sejumlah jurnalis tentang hutan Papua dari beragam sudut pandang, yang dibukukan ini, merekam sejumlah masalah sekaligus contoh baik dari masyarakat lokal menjaga ruang hidupnya. Buku ini harus menjadi pengingat bahwa mempertahankan hutan Papua adalah menjaga harapan hidup masyarakat lokal, serta penduduk Bumi."

- **Ahmad Arif**, *Ketua Umum Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia* -

"Cerita eksploitasi hutan, pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan akibat aktivitas manusia, mendominasi pemberitaan tentang hutan Papua. Menariknya, kisah-kisah yang tertuang dalam buku ini berbeda. Tak hanya memotret persoalan masyarakat Papua yang hidup bersama hutan, tapi bagaimana mereka memegang andil menjaga dan merawat sumber kehidupannya. Kehadiran buku ini bak infrastruktur yang menghubungkan antara misi penyelamatan lingkungan dengan kerja kreatif jurnalis, yang mengingatkan bahwa hutan Papua adalah bank plasma nutfah dan nafas bumi yang tersisa."

- **Andi Fachrizal**, *Koordinator Pengembangan Isu Wilayah Tengah
The Society of Indonesian Environmental Journalists*-